



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
2013 - 2018**

**DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
MEDAN
TAHUN 2014**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS KESEHATAN

Jalan Prof. H.M. Yamin SH, No.41AA Telp 4535320 - Fax. 4524550

MEDAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 440.441.7/24469/XI/2014

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA 2013-2018

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa berdasarkan keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, Kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD.
 - b. bahwa berdasarkan poin KELIMA Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/941/KPTS/2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dinyatakan bahwa Kepala SKPD harus menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun Renja SKPD.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Rencana Startegis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Estándar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tataacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8);

27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 Nomor 5);
30. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
31. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Berita daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 29);
32. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/941/KPTS/2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang telah melalui proses verifikasi akhir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : Renstra SKPD ini lahir berpedoman dan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara terutama dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. perumusan visi dan misi SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah;
- b. perumusan strategi dan kebijakan SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah;
- c. perumusan rencana program, kegiatan SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah;

- d. perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah;
- e. pentahapan pelaksanaan program SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.

Keempat : Dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD berpedoman kepada kaidah sebagai berikut :

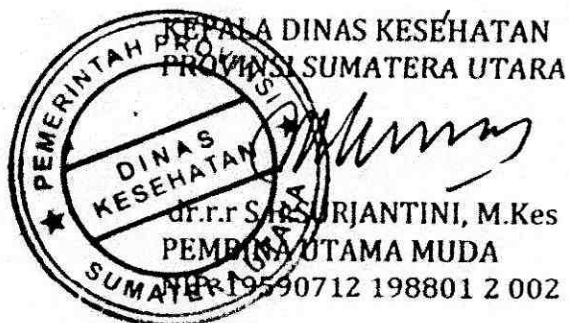
- a. Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD;
- b. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD mencakup indikator kinerja SKPD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD;
- c. Pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renstra SKPD. Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin :
 - 1. Indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra SKPD telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renstra SKPD.
 - 2. Visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja SKPD.
- d. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja SKPD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD telah dilaksanakan melalui Renja SKPD.
- e. Kepala SKPD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara.
- f. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.
- g. Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara.

Kelima : Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun Renja SKPD.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan

Tanggal : 3 November 2014



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara
d/p. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara
3. Peringgal

KATA PENGANTAR

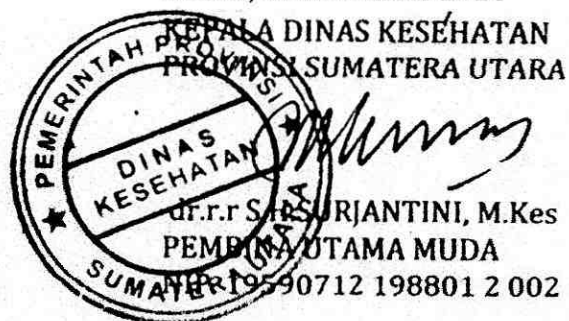
Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 telah dapat disusun dan diharapkan dapat dupergunakan sebagai dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan strategis yang akan diacu oleh berbagai pihak termasuk sektor swasta dan lintas sektor dalam pembangunan kesehatan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara kurun waktu 2013-2018.

Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 ini telah melalui tahapan termasuk tahapan penyesuaian pasca ditetapkannya RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018. Oleh karena itu Renstra ini sudah merupakan penjabaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018, mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 serta Renstra Departemen Kesehatan RI 2010-2014, Sasaran dan target pencapaian pembangunan Millenium (MDGs) sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Target Pembangunan Millenium (RAN MDGs), Sasaran dan target penanganan pangan dan gizi sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG).

Oleh karena itu besar harapan saya, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang di rencanakan dalam Renstra ini dapat menjadi acuan sekaligus sebagai tolok ukur kinerja bagi semua pihak, sehingga Visi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara lima tahun kedepan mampu diwujudkan yang pada akhirnya menjadikan Sumatera Utara mampu menjadi Provinsi yang berdaya saing dan sejahtera sesuai Visi Gubernur Sumatera Utara 2013-2018.

Akhir kata, saya menyadari bahwa dokumen Renstra ini belumlah mencapai titik sempurna, untuk itu saya ingin semua pihak dapat memberikan masukan, sehingga kedepannya Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera 2013-2018 ini dapat lebih baik dan fokus efektif dan efisien. Semoga seluruh daya upaya yang kita lakukan selalu mendapatkan rahmat dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Medan, 03 November 2014



DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR.....	Hal i
	DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1. Latar Belakang.....	1
	1.2. Landasan Hukum.....	2
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
	1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA.....	6
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	6
	2.2. Sumber Daya SKPD.....	10
	2.2.1. Sumber Daya Manusia.....	10
	2.2.2. Sarana dan Prasarana Kesehatan.....	11
	2.2.3. Pembiayaan Kesehatan.....	12
	2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.....	12
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.....	21
	2.4.1. Tantangan.....	21
	2.4.2. Peluang.....	22
BAB III	ISU-ISU STRATEGIK BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	23
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	23
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	24
	3.3. Telaahan Renstra K/L.....	26
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	29
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	29
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRETEGIS DAN KEBIJAKAN.....	31
	4.1. Visi dan Misi.....	31
	4.2. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah SKPD.....	31
	4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD.....	39
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	43
	5.1. Program pelayanan administrasi Perkantoran.....	43
	5.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.....	43
	5.3. Program peningkatan disiplin aparatur.....	43
	5.4. Program Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur.....	43
	5.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.....	43
	5.6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.....	43
	5.7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.....	45

5.8.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.....	52
5.9.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat.....	58
5.10.	Program Lingkungan Sehat.....	60
5.11.	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.....	
5.12.	Program Upaya Kesehatan Perorangan.....	62
5.13.	Program Sumber Daya Kesehatan.....	64
5.14.	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan.....	
5.15.	Program Penelitian dan Pengembangan.....	
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	65
BAB VII	PENUTUP.....	70

LAMPIRAN 1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA 2013-2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam rangka tercapainya tujuan tersebut pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara terarah, berkesinambungan dan realistis melalui peningkatan upaya kesehatan, peningkatan pembiayaan kesehatan, pemenuhan sumber daya manusia kesehatan, penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan manajemen dan sistem informasi kesehatan serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan pembangunan kesehatan harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor baik eksternal maupun internal organisasi. Faktor eksternal, seperti perubahan epidemiology penyakit, pertumbuhan dan perkembangan penduduk, perubahan iklim dan ekologi termasuk memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disamping itu perlu juga diperhatikan faktor arus globalisasi, perkembangan demokrasi disuatu negara atau kawasan. Faktor internal organisasi seperti Sumber daya manusia, dukungan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan demokrasi, good governance, termasuk perkembangan teknologi informasi.

Dalam upaya memberikan arah penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk 5 (lima) tahun kedepan, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara wajib menyusun program dan kegiatan strategis sebagai arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam sebuah dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) harus dijadikan sebagai arah pembangunan kesehatan sampai tahun 2025. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan, kemandirian, adil dan merata serta mengutamakan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan seperti ibu, anak, manusia lanjut usia dan keluarga miskin. Didalam Rencana Pembangunan Jangka panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025 tahap 2 (2010-2014) berbagai indikator kesehatan semakin membaik seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, menurunnya kesenjangan/disparitas antar individu, kelompok masyarakat dan antar daerah.

Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan diacu dan mengikat berbagai pihak termasuk sektor swasta dan lintas sektor dalam pembangunan kesehatan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara kurun waktu 2013-2018. Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 merupakan penjabaran RPJMD

Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 serta Renstra Departemen Kesehatan RI 2010-2014. Sasaran dan target pencapaian pembangunan Millenium (MDGs) sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Target Pembangunan Millenium (RAN MDGs), Sasaran dan target penanganan pangan dan gizi sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG). Penetapan periodisasi waktu (time series) 2013-2018 Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ditetapkan berdasarkan tahun pelantikan Gubernur Provinsi Sumatera Utara sampai berakhirnya periode Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.

1.2 Landasan Hukum

Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 disusun sebagai upaya penanganan masalah dan isu-isu strategis merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Landasan Hukum Penyusunan Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
10. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Estándar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 6);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-

- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. (Lembaran daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5);
 30. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
 31. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Berita daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 29);
 32. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/941/KPTS/2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 adalah sebagai penjabaran arah dan kebijakan pembangunan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai Visi Gubernur Sumatera Utara yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018.

Tujuan penyusunan Rencana strategis SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 adalah

1. Penjabaran kondisi umum dan arah pembangunan kesehatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan analisis terhadap permasalahan, isu strategis, kebijakan dan prioritas pembangunan kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai Visi Gubernur Sumatera Utara lima tahun kedepan sampai dengan Tahun 2018.
2. Tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara lima tahun kedepan
3. Menjabarkan target indikator kinerja program dan kegiatan prioritas pembangunan kesehatan Provinsi Sumatera Utara lima tahun kedepan
4. Menetapkan rincian tujuan, sasaran, program prioritas dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara kurun waktu 5 tahun sampai Tahun 2018.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 terdiri dari 6 Bab, dimana masing-masing bab memuat beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang menguraikan secara ringkas tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Sumber Daya yang dimiliki serta mengurai secara statistik Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Bab III adalah Isu-isu Strategik berdasarkan Tugas dan Fungsi yang berisi uraian tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi yang diemban oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV adalah Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang menjelaskan Visi, Misi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara berikut Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang ingin dicapai, serta Strategi dan Kebijakan yang akan dilaksanakan.

Bab V adalah Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebagai upaya mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu (5) lima tahun sebagai implementasi RPJMD Provinsi Sumatera Utara yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Bab VI adalah Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII adalah Penutup yang berisi harapan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara terhadap penetapan Renstra 2013-2018.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2011 adalah "Melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Provinsi di bidang kesekretariatan, pembinaan pengendalian masalah kesehatan, pelayanan kesehatan, pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan jaminan kesehatan serta tugas pembantuan."

Fungsi SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan pengendalian masalah kesehatan, pelayanan kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, dan jaminan kesehatan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembinaan pengendalian masalah kesehatan, pelayanan kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, dan jaminan kesehatan
3. Penyelenggaraan pemberian perizinan di bidang kesehatan
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan
5. Penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan eksternal
6. Penyelenggaraan tugas pembantuan di bidang kesehatan
7. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 tahun 2013 tentang Organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, maka susunan organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan UPT Dinas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan yang meliputi administrasi umum, keuangan, dan program.

Sekretariat membawahi 3 sub bagian, yaitu:

- Sub Bagian Umum;
- Sub Bagian Keuangan;
- Sub Bagian Program.

2. Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan

Mempunyai tugas dan fungsi merumuskan kebijakan operasional, pedoman teknis, pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta melaksanakan koordinasi, bimbingan, konsultasi dan pendampingan teknis pelaksanaan urusan yang meliputi upaya Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, Wabah dan Bencana serta Kesehatan Lingkungan tingkat Provinsi

Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan membawahi 3 seksi yaitu:

- Seksi Bimbingan dan Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;

- Seksi Bimbingan dan Pengendalian Wabah dan Bencana;
- Seksi Bimbingan dan Pengendalian Penyehatan Lingkungan.

3. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan

Mempunyai tugas dan fungsi merumuskan kebijakan operasional, pedoman teknis, pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta melaksanakan koordinasi, bimbingan, konsultasi dan pendampingan teknis pelaksanaan urusan yang meliputi upaya kesehatan dasar, upaya kesehatan rujukan, dan upaya kesehatan khusus tingkat provinsi.

Bidang Bina Pelayanan Kesehatan membawahi 3 seksi, yaitu:

- Seksi Bimbingan dan Pengendalian Kesehatan Dasar;
- Seksi Bimbingan dan Pengendalian Kesehatan Rujukan;
- Seksi Bimbingan dan Pengendalian Kesehatan Khusus.

4. Bidang Bina Pengembangan SDM Kesehatan

Mempunyai tugas dan fungsi merumuskan kebijakan operasional, pedoman teknis, pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta melaksanakan koordinasi, bimbingan, konsultasi dan pendampingan teknis pelaksanaan urusan yang meliputi perencanaan, pendayagunaan, pendidikan dan pelatihan, registrasi dan akreditasi SDM kesehatan tingkat Provinsi.

Bidang Bina Pengembangan SDM Kesehatan membawahi 3 seksi, yaitu:

- Seksi Bimbingan dan Pengendalian Perencanaan dan Pendayagunaan;
- Seksi Bimbingan dan Pengendalian Pendidikan dan Pelatihan;
- Seksi Bimbingan dan Pengendalian Registrasi dan Akreditasi.

5. Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan

Mempunyai tugas dan fungsi merumuskan kebijakan operasional, pedoman teknis, pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta melaksanakan koordinasi, bimbingan, konsultasi dan pendampingan teknis pelaksanaan urusan yang meliputi jaminan kesehatan, sarana dan peralatan kesehatan serta kefarmasian tingkat Provinsi.

Kepala Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan membawahi 3 seksi, yaitu:

- Seksi Bimbingan dan Pengendalian Kefarmasian;
- Seksi Bimbingan dan Pengendalian Jaminan Kesehatan;
- Seksi Bimbingan dan Pengendalian Sarana dan Peralatan Kesehatan.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Sebelumnya terdapat 7 (tujuh) UPT yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. UPT Tersebut adalah UPT Rumah Sakit Kusta Sicanang yang membawahi unit pelayanan kusta Belidahan di Kabupaten Serdang Bedagai. Pada Tahun 2013, berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas kesehatan Provinsi Sumatera Utara maka UPT Rumah Sakit Kusta Sicanang yang membawahi Unit Pelayanan Kusta Belidahan serta Unit Pelayanan Kusta Hutasaalem yang sebelumnya dibawah UPT Rumah Sakit Kusta Lau Simomo.

1. UPT Kesehatan Indera Masyarakat (KIM)

Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketatausahaan dan kesehatan indera masyarakat

2. UPT Kesehatan Paru Masyarakat (KPM)

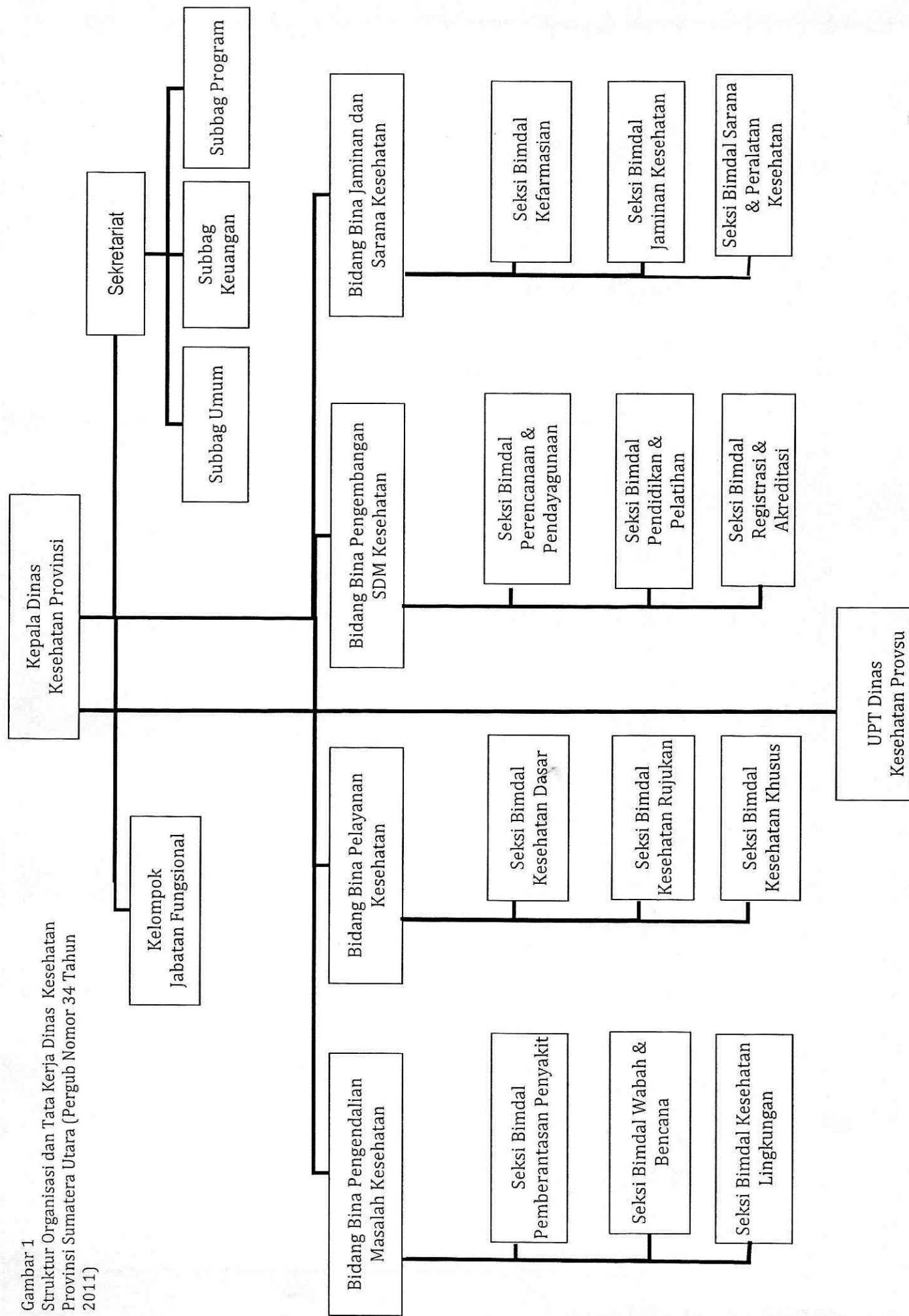
Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketatausahaan/administrasi dan kesehatan paru masyarakat

3. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)
Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketatausahaan/administrasi dan Laboratorium kesehatan daerah
4. UPT Pelatihan Kesehatan (Pelkes)
Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketatausahaan/administrasi dan pelatihan kesehatan
5. UPT Provincial Training Centre (PTC) Kesehatan Masyarakat Indrapura di Kabupaten Batubara
Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketatausahaan/administrasi dan Provincial Training Centre kesehatan Masyarakat
6. UPT Rumah Sakit Kusta Lau Simomo di Kabupaten Karo
Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketatausahaan/administrasi serta pengelolaan Rumah Sakit Kusta Lau Simomo
7. UPT Layanan Ambulan dan Pengaduan Masyarakat (LAPEMA)
Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketatausahaan/administrasi dan pengelolaan ambulan dan pengaduan masyarakat

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan keahlian masing-masing, yang dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Utara (Pergub Nomor 34 Tahun
2011)



2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1. Sumber Daya manusia

Sampai dengan Tahun 2013 Sumberdaya manusia kesehatan yang bekerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara termasuk UPT Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara berjumlah 1.160 orang terdiri dari laki-laki 416 orang dan perempuan 744 orang.

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi dan UPT Dinas Tahun 2013

No	Unit Kerja/UPT	Jumlah	Jenis Kelamin		Ket
			L	P	
1.	Dinas Kesehatan Provinsi	442	186	256	
2.	UPT KIM	109	27	82	
3.	UPT KPM	109	24	85	
4.	UPT Labkesda	77	26	51	
5.	UPT PTC Kesmas	18	4	14	
6.	UPT RS Kusta Laosimomo	77	31	46	
7.	UPT Lapema	16	5	11	
8.	UPT RS Kusta Sicanang	129	40	89	
9.	Dipekerjakan diluar Dinkes	116	41	75	
	Jumlah	1160	416	744	

Sedangkan komposisi ketenagaan SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan pendidikan sebagian besar SMU sederajat 40,25%, disusul oleh D3 Kesehatan 22,02%. Namun demikian tenaga kesehatan dengan jenjang pendidikan S2 Kesehatan dari tahun ketahun semakin meningkat (Tabel 2.)

Tabel 2.2.
Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan UPT Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013

No	Jenis Ketenagaan	Jumlah	%
1.	SD	13	1,26
2.	SMP	29	2,81
3.	SMU Sederajat	415	40,25
4.	D-3 Kesehatan	227	22,02
5.	D-3 Non Kesehatan	14	1,36
6.	S-1 Kesehatan	143	13,87
7.	S-1 Non Kesehatan	73	7,08
8.	Dokter Umum	120	11,64
9.	Dokter Gigi	31	3,01
10.	S-2 Kesehatan	84	8,15
11.	S-2 Non Kesehatan	11	1,07
		1160	

Tabel 2.3.
Proporsi Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan UPT Dinas berdasarkan
Kepangkatan Tahun 2013

Unit Kerja	Kepangkatan /Golongan Pegawai						Jumlah
	I & II	%	III	%	IV	%	
Dinkes Provsu dan UPT Dinas	286	28	759	74	115	11	1.160

Dari Tabel 3 terlihat bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2014 didominasi oleh pangkat Golongan III sebanyak 759 Orang atau 74%.

Sampai dengan tahun 2012 Sumber daya Manusia Kesehatan yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan baik swasta maupun pemerintah tercatat 45.535 orang yang terdiri dari 43.713 orang berpendidikan kesehatan dan 1.822 orang tenaga tidak berlatar belakang pendidikan kesehatan. Dari 43.713 orang tenaga kesehatan terdiri dari Dokter Spesialis 2.098 orang meningkat apabila dibandingkan jumlah dokter spesialis tahun 2011 yaitu 419 orang, demikian juga tenaga kesehatan lainnya seperti dokter umum 2.971 orang, dokter gigi 915 orang, perawat 15.765 orang, bidan 12.792 orang, farmasi 1.824 orang, kesehatan masyarakat 1.612 orang, sanitarian 545 orang, nutrisionist 1.006 orang, keterampilan fisik 281 orang dan keteknisian medik 1.382 orang rata-rata mengalami peningkatan jumlah apabila dibandingkan dengan jumlah tenaga tersebut pada Tahun 2011 (Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 dan 2012). Rasio tenaga medis atau dokter per Puskesmas sudah melampaui target Renstra 2009-2013 yaitu 1 per Puskesmas. Namun demikian dari aspek pemerataan sampai dengan tahun 2013 masih terdapat 44 Puskesmas yang belum memiliki dokter umum maupun dokter gigi.

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Akses masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan sampai dengan tahun 2012 telah menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2012 jumlah Puskesmas di Provinsi Sumatera Utara yang melakukan pelayanan kesehatan dasar sebanyak 569 puskesmas terdiri dari Puskesmas Perawatan sebanyak 163 unit dan Puskesmas Non Perawatan sebanyak 406 unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 2.085 unit dan Puskesmas Keliling sebanyak 522 unit. Pada Tahun 2012 Setiap Kecamatan di Provinsi Sumatera Utara sudah memiliki paling sedikit 1 (satu) puskesmas. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Sumatera Utara (13.215.401 jiwa), maka 1 puskesmas melayani 23.225 jiwa, bila dibandingkan dengan standar nasional yaitu 1 (satu) puskesmas melayani 30.000 jiwa, maka jumlah Puskesmas telah memenuhi standar nasional sedangkan Puskesmas Pembantu telah mampu melayani 3-4 desa. Puskesmas Perawatan telah mengalami peningkatan jumlah dari sebelumnya 151 Puskesmas pada Tahun 2011 meningkat menjadi 163 Puskesmas Perawatan.

Pada tahun 2012 jumlah Rumah Sakit Umum baik milik Pemerintah maupun Swasta juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 jumlah Rumah Sakit Umum baik milik pemerintah maupun swasta di Provinsi Sumatera Utara 169 unit meningkat menjadi 173 unit pada Tahun 2013. Hampir di setiap ibukota Kabupaten/Kota telah memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), kecuali Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, dan Kota Gunung Sitoli. Berdasarkan data Riskesdas Tahun 2013 moda transportasi yang digunakan masyarakat untuk mengakses Puskesmas di

Provinsi Sumatera Utara pada umumnya adalah kendaraan roda dua yaitu 56,8%, demikian juga dengan Rumah Sakit, bahwa sebagian besar masyarakat mampu mengakses Rumah Sakit milik pemerintah dengan menggunakan kendaraan roda dua yaitu 58,6% sedangkan Rumah sakit Swasta sebesar 51,0%.

2.2.3. Pembiayaan Kesehatan

Sumber pembiayaan kesehatan terdiri dari pembiayaan yang bersumber dari masyarakat, swasta dan pemerintah. Pada tahun 2012 struktur pembiayaan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara bersumber dari masyarakat dan pihak swasta mencapai 60% sedangkan pembiayaan kesehatan yang bersumber dari pemerintah sekitar 30-40%.

Apabila diperhatikan sumber Pembiayaan kesehatan Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi Sumatera Utara, APBN dan Tugas Perbantuan dan Dekonsentrasi. Pada tahun 2012 proporsi pembiayaan kesehatan yang paling tinggi bersumber dari APBD Kabupaten/Kota (79,19%), disusul dari APBN (18%) dan APBD Provinsi (6,16%), PHLN (0,06%) lain-lain sebesar (0,06%). Pembiayaan kesehatan dari APBN tahun menurun dari 21,92% pada Tahun 2011 turun menjadi 17,92% Pada Tahun 2012.

Pada tahun 2012 biaya kesehatan perkapita penduduk Provinsi Sumatera Utara yang dibiaya oleh Pemerintah sebesar Rp. 228.916/kapita pertahun meningkat bila dibandingkan tahun 2011 yaitu 179.798/ kapita. Walaupun dana APBD (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk bidang kesehatan mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun persentase pembiayaan bidang kesehatan terhadap total dana APBD (belanja langsung dan belanja tidak langsung) baru mencapai kisaran 7%, masih sangat jauh dari harapan 10% dari total APBD diluar gaji sesuai dengan besaran anggaran yang wajib dialokasikan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dari 33 Kabupaten/Kota hanya 7 daerah yang alokasi dana bidang kesehatan terhadap total APBD Kabupaten/Kota telah mencapai 10%, yaitu Kabupaten Nias, Labuhan Batu, Karo, Deli Serdang, Tanjung Balai, Pematang Siantar dan Tebing Tinggi.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2013 dapat dilihat dari hasil evaluasi indikator program dan kegiatan yang terdapat dalam Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013.

2.3.1. Pelayanan Kesehatan dasar

Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami penurunan walaupun menunjukkan indikasi perlambatan; berdasarkan hasil SDKI 2002-2003, AKB Sumatera Utara tercatat sebesar 40 per 1.000 kelahiran hidup dan angka ini stagnan dibandingkan dengan hasil SDKI 2012 yaitu tetap diangka 40 per 100.000 kelahiran hidup. Begitu juga halnya dengan Angka Kematian Ibu (AKI) diprediksikan mengalami penurunan, namun tetap masih kategori tinggi. Dengan mempergunakan angka sementara SDKI 2012, AKI Sumatera Utara diperhitungkan berada diangka 328 per 100.000 kelahiran hidup. Sejalan dengan penurunan AKB, Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat dari 68,9 tahun pada tahun 2006 menjadi 70,9 tahun pada tahun 2010 (SP, 2010).

Cakupan upaya kesehatan masyarakat mengalami perbaikan pada beberapa indikator namun cakupan kunjungan rawat jalan penduduk Tahun 2012 menurun menjadi 38,19% dibandingkan Tahun 2011 sebesar 49,06%. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan meningkat dari 85,93% pada tahun 2009 menjadi 88,78% pada tahun 2012. Begitu juga dengan cakupan antenatal (K4) meningkat dari 81,77% pada tahun 2009 meningkat menjadi 85,92%, cakupan kunjungan bayi meningkat dari 70,66% pada tahun 2009 mencapai 84,22% pada tahun 2012. Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin di Puskesmas mencapai 100%, jumlah puskesmas meningkat menjadi 569 unit pada tahun 2012, dengan perincian 163 unit puskesmas rawat inap dan 406 unit puskesmas non perawatan; puskesmas pembantu sebanyak 2.085 unit dan 522 unit puskesmas keliling yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian setiap 100.000 penduduk Provinsi Sumatera Utara, rata-rata dilayani oleh 4 puskesmas atau satu puskesmas melayani 23.225 jiwa penduduk dan satu puskesmas pembantu telah melayani 3-4 desa. Perhatian perlu diberikan pada cakupan neonatus (KN3) yang mengalami penurunan dari 90,4% tahun 2009 menjadi 84,22 tahun 2012, jumlah puskesmas yang menyelenggarakan PONEC belum sesuai target nasional yaitu 4 Puskesmas tiap kabupaten/kota.

2.3.2. Pelayanan Kesehatan Rujukan

Cakupan upaya kesehatan perorangan mengalami peningkatan dan beberapa telah mencapai target, seperti peningkatan jumlah rumah sakit yang melaksanakan pelayanan gawat darurat meningkat menjadi 88,69% yaitu 168 RSUD dari 189 RSUD yang ada di Sumatera Utara. Jumlah RSUD yang menyelenggarakan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) meningkat dari 11 RSUD pada tahun 2011 menjadi 14 RSUD pada tahun 2012. Persentase RSUD yang terakreditasi meningkat dari 16,93% pada tahun 2011 menjadi 39,15% pada tahun 2012. Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin di rumah sakit sebesar 100%, dan jumlah RSUD meningkat menjadi 33 RSUD dari 31 RSUD pada tahun 2011. Namun, penguatan utilisasi rumah sakit masih perlu mendapatkan perhatian terutama utilisasi di RSUD, indikator mutu rumah sakit seperti BOR, LOS, TOI dan BTO belum mencapai standard nasional.

2.3.3. Pengendalian dan Pencegahan penyakit

Cakupan program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular juga mengalami peningkatan capaian walaupun penyakit infeksi menular masih tetap menjadi masalah kesehatan yang menonjol terutama TB, Malaria, HIV/AIDS, DBD dan Diare disamping masih ditemukannya penyakit-penyakit menular neglected tropical diseases yang seharusnya sudah di eliminasi atau dieradikasi. Diare merupakan penyakit dengan frekuensi KLB yang cukup tinggi, bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, dari 559.011 perkiraan kasus diare yang ditemukan dan ditangani adalah sebanyak 216.175 atau 38,67%, sehingga angka kesakitan (Incidence Rate) diare per 1.000 penduduk mencapai 16,36%. Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 yaitu 19,35% dan 2010 yaitu 18,73%. Incidence Rate diare jauh di bawah target program yaitu 220 per 1.000 penduduk. Rendahnya Incidence Rate diare ini belum merefleksikan menurunnya kejadian penyakit diare pada masyarakat tetapi lebih dikarenakan banyaknya kasus yang tidak terdata (unreporting cases).

Jumlah kasus DBD tercatat 4,367 kasus dengan Insiden Rate (IR) sebesar 33 per 100.000 penduduk. Dibandingkan dengan tahun 2010 dan 2011, angka ini mengalami penurunan yang tajam yaitu dari 72 per 100.000 penduduk tahun 2010 dan 45/100.000 penduduk, namun masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2006 dan tahun-tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan angka indikator keberhasilan program dalam menekan laju penyebaran DBD, yaitu Insidens Rate DBD adalah sebesar 5 per 100,000 penduduk, angka pencapaian Sumatera Utara sangat jauh

lebih tinggi dari indikator tersebut. Dilain pihak, Case fatality rate (CFR) berfluktuatif yaitu dari 1,25% pada tahun 2010 naik menjadi 1,45% pada tahun 2011 serta turun kembali menjadi 1,21% pada tahun 2012. Angka CFR DBD ini belum mampu mencapai target nasional yaitu <1%.

Upaya Penanggulangan penyakit HIV/AIDS, Tuberkulosis paru dan Malaria (ATM) sudah mengalami perbaikan namun masih perlu mendapatkan perhatian dalam peningkatan pengendalian untuk masa yang akan datang. Annual Malaria Incidence (AMI) mengalami penurunan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2012 AMI Sumatera Utara tercatat 2 per 1000 penduduk. Case Detection Rate (CDR)/Cakupan penemuan penderita TB (BTA+) mencapai 82,57% pada tahun 2012; angka ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu 76,57% dan 2010 yaitu 68,86%. Angka keberhasilan (Success Rate) mencapai 83,34%, dengan perincian persentase kesembuhan 74,15% dan persentase pengobatan lengkap 9,19%. Angka sukses rate pada tahun 2012 ini mengalami peningkatan namun belum mampu mencapai target nasional yaitu 85%. Dalam sepuluh tahun terakhir, peningkatan HIV&AIDS meningkat begitu tajam. Pada tahun 2012, jumlah kasus HIV/AIDS meningkat tajam menjadi 6.430 kasus dengan rincian, 2.189 kasus HIV dan 4.241 kasus AIDS. Berdasarkan karakteristik penderita diketahui penderita terbanyak adalah pria sekitar 75% dan wanita yaitu 25%. Sumber penularan terbanyak melalui hubungan heteroseksual 65% dan pengguna jarum suntik (IDUs) 26%. Persentase penularan dari ibu ke bayi (*parenteral*) meningkat dari 0,6% tahun 2007 menjadi 1,6% pada tahun 2012. Berdasarkan golongan umur yaitu 84% adalah kelompok usia 20-39 tahun. Berdasarkan kebangsaan diketahui 99,2% adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

Cakupan penemuan kasus Pneumonia pada balita masih rendah. Pada tahun 2012, dari 148.431 perkiraan kasus balita yang menderita pneumonia; yang ditemukan dan ditangani hanya 17.443 balita atau 11,74%; angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2011 yaitu 22.442 balita atau 15,56%. AFP rate tercatat 2,36 per 100.000 penduduk berumur < 15 tahun, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2011 yaitu 1,28 per 100.000 penduduk berumur < 15 tahun, angka ini sudah mampu mencapai target nasional yaitu ≤ 2 per 100.000 penduduk berumur < 15 tahun.

Pada tahun 2012 jumlah kasus baru filariasis ditemukan sebanyak 36 kasus, jumlah ini meningkat dari tahun 2011, yaitu 15 kasus. Pada tahun 2012, dilaporkan 4.968 kasus gigitan hewan penular rabies, dan 4.208 diantaranya diberikan VAR (84,70%) dan 18 gigitan dinyatakan positif Lyssa (Rabies). Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011, yaitu 3.935 kasus gigitan, dengan 2.774 kasus diberikan VAR dan 31 specimen dinyatakan positif Lyssa. Kasus Lyssa dilaporkan di 10 Kab/Kota yaitu, 1 kasus masing-masing di Kabupaten Deli Serdang, Simalungun, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Nias, Humbang Hasundutan dan Gunung Sitoli; sebanyak 5 kasus ditemukan di Kabupaten Tapanuli Tengah, 4 kasus di Kabupaten Nias Selatan, dan 2 kasus di Kabupaten Serdang Bedagai. Pada akhir tahun 2012 prevalensi rate kusta di Provinsi Sumatera Utara sudah relatif sangat rendah yakni 0,17 per 10.000 penduduk (Lihat lampiran tabel 19). Jumlah kasus kusta terbanyak tercatat di Kota Medan yaitu 61 kasus, diikuti dengan Asahan sebanyak 23 kasus dan Tapanuli Selatan sebanyak 20 kasus. Distribusi kasus kusta baru pada anak < 15 tahun cenderung berfluktuasi dalam 3 tahun terakhir, tahun 2012 persentasinya sebesar 13,81%, angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu sebesar 9,55%, dan tahun 2010 yaitu 12,24%. Dan angka tersebut jauh diatas indikator nasional yakni <5% dari total kasus pada seluruh kelompok umur. Sehingga berdasarkan fakta tersebut maka diperlukan upaya yang lebih giat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan penyakit kusta karena diperkirakan masih terdapat sumber penularan di sekitar tempat tinggal kasus yang mestinya harus ditemukan.

Untuk penyakit tidak menular, merujuk kepada hasil Riskesdas 2007, dari 10 jenis penyakit tidak menular diketahui bahwa penyakit persendian memiliki prevalensi tertinggi diikuti oleh penyakit jantung, gangguan mental dan hipertensi.

2.3.4. Perbaikan Gizi Masyarakat

Upaya perbaikan gizi masyarakat juga mengalami perbaikan meskipun sebagian besar indikator masih dibawah target Nasional. Pemberian kapsul vitamin A pada anak balita usia 6-59 bulan sebesar 72,17% masih dibawah target nasional yaitu 80%, dan pemberian tablet besi (Fe) pada ibu hamil sebesar mengalami peningkatan yaitu 62,22% pada tahun 2010 menjadi 75,15% pada tahun 2011 dan 77,37% pada tahun 2012 juga belum mampu mencapai target nasional yaitu 80%; begitu juga halnya dengan pemberian ASI Eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan hanya mencapai 34,2% masih dibawah target nasional yaitu 40%. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilaksanakan oleh Kemenkes tahun 2010, menunjukkan perbaikan pada prevalensi balita dengan gizi buruk dan kurang di Provinsi Sumatera Utara yaitu 21,4%, mengalami penurunan dibandingkan hasil Riskesdas tahun 2007 yaitu 22,7%. Disparitas status gizi juga cukup besar antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi. Kedepan perbaikan gizi perlu difokuskan pada kelompok sasaran ibu hamil dan anak sampai usia 2 tahun mengingat dampaknya terhadap tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan dan produktivitas generasi yang akan datang (Bank Dunia, 2006).

2.3.5. Upaya Kesehatan

Rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk belum memenuhi target nasional. Dari 11 jenis sumber daya manusia kesehatan, perawat dan bidan yang mampu mencapai target nasional yaitu 100 orang/100.000 penduduk. Untuk dokter spesialis sebesar 15,84 per 100.000 penduduk (target per 100.000 penduduk), dokter umum sebesar 21,44 per 100.000 penduduk (target per 100.000 penduduk), dokter gigi sebesar 6,70 per 100.000 penduduk (target per 100.000 penduduk), perawat sebesar 112,58 per 100.000 penduduk (target per 100.000 penduduk), bidan sebesar 93,01 per 100.000 penduduk (target per 100.000 penduduk). Tenaga kesehatan seperti apoteker, sarjana kesehatan masyarakat, sanitarian, tenaga gizi, terapi fisik dan teknis medis masih jauh dari kebutuhan atau standar nasional. Disamping itu tenaga kesehatan sebagian besar terkonsentrasi di daerah perkotaan dan juga daerah atau Kabupaten/Kota yang tingkat pendapatannya per kapitanya cukup tinggi.

2.3.6. Obat dan Perbekalan Kesehatan

Cakupan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan baru mencapai 90% dan anggaran untuk obat esensial generik di sektor publik yaitu Rp. 8.500. Sementara itu menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) standar alokasi obat publik per kapita minimal 2 dollar sedangkan menurut kementerian kesehatan sebesar 1 dollar per kapita. Persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat sebesar 51,11%, persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan dasar 35,14% dan jumlah Rumah Sakit Pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sesuai standar hanya mencapai 4 RSUD. Persentase ketersediaan obat dan vaksin Tahun 2013 hanya 54% dari target 95%.

2.3.7. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Cakupan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat belum menunjukkan hasil yang optimal, seperti Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat baru mencapai 52% dan persentase posyandu purnama mandiri sebesar 38,10%. Pada tahun 2012 Jumlah desa siaga di Provinsi Sumatera Utara 4.459 desa namun jumlah desa siaga aktif hanya 2.583 desa atau 57,93%. Dibandingkan Tahun 2011 terjadi penurunan jumlah desa siaga aktif dari 2.835 (60,71%)

2.3.8. Lingkungan Sehat

Cakupan Program Lingkungan Sehat mengalami peningkatan namun belum mampu mencapai target nasional seperti persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan mencapai 73% dari target nasional 75%, persentase keluarga menggunakan air bersih meningkat dari 52% menjadi 60% dari target nasional 85%, persentase keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan yaitu 66% dari target nasional yaitu 70%, persentase Tempat-tempat Umum (TTU) Sehat mencapai 70,30% dari target nasional 80%.

2.3.9. Kebijakan dan manajemen Kesehatan

Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan masih perlu dikembangkan dan lebih difokuskan, utamanya untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan kesehatan melalui penguatan manajerial dan sinkronisasi perencanaan kebijakan, program dan anggaran. Cakupan penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan dan terlayani sudah mencapai 100%, persentase penduduk Provinsi Sumatera Utara yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan sampai dengan tahun 2012 hampir 60% penduduk Sumatera Utara. Beberapa daerah Kabupaten/kota dan Provinsi Sumatera Utara juga sudah mengalokasikan APBD untuk jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin di luar kuota jamkesmas. Kedepan perlu ditekankan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan dan anggaran yang dilengkapi dengan panduan tentang Kewenangan Wajib serta implementasi SPM bidang kesehatan, serta penerapan Norma, Standar, prosedur dan kriteria yang jelas atas kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

2.3.10. Kinerja Anggaran

Potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dapat dianalisis berdasarkan Kinerja Keuangan periode Renstra 2009-2013. Dari tabel 2.2. tergambar realisasi anggaran SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara rata-rata diatas 90%. Namun apabila diperhatikan belanja tidak langsung belanja pegawai cenderung meningkat dari tahun ketahun, sementara itu pertumbuhan belanja langsung yaitu belanja pegawai (Rp.-389.000.000) dan belanja modal (-6.089.000.000) mengalami pertumbuhan negatif, sedangkan belanja barang jasa mengalami pertumbuhan yang cukup besar (Rp.21.606.000.000).

Dari gambaran diatas dapat juga disimpulkan bahwa sebagian besar APBD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di alokasikan untuk belanja pegawai dan belum fokus untuk belanja modal atau belanja intervensi langsung kepada masyarakat. Pada tahun 2013 diakhir Renstra 2009-2013 realisasi anggaran sangat rendah bila dibandingkan dengan jumlah pagu APBD Tahun 2013. Penyerapan anggaran yang cukup rendah tersebut disebabkan oleh belanja barang jasa yang gagal dalam proses pengadaannya, termasuk adanya kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran SKPD di Lingkungan Pemerintah provinsi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran tersebut.

Tabel 2.4
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Utara 2009-2013

No	Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian SKPD Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cakupan Ibu Hamil K4	95%	-	-	82%	84%	86%	88%	89%	91,4%	88,3%	87%	78%	71,9%	111%	105%	101%	88%	81%
2	Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90%	-	-	88%	89%	89,5%	90%	90%	89%	84,4%	86%	83,7%	74,2%	101%	95%	96%	93%	82%
4	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Cakupan Neonatal dengan komplikasi yg ditangani	80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Cakupan kunjungan bayi	90%	-	-	89%	90,5%	91%	92%	93%	65%	69,8%	91%	75%	76%	73%	77%	100%	82%	82%
7	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	100%	-	-	72%	75%	78%	80%	82%	79,2%	67%	86,2%	67,8%	74,2%	110%	89%	111%	85%	90%
8	Cakupan pelayanan anak Balita	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan Gakin	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian SKPD Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
11	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Cakupan peserta KB aktif	70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit:																		
	a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun	2 per 100.000 pddk	-	-	2	2	2	2	2	1,8	2,2	2,36	2,34	2,39	90%	110%	118%	117%	119 %
	b. Penemuan penderita Pneumonia Balita	100%	-	-	25%	27%	40%	60%	80%	28,8%	14,5%	14,5%	15,7%	10%	115%	54%	36%	26%	13%
	c. Penemuan pasien baru TB BTA Positif	100%	-	-	65	70	75	80	85	68,2	74,7	78,1	82,4	79,6	104	107	104	103	93
	d. Penemuan penderita DBD yang ditangani	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e. Penemuan penderita Diare	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/kota	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yg dilakukan penyelidikan Epidemiologi kurang dari 24 jam	100%	-	-	80%	82%	85%	85%	90%	80%	90%	86%	86%	90%	100%	110%	101%	101%	100%
18	Cakupan Desa Siaga aktif	80%	-	-	2%	5%	10%	15%	35%	2%	5%	15%	15%	60,7%	100%	100%	150%	100%	173%

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Utara 2009-2013

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Belanja Tidak Langsung																	
	a. Belanja Pegawai			63.657	79.184	92.654			61.514	69.295				96%	88%			
2	Belanja Langsung																	
	a. Belanja Pegawai	7.019	9.569	7.215	4.887	5.070	6.747	9.193	7.052	4.743	4.917	96%	96%	98%	97%	97%	- 389	- 365
	b. Belanja barang dan jasa	61.336	92.659	83.029	163.119	169.369	55.904	88.083	81.342	157.810	130.561	91%	95%	98%	97%	77%	21.606	14.931
	c. Belanja Modal	34.118	31.600	2.890	18.378	3.692	31.995	29.411	2.639	16.618	16.618	93%	93%	91%	93%	93%	- 6.085	- 5.712

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1. Tantangan

Tantangan pengembangan Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan analisis dan telaahan terhadap Renstra K/L, dan analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi terhadap tantangan bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Capaian sasaran target pada beberapa indikator kinerja dan sasaran utama antara Renstra Kementerian kesehatan dengan capaian Renstra Dinas Kesehatan yang sebagian tidak dapat dicapai (Tabel 3.1.) seperti :
 - a. Persentase capaian Rumah Tangga ber PHBS hanya 65% dari Target Renstra Kementerian Kesehatan 70%
 - b. Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih 74,2% dari target Renstra Kementerian Kesehatan 90%
 - c. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (K4) 79,15 dari target Renstra Kementerian Kesehatan sebesar 95%
2. Regulasi pembagian kewenangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi belum mencerminkan pelaksanaan otonomi daerah yang optimal yang berdampak terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kesehatan di daerah.
3. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang berkontribusi pada meningkatnya permasalahan kesehatan lingkungan, penyediaan rumah sehat, penyediaan kualitas air, pencemaran udara, pengangguran, penyediaan pangan, penyediaan fasilitas kesehatan dan meningkatnya eksploitasi sumberdaya alam.
4. Meningkatnya Usia Harapan Hidup penduduk Provinsi Sumatera Utara yang mengakibatkan proporsi penduduk dengan lanjut usia semakin besar serta meningkatnya bonus demografi dimana jumlah angkatan kerja atau jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan usia tidak produktif yang puncaknya diperkirakan Tahun 2025.
5. Belum terlindunginya masyarakat atas kecenderungan meningkatnya beban pembiayaan kesehatan, disamping meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.
6. Ketimpangan pendapatan perkapita (Gini Ratio) penduduk Sumatera Utara yang masih tinggi yakni sebesar 0,362 (moderat) sedang Gini Ratio Nasional 0,33.
7. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta prevalensi gizi buruk dan kurang.
8. Meningkatnya prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) dilain sisi Prevalensi dan Insidens penyakit menular potensial wabah yang cenderung bersifat pandemi masih tinggi.
9. Disparitas status kesehatan penduduk antar wilayah pantai timur dan pantai barat, wilayah dataran tinggi dan dataran rendah, Perubahan iklim dan ancaman bencana alam.
10. Perubahan Tata Ruang dengan ditetapkannya beberapa kawasan di Provinsi Sumatera Utara sebagai Pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam Program MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia) seperti Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei di Kabupaten Batubara, Pembangunan Pelabuhan Udara Kualanamu di Kabupaten Deliserdang, serta Kawasan Ekonomi terpadu Medan, Binjai, Deliserdang, Karo (Mebidangro) akan mempengaruhi pola hidup dan kehidupan lingkungan hidup strategis masyarakat yang tinggal di Wilayah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2018 sehingga perubahan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam harus menjamin pelestarian lingkungan hidup dan ekologi dan menjamin pembangunan berkelanjutan dan pengurangan dampak kesehatan seminimal mungkin

2.4.2 Peluang

Peluang pengembangan Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan analisis dan telaahan terhadap Renstra K/L, dan analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dapat dikatogaorikan sebagai peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Regulasi
 - a. Telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
 - b. Diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
 - c. Diundangkannya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan sejak 1 Januari 2014 BPJS Kesehatan akan operasional.
 - d. Diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
2. Organisasi
 - a. Adanya trend peningkatan kuantitas Sumber daya manusia kesehatan dan Peningkatan Jumlah sarana pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta.
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan
 - c. Adanya UPT Dinas Kesehatan Provinsi yang memungkinkan untuk dilakukan revitalisasi dan Pengembangan pelayanan.
2. Operasional
 - a. Meningkatnya pembiayaan untuk operasional program dan kegiatan termasuk penyediaan obat publik essensial dan prasaran pendukung kinerja
 - b. Meningkatnya berbagai indikator pembangunan Sumber Daya Manusia seperti menurunnya angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat yang ditandai dengan membaiknya indikator gizi buruk
3. Keuangan
 - a. Kecenderungan meningkatnya pendapatan negara dan daerah yang berimbas terhadap meningkatnya alokasi anggaran untuk sektor kesehatan
 - b. Ditetapkannya alokasi anggaran untuk bidang kesehatan diluar gaji sebesar 10% dari total APBD Provinsi dan Kabupaten Kota.
4. Politik
 - a. Partisipasi masyarakat dalam ikut serta melakukan pengawasan atas kinerja pemerintah
 - b. Adanya dukungan dan kerjasama yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung program kesehatan yang pro poor dan pro keadilan
5. Lainnya (lingkungan)
 - a. Diterapkannya prinsip Good Governance
 - b. Kesepakatan dan kerjasama regional/bilateral maupun global seperti Komunitas Asean dan pasar bebas Asean (Asean free trade) tahun 2015 dan asayarakat Ekonomi Asean (Asean Economic Community).

BAB III

ISU-ISU STRATEGIK BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.1.1. Faktor Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)

1. Masih lemahnya kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam mengatasi permasalahan kesehatan dan belum terbentuknya pemahaman akan pembangunan berwawasan kesehatan.
2. Kurangnya sinergi antara kebijakan, perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program/ kegiatan bidang kesehatan.
3. Politik anggaran belum menjadikan pembangunan sektor kesehatan sebagai isu penting hal ini dibuktikan masih rendahnya alokasi anggaran terhadap sektor kesehatan bila dibandingkan dengan tuntutan undang undang yang berlaku.
4. Satuan Kerja Dinas Kesehatan Sumatera Utara sebagai wakil pemerintah pusat di daerah belum didukung oleh pendelegasian kewenangan yang ade kuat termasuk pengalokasian anggaran terhadap pelaksanaan kewenangan Pemerintah Provinsi
5. Masih tingginya jumlah penduduk miskin dan pengangguran, rentan dan berisiko tinggi kesehatan yang memerlukan jaminan pemeliharaan kesehatan (managed care)
6. Perubahan Tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara yang mengakibatkan tingginya pencemaran udara, air dan tanah, penurunan kualitas sumber daya air, dan kerusakan ekologi.
7. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan produktifitas dan daya saing penduduk yang masih rendah
8. Perubahan iklim bumi
9. Ketimpangan dukungan akses infrastruktur pada wilayah terpencil kepulauan dan perbatasan yang menghambat mobilitas barang dan manusia

3.1.2. Faktor Internal (Kewenangan SKPD)

1. Masih tingginya angka kematian ibu dan anak, gizi buruk dan kurang terutama pada ibu hamil, anak dan remaja
2. Masih lemahnya penerapan integrasi dan koordinasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota termasuk.
3. Belum optimalnya sistem manajemen kesehatan yang meliputi manajemen administrasi kesehatan, manajemen kepegawaian dan keuangan.
4. Rendahnya standar pelayanan publik, sistem informasi kesehatan yang belum terintegrasi, serta prasarana dan sarana kantor yang belum standar
5. Pemberdayaan masyarakat dan strategi advokasi belum dijalankan secara terintegrasi dan terfokus.
6. Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan komunitas termasuk lanjut usia, pelayanan kesehatan kerja, kesehatan jiwa dan gigi dan mulut di sarana pelayanan kesehatan primer.
7. Pemanfaatan dan pengawasan kesehatan tradisional, alternatif, komplementer
8. Disparitas status kesehatan antar wilayah, status sosial dan urban-rural, wilayah pantai barat dengan wilayah pantai timur, wilayah dataran tinggi dan dataran rendah.
9. Masih tingginya Angka kesakitan dan kematian oleh karena penyakit infeksi menular baik penyakit menular yang muncul kembali (re-emerging diseases) maupun penyakit menular yang baru muncul (new emerging diseases) yang berpotensi pandemi

10. Peningkatan penyakit penyakit tidak menular yang mengakibatkan beban ganda penyakit termasuk eradikasi/eliminasi neglected tropical diseases
11. Masih rendahnya jumlah rumah sakit dan Puskesmas yang memenuhi kesiapan supply side baik sarana, alat kesehatan, obat.
12. Pemenuhan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan termasuk pengembangan insentif dan dan pengembangan kompetensi berkelanjutan
13. Masih tingginya faktor resiko lingkungan, penyediaan air bersih rumah sehat dan higiene sanitasi makanan dan minuman
14. Masih rendahnya pemenuhan ketersediaan farmasi dan obat sesuai formularium nasional, alat kesehatan dan produk makanan yang aman dan sesuai standar

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 adalah: **"Menjadi Provinsi Yang Berdayasaing Menuju Sumatera Utara Sejahtera"**. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2014 adalah sebagai berikut :

- 1) Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima (good governance and clean government).
- 2) Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi.
- 3) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional.
- 4) Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.
- 5) Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018 dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara maka Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara diarahkan dan difokuskan untuk mendukung misi kedua yaitu **"Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi."**

Tujuan dari Misi Kedua ini adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmoni dalam keberagaman, dan sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang cerdas, sehat beriman, bermoral, beretika dan berbudaya. Dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah tersebut dapat digambarkan bahwa pembangunan kesehatan harus diarahkan untuk mencapai kualitas sumber daya manusia di Provinsi Sumatera Utara. Provinsi yang berdaya saing akan ditandai dengan berbagai indikator pembangunan yaitu meningkatnya Usia harapan Hidup, Menurunnya Angka kematian Ibu dan Anak, serta menurunnya Prevalensi gizi buruk yang diharapkan indikator ini akan diatas rata-rata nasional. Disamping itu lima tahun kedepan setiap penduduk di Provinsi Sumatera Utara tidak akan mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau yang akan ditandai dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang terlindungi oleh pembiayaan kesehatan (managed care) dan meningkatnya sumber daya kesehatan yang berkualitas.

Dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara lima tahun kedepan, terdapat hambatan yang akan dihadapi untuk mencapai visi dan misi tersebut diatas yaitu :

1. Regulasi pembagian kewenangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi belum mencerminkan pelaksanaan otonomi daerah yang optimal yang berdampak terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kesehatan di daerah.
2. Belum optimalnya fungsi organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara disebabkan oleh :
 - a. Adanya pembagian Tugas pokok dan fungsi dalam struktur organisasi yang belum tertata dan terintegrasi dengan jelas
 - b. Belum diterapkannya Standar operasional prosedur dan Standar pelayanan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan UPT teknis dibawahnya dan Standar pengendalian Internal secara optimal
2. Belum terlindunginya masyarakat atas kecenderungan meningkatnya beban pembiayaan kesehatan, disamping meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.
3. Ketimpangan pendapatan perkapita (Gini Ratio) penduduk Sumatera Utara yang masih tinggi yakni sebesar 0,362 (moderat) sedang Gini Ratio Nasional 0,33.
4. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta prevalensi gizi buruk dan kurang.
5. Meningkatnya prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM)
6. Prevalensi dan Insidensi penyakit menular potensial wabah yang cenderung bersifat pandemi masih tinggi.
7. Disparitas status kesehatan antar wilayah pantai timur dan pantai barat, wilayah dataran tinggi dan dataran rendah
8. Perubahan iklim dan ancaman bencana alam.

Sedangkan faktor pendorong pembangunan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk mencapai visi dan misi tersebut lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
2. Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan BPJS Kesehatan akan berjalan mulai 1 Januari 2014
3. Adanya trend peningkatan kuantitas Sumber daya manusia kesehatan dan Peningkatan Jumlah sarana pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dan peningkatan kualitas sumber daya kesehatan
4. Adanya UPT Dinas Kesehatan Provinsi yang memungkinkan untuk dilakukan revitalisasi dan pengembangan pelayanan.
5. Meningkatnya pembiayaan untuk operasional program dan kegiatan termasuk penyediaan obat publik esensial dan prasarana pendukung kinerja
6. Meningkatnya berbagai indikator pembangunan Sumber Daya Manusia seperti menurunnya angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat yang ditandai dengan membaiknya indikator gizi buruk
7. Kecenderungan meningkatnya pendapatan negara dan daerah yang berimbas terhadap meningkatnya alokasi anggaran untuk sektor kesehatan
8. Ditetapkannya alokasi anggaran untuk bidang kesehatan diluar gaji sebesar 10% dari total APBD Provinsi dan Kabupaten Kota.
9. Partisipasi masyarakat dalam ikut serta melakukan pengawasan atas kinerja pemerintah
10. Diterapkannya prinsip Good Governance, berbagai kesepakatan dan kerjasama regional/bilateral maupun global seperti Komunitas Asean dan pasar bebas Asean (Asean free trade) tahun 2015 dan Asean Economic Community

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Amanat RPJP Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2005 – 2025 adalah mewujudkan Indonesia Sehat 2025 melalui upaya meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut maka penyelenggaraan pembangunan kesehatan diutamakan bagi penduduk rentan, yakni ibu, bayi, anak, usia lanjut dan keluarga miskin, daerah tertinggal, daerah bencana, daerah perbatasan, daerah terpencil termasuk pulau-pulau kecil dengan memperhatikan kesetaraan gender melalui peningkatan upaya pokok pembangunan kesehatan yang terdiri dari: Upaya Kesehatan; Pembiayaan Kesehatan; Sumber Daya Manusia Kesehatan; Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Manajemen dan informasi Kesehatan dan. Pemberdayaan Masyarakat. Upaya pokok tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan IPTEK, globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, dan kerjasama lintas sektor.

Di dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014 dituangkan bahwa permasalahan kesehatan di Indonesia meliputi:

- 1) AKI dan AKB yang sudah mengalami penurunan namun angka tersebut masih jauh dari target MDGs Tahun 2015.
- 2) Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar sudah meningkat namun belum merata.
- 3) Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit meningkat, namun pemerintah memiliki keterbatasan pada jumlah Bed Occupation Rate (BOR) kelas III yang dikhususkan bagi masyarakat tak mampu serta sistem rujukan yang belum berjalan dengan baik.
- 4) Terjadi penurunan angka kesakitan, namun penularan infeksi penyakit menular utama (AIDS/HIV, TBC dan Malaria) masih merupakan masalah kesehatan yang menonjol dan beberapa penyakit seperti Filariasis, Kusta dan Frambusia dan Pes cenderung meningkat kembali.
- 5) Terjadi peningkatan penyakit tidak menular terutama di daerah perkotaan.
- 6) Anggaran pembiayaan kesehatan yang alokasinya cenderung pada upaya kuratif dan kurangnya anggaran untuk biaya operasional puskesmas dan kegiatan langsung untuk puskesmas.
- 7) Jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang terus meningkat namun kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum terpenuhi, demikian juga kualitas tenaga kesehatan masih rendah.
- 8) Harga obat yang sulit dijangkau oleh masyarakat akibat salah satunya yaitu Indonesia masih mengimpor bahan baku obat.
- 9) Cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang belum optimal dan belum terintegrasi dengan sistem lainnya.
- 10) Sistem Informasi Kesehatan yang masih lemah sejak diterapkannya kebijakan desentralisasi dan keterbatasan data dalam pemetaan masalah dan penyusunan kebijakan, dan
- 11) Masyarakat masih ditempatkan sebagai objek dalam pembangunan kesehatan dan kegiatan promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku masyarakat menjadi perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas ditetapkan **Visi Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014** yaitu **"Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan."** Dalam upaya mencapai visi tersebut di atas, Kementerian Kesehatan melaksanakan peran dan fungsi yang tergambar dalam pernyataan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani.
2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan.
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan.
4. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Kesehatan adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dan sasaran strategis dalam pembangunan kesehatan, yaitu:

- 1) Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat.
- 2) Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular.
- 3) Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender, dengan menurunnya disparitas separuh dari tahun 2009.
- 4) Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin.
- 5) Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga dari 50 persen menjadi 70 persen.
- 6) Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).
- 7) Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular.
- 8) Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berikut disajikan perbandingan capaian sasaran indikator kinerja pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 dengan sasaran capaian Renstra Kemenkes RI Tahun 2010-2014.

Tabel 3.1
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2013 terhadap Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2014

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN SASARAN RENSTRA SKPD PROVSU	SASARAN RENSTRA KEMENKES
1	Persentase rumah tangga yang ber-PHBS	65%	70%
2	Persentase Desa Siaga Aktif	60,71%	35%
3	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	53,4%	100%
4	Persentase ketersediaan profil kesehatan	100%	100%
5	Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih	74,2%	90%
6	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (K4)	71,9%	95%
7	Cakupan kunjungan neonatus (KN) lengkap	80%	88%

8	Cakupan pelayanan kesehatan bayi	76%	90%
9	Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100%	100%
10	Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	36%	80%
12	Persentase bayi usia 6-59 bulan dapat kapsul vitamin A	78%	85%
13	Persentase ibu hamil mendapatkan Fe 90 tablet	64%	85%
14	Persentase puskesmas yang menerapkan standard pelayanan medik dasar	4%	90%
15	Persentase Kab/Kota yang minimal mempunyai 4 puskesmas yang telah melaksanakan upaya kesehatan kerja	33%	50%
16	Persentase RS terakreditasi	38%	90%
17	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	78,4%	90%
18	Angka kematian diare (CFR) pada saat KLB	1,56	< 1
19	Persentase desa yang mencapai UCI	74,2%	100%
20	Persentase penyelidikan epidemiologi < 24 jam pada desa/kel yang mengalami KLB	90%	100%
21	Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	66%	75%
22	Persentase cakupan TTU yang memnuhi syarat kesehatan	77%	85%
23	Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	80,7%	85%
24	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	52%	100%
25	Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan	35,61%	70%
26	Jumlah pelatihan yang terakreditasi	20 pelatihan	2.000
27	Jumlah dokumen perencanaan yg dihasilkan	3	3
28	Jumlah dokumen anggaran yang dihasilkan tepat waktu	4	4
29	Jumlah dokumen monitoring yang dihasilkan	7	9

Dari tabel terlihat bahwa pencapaian beberapa indikator terpilih dari Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013 masih dibawah sasaran Renstra Kemenkes pada tahun 2014, bahkan ada beberapa yang sangat jauh tertinggal hampir 50% dari sasaran Renstra Kemenkes seperti persentase ketersediaan vaksin, persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan, persentase RS terakreditasi, persentase puskesmas yang menerapkan standard pelayanan medik dasar, persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif dan persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLHS)

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018 kebijakan RTRWP Sumatera Utara meliputi:

- a. Menetapkan Medan sebagai Pusat Kegiatan Nasional
- b. Menetapkan Pematang Siantar, rantau Prapat, Kisaran dan Sibolga sebagai Pusat Kegiatan Wilayah
- c. Menetapkan kawasan andalan di sekitar Pusat Kegiatan Wilayah untuk pengembangan sektor unggulan
- d. Menetapkan kawasan perkotaan Medan, Binjai dan Deli Serdang sebagai Kawasan tertentu yang mempunyai nilai strategis untuk diprioritaskan pengembangannya dalam konstelasi Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT)
- e. Menetapkan Pelabuhan Belawan sebagai pelabuhan utama sekunder, pelabuhan Sibolga dan Kuala Tanjung sebagai pengumpan regional, serta Pelabuhan Gunung Sitoli dan Teluk Nibung sebagai pelabuhan pengumpan lokal
- f. Bandara Polonia di Medan diarahkan sebagai Pusat penyebaran primer

Ditetapkannya beberapa kawasan di Provinsi Sumatera Utara sebagai Pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam Program MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia) seperti Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei di Kabupaten Batubara, Pembangunan Pelabuhan Udara Kualanamu di Kabupaten Deliserdang, serta Kawasan Ekonomi terpadu Medan, Binjai, Deliserdang, Karo (Mebidangro). Perubahan Tata Ruang ini akan sangat berpengaruh dalam strategi pembangunan, perubahan pemanfaatan lahan dan sumber daya air.

Pengembangan berbagai kawasan di Provinsi Sumatera Utara akan memicu pertumbuhan ekonomi, namun di lain sisi pembangunan industri dan beberapa proyek skala nasional di daerah ini juga akan berpotensi meningkatkan pencemaran air tanah dan udara, termasuk akan meningkatkan kecelakaan kerja, perubahan perilaku dan tekanan sosial. Oleh karena itu kegiatan pengembangan dan pemanfaatan tata ruang harus didasarkan pada pemanfaatan sumber daya alam berazaskan pelestarian lingkungan hidup dan ekologi dan menjamin pembangunan berkelanjutan dan pengurangan dampak kesehatan seminimal mungkin.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan kesehatan serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW serta RPJPD 2005-2025, maka isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, dapat dikelompokkan kedalam 6 isu pokok yang wajib mendapatkan perhatian, yaitu:

1. Belum tercapainya Indeks Kesehatan yang berkualitas berdasar indikator utama yaitu Usia Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu melahirkan, dan Prevalensi Balita Kekurangan Gizi;
2. Masih belum tercapainya Rumah sakit dan Puskesmas belum memenuhi standar Sarana, Prasarana dan Alat dan Ketenagaan
3. Kualitas pelayanan di Rumah sakit, Puskesmas dan jaringannya belum optimal terutama pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, lanjut usia, kesehatan kerja, kesehatan jiwa dan gigi dan mulut
4. Perlu pengembangan dan pengawasan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer.

5. Manajemen perencanaan dan penganggaran kesehatan dan sistem informasi yang belum terintegrasi
6. Rendahnya ketersediaan obat publik dan pengawasan produksi obat dan alat kesehatan dan produk makanan
7. Berkembangnya penyakit menular baru (new emerging communicable diseases) yang cenderung bersifat pandemi, dan masih merebaknya kembali penyakit infeksi (re-emerging communicable diseases) serta ancaman bioterorisme
8. Meningkatnya penyakit tidak menular, kecelakaan kerja, dan serta meningkatnya gangguan jiwa masyarakat, dan rendahnya perilaku/gaya hidup yang mendukung untuk hidup sehat.
9. Rendahnya jumlah rumah tangga yang mampu mengakses rumah sehat, air bersih dan makanan minuman yang higienis
10. Strategi Pemberdayaan dan promosi kesehatan yang belum optimal

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 3 menyatakan bahwa Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan upaya Pembangunan Kesehatan sebagai upaya untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 dan Visi Kementerian Kesehatan yaitu Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan maka SKPD Dinas Kesehatan provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Visi dan Misi.

4.1. Visi dan Misi SKPD

Dengan mempertimbangkan hasil kajian atas Visi Gubernur Sumatera Utara, dan sasaran pembangunan kesehatan yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, maka ditetapkan Visi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang akan menjadi gambaran kondisi pembangunan kesehatan yang ingin di capai lima tahun kedepan adalah sebagai berikut: **Mewujudkan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara Sehat, Mandiri dan Berdaya Saing.**

1. Masyarakat sehat adalah suatu kondisi dimana Penduduk Sumatera Utara sehat baik fisik, mental dan spritual sehingga mampu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis
2. Masyarakat mandiri, yaitu suatu kondisi dimana masyarakat mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk untuk mempertahankan kualitas kesehatannya.
3. Masyarakat berdaya saing, yaitu suatu kondisi dimana status kesehatan masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang tinggi dan berada diatas capaian nasional.

Dalam rangka **Mewujudkan Masyarakat Provinsi Sumatera sehat, mandiri dan berdaya saing** maka ditetapkan bebarapa Misi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

1. Menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan bermutu, merata dan terjangkau
2. Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan masalah kesehatan
3. Meningkatkan mutu sumberdaya kesehatan
4. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.2.1. Tujuan Jangka menengah pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

1. Tujuan misi Menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau adalah :
 - a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu
 - b. Meningkatkan akses dan kualits pelayanan kesehatan dasar
 - c. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif bagi ibu maternal, bayi, balita, anak sekolah dan remaja, usia produktif dan usia lanjut
 - d. Mengembangkan mutu manajemen pelayanan kesehatan dan kebijakan pembangunan kesehatan
 - e. Meningkatkan pelayanan penelitian untuk intervensi program kesehatan masyarakat.

2. Tujuan misi meningkatkan pengendalian dan penanggulangan masalah kesehatan adalah :
 - a. Menurunkan angka kesakitan dan kematian penduduk oleh karena penyakit menular
 - b. dan dampak bencana dan wabah
 - c. Menurunkan angka kesakitan dan kematian oleh karena penyakit tidak menular pada kelompok resiko
 - d. Mewujudkan lingkungan yang sehat
3. Tujuan misi Meningkatkan mutu sumber daya kesehatan adalah :
 - a. Meningkatkan kompetensi dan persebaran tenaga kesehatan
 - b. Meningkatkan ketersediaan produk sediaan farmasi dan peralatan kesehatan sesuai standar
 - c. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengobatan tradisional, alternatif dan komplementer dan kesehatan komunitas
4. Tujuan misi Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan adalah;
 - a. Memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat
 - b. Meningkatkan kualitas gizi keluarga dan masyarakat
 - c. Meningkatkan jumlah masyarakat yang terlindungi dengan sistem pembiayaan managed care. (Asuransi sosial)

4.2.2. Sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

1. Sasaran Tujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu
 - 1.1. Meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas pelayanan medik dan penunjang medik pada Rumah Sakit
 - 1.2. Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit, rumah sakit khusus, dan laboratorium kesehatan
2. Sasaran Tujuan Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar
 - 2.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau
 - 2.2.
3. Sasaran Tujuan Meningkatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi ibu maternal, bayi, balita, anak sekolah dan remaja, usia produktif dan usia lanjut adalah:
 - 3.1. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan terhadap ibu, bayi, balita serta pelayanan kesehatan yang responsive gender
 - 3.2. Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan terhadap usia produktif dan lanjut usia
4. Sasaran Tujuan Mengembangkan mutu manajemen pelayanan kesehatan dan kebijakan pembangunan kesehatan adalah:
 - 4.1. Mengembangkan sistem informasi kesehatan, akuntabilitas publik dan hukum kesehatan
 - 4.2. Mengembangkan sistem pengendalian internal dan manajemen pengelolaan aset serta penanganan laporan hasil pemeriksaan
 - 4.3. Pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis fakta yang akuntabel, efisien dan efektif
5. Sasaran tujuan Meningkatkan pelayanan penelitian untuk intervensi program kesehatan
 - 5.1. Penelitian berorientasi intervensi kesehatan individu
 - 5.2. Penelitian kesehatan yang berorientasi intervensi kesehatan kelompok dan masyarakat
6. Sasaran tujuan Menurunkan angka kesakitan dan kematian penduduk oleh karena penyakit menular dan bencana adalah :

- 6.1. Meningkatnya pengendalian kesakitan dan kematian penyakit menular
- 6.2. Peningkatan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa penyakit menular
- 6.3. Penanggulangan dan pencegahan wabah termasuk kesiapsiagaan pencegahan penyakit potensial wabah pandemi dan bencana
7. Sasaran Tujuan menurunkan angka kesakitan penyakit tidak menular pada kelompok resiko adalah
 - 7.1. Meningkatnya pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular, degeneratif dan penyakit terkait gaya hidup pada kelompok beresiko
8. Sasaran tujuan Mewujudkan lingkungan yang sehat adalah :
 - 8.1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih, sanitasi dasar, makanan minuman yang higienis dan perumahan sehat
 - 8.2. Meningkatnya pengendalian faktor resiko kesehatan lingkungan, higiene sanitasi pengolahan makanan dan minuman industri rumah tangga
9. Sasaran tujuan Meningkatkan jumlah, jenis dan persebaran tenaga kesehatan sesuai standar
 - 9.1. Meningkatnya ketersediaan tenaga kesehatan terstandarisasi, tersertifikasi dan pendidikan berkelanjutan
 - 9.2. Pemerataan tenaga kesehatan strategis sesuai kebutuhan di pelayanan dasar maupun rujukan
 - 9.3. Meningkatkan standarisasi penyelenggaraan pelatihan kesehatan dan pelatihan kesehatan masyarakat
10. Sasaran tujuan Ketersediaan produk sediaan farmasi dan peralatan kesehatan sesuai standar adalah:
 - 10.1. Meningkatnya ketersediaan obat dan vaksin di sarana pelayanan kesehatan
 - 10.2. Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap obat, alat kesehatan dan produk pangan yang tidak sesuai standar
11. Sasaran tujuan Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengobatan tradisional, alternatif dan komplementer dan kesehatan komunitas
 - 7.1. Meningkatnya pembinaan pengobatan tradisional, alternatif dan komplementer
 - 7.2. Meningkatnya pembinaan dan pelayanan kesehatan kerja, oleh raga, jiwa, dan lanjut usia
12. Sasaran tujuan Memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat,
 - 12.1. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan sehat
 - 12.2. Meningkatkan Upaya kesehatan berbasis masyarakat dan peningkatan peranserta masyarakat melalui kemitraan dengan swasta
13. Sasaran Tujuan Meningkatkan kualitas gizi keluarga dan masyarakat
 - 13.1. Meningkatnya upaya penanggulangan kasus gizi buruk dan gizi kurang
 - 13.2. Meningkatkan Intervensi kasus gizi buruk melalui penyediaan makanan tambahan (Meningkatkan intervensi gizi buruk untuk masyarakat)
14. Sasaran tujuan Meningkatkan jumlah penduduk yang terlindungi dengan sistem pembiayaan managed care (kendali mutu dan kendali biaya)
 - 14.1. Meningkatnya pembiayaan dan kualitas jaminan pemeliharaan kepada masyarakat

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD 2013-2018

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada tahun Ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan ketersediaan produk sediaan farmasi dan peralatan kesehatan sesuai standar	1. Meningkatnya ketersediaan obat dan vaksin di sarana pelayanan kesehatan 2. Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap obat, alat kesehatan dan produk pangan pangan yang tidak sesuai standar	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	90%	91%	92%	93%	94%
			Jumlah RSU dan Puskesmas yg melaksanakan pelayanan Kefarmasian sesuai standar.	20 RSU & 30 Pusk	12 RSU & 6 Pusk	14 RSU & 12 Pusk	16 RSU & 18 Pusk	18 RSU & 24 Pusk
2	Meningkatkan Pelayanan kesehatan komprehensif bagi ibu maternal, bayi, balita, anak sekolah dan remaja, usia produktif dan usia lanjut.	1. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan terhadap ibu, bayi, balita serta pelayanan kesehatan yang responsive gender 2. Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan terhadap usia produktif dan usia lanjut	Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan.	86%	87%	88%	89%	90%
			Angka Kematian Bayi	21 per 1.000 kelahiran hidup	20,5 per 1.000 kelahiran hidup	20 per 1.000 kelahiran hidup	19,5 per 1.000 kelahiran hidup	19 per 1.000 kelahiran hidup
			Angka Kematian Ibu (AKI)	263 per 100.000 kelahiran hidup	258 per 100.000 kelahiran hidup	250 per 100.000 kelahiran hidup	242 per 100.000 kelahiran hidup	235 per 100.000 kelahiran hidup
			Umur Harapan Hidup	71,7 thn	71,8 thn	71,9 thn	71,10 thn	72 thn
			Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut.	62%	64%	66%	68%	70%
3	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar	1. Meningkatnya jumlah pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau	Jumlah puskesmas yang menerapkan pelayanan kesehatan dasar sesuai standard	33 Pusk	66 Pusk	99 Pusk	132 Pusk	479 Pusk
4	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengobatan tradisional, alternatif dan komplementer dan kesehatan komunitas	2. Meningkatnya pembinaan pengobatan tradisional, alternatif dan komplementer 3. Meningkatnya pembinaan dan pelayanan kesehatan kerja, oleh raga, jiwa, dan lanjut usia						
5	Memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat,	Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan sehat	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat.	55%	57%	59%	61%	65%
		Meningkatnya Upaya kesehatan berbasis masyarakat dan peningkatan peranserta masyarakat melalui kemitraan	Persentase desa siaga aktif.	22%	25%	30%	35%	40%

		dengan swasta						
6	Meningkatkan kualitas gizi keluarga dan masyarakat	Meningkatnya upaya penanggulangan kasus gizi buruk dan gizi kurang	Persentase gizi buruk yang ditangani.	100%	100%	100%	100%	100%
			Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk dan Kurang	22%	21,5%	21%	20,5%	20%
		Meningkatnya Intervensi kasus gizi buruk melalui penyediaan makanan tambahan	Persentase ibu hamil KEK dan anemia mendapatkan PMT	40%	45%	48%	50%	55%
7	Mewujudkan lingkungan yang sehat	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih, sanitasi dasar, dan perumahan sehat	Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan	72%	73%	74%	75%	78%
		Meningkatnya pengendalian faktor resiko kesehatan lingkungan, higiene sanitasi pengolahan makanan dan minuman industri rumah tangga		75%	77%	78%	79%	80%
8	Menurunkan angka kesakitan dan kematian penduduk oleh karena penyakit menular dan dampak bencana dan wabah	Meningkatnya pengendalian kesakitan dan kematian penyakit menular	Persentase desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI).	80%	85%	90%	95%	100%
		Peningkatan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa penyakit menular	Persentase Penyelidikan Epidemiologi dan penanggulangan an KLB < 24 jam pada desa/kel yang terjadi KLB	100%	100%	100%	100%	100%
		Penanggulangan dan pencegahan wabah termasuk kesiapsiagaan pencegahan penyakit potensial wabah pandemi dan bencana	Persentase kab/kota yang melakukan penanganan dan penanggulangan wabah dan bencana	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K
9	Menurunkan angka kesakitan dan kematian oleh karena penyakit tidak menular pada kelompok resiko	Peningkatan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular, degeneratif dan penyakit terkait gaya hidup pada kelompok beresiko	Persentase kab/kota yg melaksanakan Surveilans Deteksi Dini & KIE Peny Tdk Menular	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K
10	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan rujukan yang bermutu	Meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas pelayanan medik dan penunjang medik pada Rumah Sakit	Jumlah rumah sakit yang terakreditasi	78 RS	82 RS	86 RS	90 RS	94 RS
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit, rumah sakit khusus, dan balai kesehatan, dan laboratorium kesehatan						
11	Meningkatkan kompetensi dan persebaran tenaga kesehatan	Meningkatnya ketersediaan tenaga kesehatan terstandarisasi, tersertifikasi dan pendidikan berkelanjutan	Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	90%	95%	95%	95%	95%
		Meningkatnya standarisasi penyelenggaraan pelatihan kesehatan dan pelatihan	Jumlah pelatihan kesehatan	20 pelatihan	25 pelatihan	30 pelatihan	35 pelatihan	40 pelatihan

		kesehatan masyarakat	aparatur dan non aparatur yang diakreditasi					
		Pemerataan tenaga kesehatan strategis sesuai kebutuhan di pelayanan dasar maupun rujukan	Ratio tenaga medis per puskesmas	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1
12	Meningkatkan jumlah penduduk yang terlindungi dengan sistem pembiayaan managed care (kendali mutu dan kendali biaya)	Meningkatnya pembiayaan dan kualitas jaminan pemeliharaan kepada masyarakat	Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan	60%	70%	82%	90%	95%
13	Mengembangkan mutu manajemen pelayanan kesehatan dan kebijakan pembangunan kesehatan	Pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis fakta yang akuntabel efisien dan transparan	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran dan kesehatan yang dihasilkan per tahun	5 dok/thn	5 dok/thn	5 dok/thn	5 dok/thn	5 dok/thn
		Mengembangkan sistem pengendalian internal dan manajemen pengelolaan aset serta penanganan laporan hasil pemeriksaan	Jumlah dokumen monitoring, pengendalian dan evaluasi yang dihasilkan per tahun	7 dok/thn	7 dok/thn	7 dok/thn	7 dok/thn	7 dok/thn
		Mengembangkan sistem informasi kesehatan, akuntabilitas publik dan hukum kesehatan	Persentase Kab/Kota memiliki Profil Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
14	Meningkatkan pelayanan penelitian untuk intervensi program kesehatan	Penelitian berorientasi intervensi kesehatan individu Penelitian kesehatan yang berorientasi intervensi kesehatan kelompok dan masyarakat	Jumlah penelitian dan pengembangan kesehatan yang dilaksanakan	3 penelitian	6 penelitian	9 penelitian	12 penelitian.	15 penelitian

Tabel 4.2.
Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara Sehat, Mandiri dan Berdaya Saing.			
Misi 1 : Menjamin mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan rujukan yang bermutu	1. Meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas pelayanan medik dan penunjang medik pada Rumah Sakit 2. Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit, rumah sakit khusus, dan balai kesehatan, dan laboratorium kesehatan	1. Pengaturan Regionalisasi Rujukan medik dan rujukan kesehatan serta revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan 2. Pemenuhan alat kesehatan yang bermutu di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	1. Fasilitasi Penyediaan rujukan yang terstandarisasi yang didukung dengan ketersediaan sumber daya kesehatan yang kompeten, obat dan teknologi yang ade kuat. 2. Peningkatan fasilitasi dan fokus pelayanan pada Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) dan DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) 3. Penataan pelayanan rujukan medis dan penunjang, standarisasi pelayanan kesehatan rujukan.

2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar	1. Meningkatnya jumlah pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau	1. Penyediaan fasilitas terstandar dengan fokus pada daerah terpencil dan daerah bermasalah kesehatan	1. Fokus penyediaan pelayanan kesehatan dasar terstandar berdasarkan disparitas wilayah, gender dan ketertinggalan sumber daya kesehatan
3. Pelayanan kesehatan komprehensif bagi ibu maternal, bayi, balita, anak sekolah dan remaja, usia produktif dan usia lanjut.	1. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan terhadap ibu, bayi, balita serta pelayanan kesehatan yang responsive gender 2. Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan terhadap usia produktif dan usia lanjut	1. Mengembangkan upaya dan fasilitas pelayanan kesehatan yang komprehensif untuk pencegahan kematian ibu dan anak 2. Mengembangkan upaya dan fasilitas pelayanan kesehatan usia produktif dan lanjut usia	1. Pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi dan Keluarga berencana dipelayanan kesehatan dasar maupun rujukan 2. Peningkatan upaya kesehatan kerja, pencegahan kecelakaan kerja dan lanjut usia
4. Mengembangkan mutu manajemen pelayanan kesehatan dan kebijakan pembangunan kesehatan	1. Mengembangkan sistem informasi kesehatan, akuntabilitas publik dan hukum kesehatan 2. Mengembangkan sistem pengendalian internal dan manajemen pengelolaan aset serta penanganan laporan hasil pemeriksaan 3. Pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis fakta yang akuntabel efisien dan transparan	1. Penyusunan dan penganggaran yang menjamin pembangunan kesehatan berbasis wilayah, berbasis kinerja, pencapaian manfaat terbesar (allocate efficiency), efektifitas pendanaan (cost efficiency) 2. Pengelolaan dan penyediaan data dan informasi kesehatan yang akurat dan terintegrasi 3. Mengembangkan regulasi kesehatan daerah	1. Meningkatkan manajemen perencanaan dan penganggaran melalui sinkronisasi anggaran, perencanaan berbasis fakta, fasilitasi penelitian dan pengembangan kesehatan, penerapan sistem pengendalian internal, penerapan dan pengembangan standar operasional, standar pelayanan, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, pengelolaan barang negara. 2. Meningkatkan kualitas data dan informasi kesehatan dan penyediaan data dan informasi publik secara berkala 3. Penyusunan dan kajian kelembagaan Dinas Kesehatan dan UPTD 4. Penyusunan regulasi untuk mendukung kebijakan daerah terkait bidang kesehatan
5. Meningkatkan pelayanan penelitian untuk intervensi program kesehatan	1. Penelitian berorientasi intervensi kesehatan individu 2. Penelitian kesehatan yang berorientasi intervensi kesehatan kelompok dan masyarakat	1. Melaksanakan kemitraan penelitian dan survey dengan lembaga perguruan tinggi, dan UPTD	1. Fokus penelitian pada survey untuk kepentingan kebijakan dan evaluasi program kesehatan

Misi 2 : Meningkatkan pencegahan penyakit dan pengendalian masalah kesehatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Menurunkan angka kesakitan dan kematian penduduk oleh karena penyakit menular dan dampak bencana dan wabah	1. Meningkatnya pengendalian kesakitan dan kematian penyakit menular 2. Peningkatan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa penyakit menular, 3. Penanggulangan dan pencegahan wabah termasuk kesiapsiagaan pencegahan penyakit potensial wabah pandemi dan bencana	1. Meningkatkan sistem pengendalian dan pemberantasan penyakit melalui kegiatan surveilans 2. Meningkatkan dan pemenuhan kebutuhan penanganan bencana, pasca bencana dan wabah	1. Meningkatkan pengendalian penyakit menular terutama penyakit menular re-emerging, new emerging yang berpotensi pandemi 2. Meningkatkan surveilans penyakit menular melalui peningkatan deteksi dini penyakit, respons cepat terhadap wabah dan bencana
2. Menurunkan angka kesakitan	1. Peningkatan pengendalian faktor	1. Peningkatan pengendalian penyakit tidak menular pada	1. Meningkatkan pengendalian penyakit tidak menular melalui

dan kematian oleh karena penyakit tidak menular pada kelompok resiko	resiko penyakit tidak menular, degeneratif dan penyakit terkait gaya hidup pada kelompok beresiko	kelompok resiko	deteksi dini, penyediaan sarana dan fasilitas perawatan, dan peningkatan KIE penyakit tidak menular 2. Meningkatkan KIE kesehatan matra
3. Mewujudkan lingkungan yang sehat	1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih, sanitasi dasar, dan perumahan sehat 2. Meningkatkan pengendalian faktor resiko kesehatan lingkungan, higiene sanitasi pengolahan makanan dan minuman industri rumah tangga	1. Meningkatkan pemeriksaan dan penyediaan sanitasi dasar serta advokasi pembangunan berwawasan kesehatan 2. Peningkatan higiene sanitasi makanan dan minuman	1. Meningkatkan upaya dan fasilitasi penyehatan lingkungan melalui pembinaan dan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan, higiene dan sanitasi makanan dan minuman 2. Peningkatan upaya pembangunan berwawasan kesehatan dan sanitasi total berbasis masyarakat

Misi 3 : Meningkatkan mutu sumberdaya kesehatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan kompetensi dan persebaran tenaga kesehatan	1. Meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan terstandarisasi, tersertifikasi dan pendidikan berkelanjutan 2. Pemerataan tenaga kesehatan strategis sesuai kebutuhan di pelayanan dasar maupun rujukan 3. Meningkatkan standarisasi penyelenggaraan pelatihan kesehatan dan pelatihan kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan jumlah dan kualitas kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan 2. Optimalisasi kemitraan tenaga kesehatan	1. Meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan primer dan sekunder kesehatan pada daerah sulit dan daerah bermasalah kesehatan 2. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan, sertifikasi dan registrasi tenaga kesehatan
2. Meningkatkan ketersediaan produk sediaan farmasi dan peralatan kesehatan sesuai standar	2. Meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin di sarana pelayanan kesehatan 3. Meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap obat, alat kesehatan dan produk pangan pangan yang tidak sesuai standar	1. Pembinaan dan pengawasan penggunaan obat generik, alat kesehatan dan produk pangan 2. Peningkatan pemerataan keterjangkauan dan jaminan mutu obat, obat tradisional dan alat kesehatan	1. Meningkatkan pembinaan penggunaan obat generik, alat kesehatan dan produk pangan yang aman 2. Meningkatkan mutu fasilitas pelayanan kesehatan melalui ketersediaan obat dan vaksin, pelayanan kefarmasian yang bermutu 3. Pengawasan terhadap produksi dan distribusi sediaan farmasi
3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengobatan tradisional, alternatif dan komplementer dan kesehatan komunitas	1. Meningkatkan pembinaan pengobatan tradisional, alternatif dan komplementer 2. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan kesehatan kerja, olah raga, jiwa, dan lanjut usia	a. Standarisasi dan sertifikasi pengobatan alternatif, tradisional dan komplementer b. Penyediaan pelayanan kesehatan kerja, olah raga, jiwa dan lanjut usia di sarana pelayanan kesehatan dasar	1. Menjamin ketersediaan pengobatan alternatif, tradisional, dan komplementer yang aman 2. Menjamin akses pelayanan kesehatan kerja, olah raga, jiwa dan lanjut usia

Misi 4 : Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
--------	---------	----------	-----------

1. Memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat,	1. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan sehat 2. Meningkatnya Upaya kesehatan berbasis masyarakat dan peningkatan peranserta masyarakat melalui kemitraan dengan swasta	1. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat pada setiap tatanan 2. Mengembangkan program kesehatan berbasis masyarakat, pengembangan media promosi dan kemitraan	1. Meningkatkan peranserta masyarakat melalui peningkatan Usaha kesehatan berbasis masyarakat 2. Meningkatkan upaya promosi kesehatan melalui kerjasama/kemitraan, kelembagaan. 3. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat melalui fasilitasi dan advokasi desa sehat.
2. Meningkatkan kualitas gizi keluarga dan masyarakat	1. Meningkatnya upaya penanggulangan kasus gizi buruk dan gizi kurang 2. Meningkatnya Intervensi kasus gizi buruk melalui penyediaan makanan tambahan	1. Meningkatkan upaya peningkatan pelayanan kasus gizi buruk di fasilitas pelayanan kesehatan 2. Peningkatan penyediaan suplemen makanan, diversifikasi makanan dan peningkatan keluarga sadar gizi	1. Meningkatkan penanganan kasus gizi buruk dan kurang terutama ibu dan bayi melalui penyediaan makanan tambahan, pendampingan kasus, pemantauan/surveilans status gizi 2. Penanganan kasus gizi disarakan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui peningkatan kompetensi sumberdaya kesehatan yang sesuai standar
3. Meningkatkan jumlah penduduk yang terlindungi dengan sistem pembiayaan managed care (kendali mutu dan kendali biaya)	1. Meningkatnya pembiayaan dan kualitas jaminan pemeliharaan kepada masyarakat	1. Menjamin pemeliharaan kesehatan dalam rangka kendali mutu dan kendali biaya	1. Perluasan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat untuk mencapai universal coverage.

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

4.3.1. Strategi

1. Pilihan Strategi untuk mencapai Misi Menjamin mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan
 - 1.1. Penyediaan fasilitas kesehatan di daerah terpencil dan daerah bermasalah kesehatan
 - 1.2. Pengaturan Regionalisasi Rujukan medik dan rujukan kesehatan serta revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
 - 1.3. Pemenuhan alat kesehatan yang bermutu di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar
 - 1.4. Mengembangkan upaya dan fasilitas pelayanan kesehatan yang komprehensif untuk pencegahan kematian ibu dan anak
 - 1.5. Mengembangkan upaya dan fasilitas pelayanan kesehatan usia produktif dan usia lanjut
 - 1.6. Perencanaan dan penganggaran yang menjamin pembangunan kesehatan berbasis wilayah, kinerja pencapaian manfaat terbesar dan efektifitas pendanaan
 - 1.7. Pengelolaan dan penyediaan data dan informasi kesehatan yang akurat dan terintegrasi
 - 1.8. Mengembangkan regulasi kesehatan daerah
 - 1.9. Melaksanakan kemitraan penelitian dan survey dengan lembaga perguruan tinggi, dan UPTD
2. Pilihan Strategi untuk mencapai Misi Meningkatkan pencegahan penyakit dan pengendalian masalah kesehatan
 - 2.1. Meningkatkan sistem pengendalian dan pemberantasan penyakit
 - 2.2. Meningkatkan dan pemenuhan penanganan bencana dan wabah
 - 2.3. Peningkatan pengendalian penyakit tidak menular pada kelompok resiko
 - 2.4. Meningkatkan pemeriksaan dan penyediaan sanitasi dasar serta advokasi pembangunan berwawasan kesehatan
 - 2.5. Peningkatan higiene sanitasi makanan minuman

3. Pilihan Strategi untuk mencapai Misi Meningkatkan mutu sumberdaya kesehatan
 - 3.1. Meningkatkan jumlah dan kualitas kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan
 - 3.2. Optimalisasi kemitraan tenaga kesehatan pemerintah dengan swasta
 - 3.3. Pembinaan dan pengawasan penggunaan obat generik, alat kesehatan dan produk pangan
 - 3.4. Peningkatan pemerataan keterjangkauan dan jaminan mutu obat, obat tradisional dan alat kesehatan
 - 3.5. Standarisasi dan sertifikasi pengobat alternatif, tradisional dan komplementer
 - 3.6. Penyediaan pelayanan kesehatan kerja, oleh raga, jiwa dan lanjut usia di sarana pelayanan kesehatan dasar
4. Pilihan Strategi untuk mencapai Misi Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan
 - 4.1. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat pada setiap tatanan
 - 4.2. Mengembangkan program kesehatan berbasis masyarakat dan kemitraan
 - 4.3. Meningkatkan upaya peningkatan pelayanan kasus gizi buruk difasilitasi pelayanan kesehatan
 - 4.4. Peningkatan penyediaan suplemen makanan, diversifikasi makanan dan peningkatan keluarga sadar gizi
 - 4.5. Menjamin pemeliharaan kesehatan dalam rangka kendali mutu dan kendali biaya

4.5.1. Kebijakan

1. Fasilitasi penyediaan rujukan yang terstandarisi yang didukung ketersediaan sumber daya kesehatan yang kompeten, obat dan teknologi yang adekuat
2. Peningkatan fasilitasi dan fokus pelayanan pada daerah bermasalah Kesehatan dan daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan
3. Penataan rujukan medis dan penunjang medis standarisasi pelayanan rujukan
4. Fokus penyediaan pelayanan kesehatan dasar terstandar berdasarkan disparitas wilayah, gender dan ketertinggalan sumber daya kesehatan
5. Pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi dan KB dipelayanan kesehatan dasar
6. Peningkatan upaya kesehatan kerja, pencegahan kecelakaan kerja dan lanjut usia
7. Meningkatkan kualitas data dan informasi kesehatan dan penyediaan data dan informasi publik secara berkala
8. Peningkatan dan kajian kelembagaan Dinas kesehatan beserta Unit pelaksana teknis
9. Meningkatkan pengendalian penyakit menular terutama penyakit menular re-emerging, new emerging yang berpotensi pandemi
10. Meningkatkan surveilans penyakit menular melalui peningkatan deteksi dini penyakit, respons cepat terhadap wabah dan bencana Meningkatkan pengendalian penyakit tidak menular melalui deteksi dini, penyediaan sarana dan fasilitas perawatan, dan peningkatan KIE penyakit tidak menular dan KIE kesehatan matra
11. Meningkatkan upaya dan fasilitasi penyehatan lingkungan melalui pembinaan dan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan, higiene dan sanitasi makanan dan minuman, upaya pembangunan berwawasan kesehatan dan sanitasi total berbasis masyarakat
12. Meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan primer dan sekunder kesehatan pada daerah sulit dan daerah bermasalah kesehatan

13. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan, sertifikasi dan registrasi tenaga kesehatan
14. Meningkatkan mutu fasilitas pelayanan kesehatan melalui ketersediaan obat dan vaksin, pelayanan kefarmasian yang bermutu, penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan dan Pengawasan terhadap produksi dan distribusi sediaan farmasi
15. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengobatan tradisional dan komplementer yang bermutu
16. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengolah makanan dan minuman industri rumah tangga
17. Meningkatkan upaya promosi kesehatan melalui kerjasama/kemitraan, kelembagaan, perilaku hidup bersih dan sehat melalui fasilitasi dan advokasi desa sehat, dan peningkatan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat
18. Meningkatkan penanganan kasus gizi buruk dan kurang melalui penyediaan makanan tambahan, pendampingan kasus, pemantauan/surveilans status gizi
19. Perluasan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat untuk mencapai universal coverage.
20. Fokus penelitian pada survey untuk kepentingan kebijakan dan evaluasi program kesehatan

Dalam RPJMD 2013-2018 dicantumkan arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

1. Menyediakan sarana dan prasarana kesehatan dan jaminan kesehatan hingga ke pelosok kabupaten/kota
2. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan
3. Menyelenggarakan sistem pelayanan kesehatan dan sistem jaminan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan

Arah Kebijakan pembangunan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara akan dilakukan secara bertahap dan terukur sebagai berikut:

3. Arah Kebijakan Tahun Pertama (Tahun 2014)

Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penyediaan sumber daya pelayanan kesehatan yang terjangkau teruma pada Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) dan Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan.

2. Arah Kebijakan Tahun Kedua (Tahun 2015)

Penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau terus dilaksanakan dengan penyempurnaan dan perbaikan terhadap sistem dan mekanisme pelayanan kesehatan, peningkatan kompetensi petugas sumber daya manusia kesehatan pada pelayanan kesehatan primer dan rujukan. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang professional dan kredibel serta penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan peningkatan kemitraan, pembangunan responsif gender.

3. Arah Kebijakan Tahun Ketiga (Tahun 2016)

Kebijakan pembangunan kesehatan menekankan pada orientasi kepuasan konsumen kesehatan melalui penerapan standarisasi kualitas pelayanan kesehatan baik pelayanan kesehatan primer maupun rujukan.

4. Arah Kebijakan Tahun Keempat (Tahun 2017)

Pemantapan capaian pembangunan kesehatan tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya pelayanan kesehatan dan peningkatan fasilitasi dan penguatan pelayanan kesehatan di Kabupaten/Kota.

5. Arah Kebijakan Tahun Kelima (Tahun 2018)

Memastikan adanya perubahan pola pelayanan dan pencapaian sasaran pembangunan kesehatan jangka menengah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi Sumatera Utara 2013-2018 yang difokuskan program kegiatan yang masih perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama 4 tahun terakhir yang dapat digunakan untuk perencanaan jangka menengah lima tahun kedepan.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD 2013-2018 menurut urusan pemerintahan terdiri atas 15 (lima belas) program, yaitu sebagai berikut :

5.1. Program pelayanan administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- d. Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja
- e. Penyediaan alat tulis kantor
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- g. Penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
- k. Penyediaan jasa pengamanan

5.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- c. Pengadaan peralatan gedung kantor
- d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

5.3. Program peningkatan disiplin aparatur

- a. Pengadaan pakaian PDH Staf Dinas Kesehatan provinsi Sumatera Utara

5.4. Program Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur

- a. Pendidikan dan pelatihan formal termasuk Kepaniteraan Klinik Senior

5.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. Penyusunan laporan keuangan semesteran

5.6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1. Tujuan

Program ini bertujuan menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan minuman serta produk komplemen.

2. Indikator outcome

- a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin menjadi 94%.
- b. Jumlah RSU dan puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standard menjadi 20 RSU dan 30 Puskesmas.

- c. Persentase penggunaan obat rasional (POR) di sarana pelayanan kesehatan dasar menjadi 44%.
- d. Persentase sarana sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan GMP (Good Manufacturing Practise) dan GDP (Good Distribution Practise) menjadi 70%.
- e. Persentase IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) yang bersertifikat menjadi 35%.
- f. Persentase sarana produk alat kesehatan dan PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) yang memenuhi persyaratan GMP (Good Manufacturing Practise) dan GDP (Good Distribution Practise) menjadi 70%.

3. Kegiatan program ini meliputi:

- 1 Pengadaan obat buffer stock Provinsi dan VAR (Vaksin Anti Rabies)
- 2 Pertemuan pengelolaan dan evaluasi obat, vaksin dan perbekalan kesehatan
- 3 Operasional Pengelolaan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- 4 Pertemuan e-logistik bagi petugas kab/kota
- 5 Pertemuan pemutakhiran data kefarmasian dan alat kesehatan tingkat provinsi
- 6 Pertemuan Perencanaan terpadu obat dan perbekalan kesehatan
- 7 Pertemuan/Sosialisasi Software Penggunaan Obat Rasional di Sarana Pelayanan Kesehatan
- 8 Sosialisasi /Pertemuan Penggunaan Obat Generik di Sarana Pelayanan Kesehatan
- 9 Pertemuan Penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan dasar
- 10 Pertemuan Penggunaan Antibiotik bagi tenaga kesehatan
- 11 Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Sediaan Farmasi
- 12 Pertemuan dalam Rangka CPOTB
- 13 Biaya Operasional Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)
- 14 Peningkatan sarana dan prasarana Pusat Pasca Panen Tanaman Obat
- 15 Review Penerapan Sistem Pelaporan Narkotika, Psikotropika
- 16 Pertemuan dan evaluasi system pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor tingkat provinsi
- 17 Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program Dalam Rangka Penggunaan P4TO
- 18 Pertemuan dalam rangka CDOB (Cara Distribusi Obat yang baik)
- 19 Pemetaan Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan farmasi
- 20 Pembinaan petugas pengelola pasca panen tanaman obat
- 21 Pertemuan dalam rangka CPKB (Cara Produksi Kosmetika yang Baik)
- 22 Pelatihan Tenaga penyuluh Keamanan pangan (PKP)
- 23 Pembinaan makanan jajanan anak sekolah
- 24 Pertemuan Petugas Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) dan guru tentang Makanan Jajanan Anak Sekolah
- 25 Sosialisasi Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS) di kab/kota
- 26 Pembinaan ke Sarana Industri Rumah tangga Pangan (IRTP)
- 27 Pembinaan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan ke sarana Industri Rumah tangga Pangan (IRTP)
- 28 Pertemuan dalam rangka CPPB-IRT (Cara Produksi Pangan Yang Baik Industri Rumah Tangga)
- 29 Pembinaan Cara Produksi Pangan yang baik-Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) ke sarana Industri Rumah Tangga pangan (IRTP)
- 30 Pertemuan tentang CPAKB (Cara Produksi Alat Kesehatan yang Baik) dan CPPKRTB (Cara Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik)

- 31 Sosialisasi Cara Distribusi Alat Kesehatan yang baik
- 32 Pertemuan Lintas sektor dalam rangka Peningkatan Produksi alat kesehatan dalam negeri
- 33 Pilot Project Pelayanan Kefarmasian di RSUD
- 34 Peningkatan Instalasi farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara TA 2014
- 35 Pertemuan Pilot Project Pelayanan Kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan dasar Kabupaten/Kota
- 36 Pertemuan pilot Project Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Rawat Inap
- 37 Pertemuan pemutakhiran data Rumah Sakit Umum yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standard
- 38 Pertemuan tenaga kefarmasian untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian sesuai standard
- 39 Pertemuan advokasi pelayanan kefarmasian di Kabupaten/Kota

5.7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Tujuan

Program ini bertujuan meningkatkan pemerataan, kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dan jaringannya meliputi Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Bidan di Desa.

2. Indikator outcome

- a. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menjadi 90%.
- b. Cakupan antenatal care (K4) menjadi 94%, Lengkap menjadi 90% dan cakupan kunjungan bayi menjadi 80%.
- c. Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani menjadi 79%.
- d. Cakupan pelayanan ibu nifas menjadi 90%.
- e. Jumlah Puskesmas Rawat Inap yg mampu PONED menjadi 152 Puskesmas.
- f. Cakupan kunjungan neonatus (KN) 90%.
- g. Cakupan kunjungan bayi menjadi 92%
- h. Cakupan Pelayanan anak balita menjadi 89%
- i. Cakupan penjangkauan siswa SD dan setingkat menjadi 89%.
- j. Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi terhadap wanita dan remaja menjadi 181 Puskesmas.
- k. Jumlah puskesmas santun usila yang terbentuk di Kab/Kota menjadi 90 Puskesmas.
- l. Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut menjadi 70%.
- m. Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standard menjadi 479 Puskesmas.
- n. Jumlah puskesmas DTPK/DBK yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar menjadi 48 Puskesmas.
- o. Jumlah puskesmas yang terakreditasi menjadi 50 Puskesmas.
- p. Jumlah Puskesmas yang menerapkan manajemen Puskesmas sesuai standar menjadi 165 puskesmas.
- q. Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan pelayanan kesehatan Dasar sesuai standar menjadi 165 Puskesmas
- r. Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 4 puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional menjadi 50%.
- s. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 4 puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja menjadi 33 K/K.
- t. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 3 Puskesmas yang melaksanakan kesehatan Olah Raga menjadi 18 K/K.
- u. Persentase pesantren yang memiliki poskestren menjadi 80 pesantren

- v. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 3 puskesmas yang menyelenggarakan program pengembangan (jiwa, indera, dan gigi mulut) menjadi 33 K/K

3. Kegiatan dari program ini meliputi:

1. Penguatan Pembinaan Manajemen Puskesmas
2. Pemantapan Manajemen di Pelayanan Kesehatan Primer di Kab/Kota
3. Pembinaan dan Monitoring pelayanan primer Terpadu
4. Pemantapan Dokter di Pelayanan Kesehatan Primer dalam Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Kota
5. Pertemuan Pelayanan Primer di Puskesmas Perkotaan Kab/Kota
6. Pendampingan persiapan pelayanan kesehatan Primer Kab/Kota menuju BLUD
7. Persiapan Akreditasi di Pelayanan Primer di Kabupaten/Kota
8. Pertemuan Pembentukan Tim Akreditasi Puskesmas di kabupaten Kota
9. Supervisi Fasilitatif P4K bagi Bidan Koordinator Puskesmas
10. Implementasi buku KIA, P4K, kantong Persalinan
11. Pertemuan Evaluasi dan Orientasi P4K
12. Pertemuan percepatan MDGs dengan Lintas Sektor
13. Orientasi penyiapan petugas dalam penyediaan rumah tunggu persalinan
14. Pelaksanaan DTPS KIBBLA
16. Bimbingan teknis Paska Pelatihan pelayanan kesehatan ibu dan anak
17. Workshop Pelayanan Neonatus Essensial Bagi Bidan
18. Refreshing Pencatatan dan Pelaporan Kesehatan Anak dengan Kohort
19. Peningkatan Kemampuan Dalam Penanganan Asfiksa dan Berat bayi lahir rendah (BBLR)
20. Koordinasi Lintas Program dalam pelaksanaan Rujukan Kegawatdaruratan Neonatus
21. Orientasi Pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu dan anak (KIA)
22. Peningkatan Kemampuan Petugas Puskesmas dalam SDDDTK (Stimulasi dan Deteksi Dini Tumbuh Kembang)
23. Refresing pencatatan pelayanan kesehatan anak dengan kohort anak
34. Peningkatan Kemampuan Petugas sebagai Fasilitator Kelas Ibu Bayi dan Balita
25. Pertemuan Pengembangan Integrasi Posyandu-PAUD
26. Peningkatan petugas dalam SDIDTK (Stimulasi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang)
27. Peningkatan Kemampuan Petugas dalam Manajemen Terpadu balita Sakit (MTBS)
28. Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)
29. Pemantapan PONED di daerah Fokus MDGs
30. Refreshing PONED (Penanganan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar)
31. Supervisi Terpadu Pelayanan Penanganan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)
32. Evaluasi data cakupan Indikator Kesehatan Ibu dan Anak
33. Perlombaan Penilaian Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan
34. Pendampingan Kelas Ibu Hamil di kab/Kota
35. Peningkatan Kemampuan Petugas sebagai Fasilitator Kelas Ibu Bayi dan Balita

36. Pemantapan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)
37. Penggandaan Buku ANC (Antenatal Care) Terpadu
38. Orientasi ANC (Ante Natal Care)
39. Pemantapan PWS KIA
40. Rapat Koordinasi LP/LS dalam Pelaksanaan PPIA (Pencegahan Penularan HIV/AIDS dari Ibu Ke Anak)
41. Workshop Kelas ibu Hamil
42. Peningkatan Kemampuan Pencegahan Penularan Ibu ke Anak (PPIA) bagi Petugas di Kabupaten/Kota
43. Peningkatan kemampuan skreening PPIA bagi bidan koordinasi Puskesmas
44. Orientasi PKRT Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu bagi Petugas Puskesmas
45. Workshop Petugas Kab/Kota Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan dan Anggaran responsif Gender (ARG)
46. Orientasi PPGDON (Penanganan Gawat Darurat Obstetri Neonatal)
47. Evaluasi Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) di Provinsi
48. Peningkatan kapasitas tim Audit Maternal dan Perinatal
49. Peningkatan kemampuan petugas dalam manajemen aktif kala III
50. Peningkatan kemampuan petugas dalam manajemen aktif kala IV bagi ibu nifas
51. Pelatihan/pemantapan ATLS Dokter Puskesmas
52. Pemantapan PPGD (Pelatihan Penanganan Gawat Darurat) bagi dokter fasilitas pelayanan kesehatan Primer
53. Pemantapan (general Emergency Life Support (GELS) untuk Dokter di Kabupaten/Kota
54. Advance Cardiac Life Support (ACLS) Dokter di Kabupaten/Kota
55. Basic Cardiac Life Support) BCLS Perawat di Kabupaten Kota
56. Persiapan Perawat Penyelia Perkesmas Terintegrasi dengan PMK di Kab/Kota
57. Pertemuan Pelayanan Prima dalam meningkatkan Pelayanan Kesehatan Primer di Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
58. Penguatan peran Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam Mengelola Perkesmas di Pelayanan Kesehatan Primer
59. Pertemuan Penerapan Perkesmas di Pelayanan Kesehatan Primer
60. Evaluasi Pelaksanaan Penjaringan Anak Sekolah (SD)
61. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Penjaringan anak sekolah
62. Workshop Pemantauan Indikator Akses Universal Kesehatan Reproduksi
63. Orientasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT) Bagi Petugas di kabupaten/Kota
64. Evaluasi PUG-BK dan ARG kab/kota
65. Pertemuan Penerapan Puskesmas di daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK)
66. Kegiatan Tim Kesehatan Bergerak dalam Rangka Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)
67. Evaluasi Pelayanan Kesehatan dasar di Puskesmas DTPK/DBK
68. Pembinaan Pelayanan Konseling Usila di Puskesmas santun Usila Percontohan
69. Pemantapan Program santun Usila di Puskesmas

70. Advokasi/Sosialisasi disarana pelayanan Primer santun usia lanjut di Kabupaten/Kota
71. Pertemuan koordinasi Program Kesehatan Lanjut Usia di sarana Pelayanan Kesehatan Kab/Kota
72. Training of Trainer (TOT) Senam Kesegaran Jasmani Usia Lanjut bagi petugas Kesehatan Usia Lanjut Kab/Kota
73. Peningkatan sarana dan Prasarana di Pelayanan kesehatan santun usia lanjut Kab/Kota
74. Orientasi Petugas dalam Pemeliharaan Kesehatan usia lanjut di Rumah (home Care)
75. Bimtek Pelayanan Usila di kab/Kota dan Puskesmas
76. Pertemuan koordinasi pembinaan rumah sakit dan panti wredha
77. Pemberian Paket Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Usila) di Panti
78. Training of Trainer (TOT) Konseling Kesehatan, Jiwa dan Gizi Usia lanjut 15 Kab/Kota
79. Pembinaan Pelayanan Konseling Usia Lanjut (Usila) di Puskesmas, Rumahsakit dan Panti
90. Pembinaan ke kab/kota tentang pelayanan usila di kab/kota
91. Peningkatan Pelayanan Kesehatan melalui Pembentukan kelompok usia lanjut di Kab/Kota
92. Pelatihan teknis tenaga Non Tenaga Kesehatan (Kader) untuk Program Kesehatan Lanjut Usia
93. Pembentukan, pemberdayaan dan Pembinaan Pelayanan kelompok usia lanjut di kab/kota percontohan
94. Peningkatan komitmen kemitraan LP/LS Kesehatan usia lanjut
95. Pelatihan teknis tenaga Non Tenaga Kesehatan (Kader) untuk Program Kesehatan Lanjut Usia
96. Pertemuan Koordinasi Kesehatan Oleh raga Tingkat provinsi
97. Pengukuran kebugaran Jasmani bagi Petugas Kesehatan Dinkes Provinsi
98. Peningkatan Kapasitas petugas untuk Pembinaan kebugaran Jasmiani bagi Calon Jemaah Haji.
99. Pengukuran kebugaran Jasmani bagi Karyawan Perusahaan di kab/Kota binaan
100. Pertemuan koordinasi kesehatan olah raga Tingkat Kab/Kota
101. Pembinaan Puskesmas pelaksana pelayan kesehatan oleh Raga di kab/Kota
102. Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Kerja bagi tenaga Kesehatan di Kab/Kota
103. Review akhir Program Kesehatan Kerja di Kab/Kota
104. Pendampingan Pusat ke Kab/Kota dan Penampungan TKI wanita
105. Pertemuan koordinasi kesehatan Kerja Tingkat Kab/Kota
106. Pembinaan perusahaan informal dan formal di Kab/Kota tentang ASI dan kesehatan reproduksi
107. Pembinaan Pos UKK di sektor informal
108. Sosialisasi yankestradkom bagi Pengobat Tradisional se Kota Medan
108. Peningkatan kapasitas Petugas Kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan Pelayanan Kesehatan Tradisional (yankestrad) di Kab/Kota
110. Evaluasi program yankestradkom bagi petugas kab/kota

111. Operasional Sentra Pengembangan penerapan Pengobatan Tradisional) SP3T Provinsi Sumatera Utara
112. Pembinaan Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan kesehatan tradisional komplementer
113. Pertemuan koordinasi Yankes tradkom Tk Provinsi
114. Pertemuan Koordinasi Poskestren Tingkat Provinsi
115. Pembentukan Poskestren bagi Pesantren di Kab/Kota
116. Peningkatan Kapasitas petugas Kesehatan untuk Pembinaan Pos Kesehatan bagi Pesantren di Kab/Kota
117. Peningkatan Pengetahuan Santri tentang Pos Kesehatan bagi Pesantren di Kab/Kota
118. Pembinaan Pos kesehatan pesantren (Poskestren) di Kab/Kota
119. Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Pesantren bagi tenaga kesehatan di kab/kota
120. Sosialisasi Tim Pembina Pengarah Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat
121. Pertemuan Pelayanan Gigi dan Mulut Anak
122. Pertemuan pelayanan kesehatan gigi dan mulut anak sekolah
123. Peningkatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut bagi Petugas Kesehatan kab/Kota
124. Pertemuan Fasilitasi Peningkatan Petugas Kesehatan di IPWL
125. Peningkatan kapasitas petugas kesehatan jiwa masyarakat melalui keterampilan jiwa masyarakat
126. Peningkatan kapasitas petugas kesehatan jiwa masyarakat dalam meningkatkan keterampilan kader kesehatan jiwa masyarakat
127. Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam penanganan penderita psikotik yang mengalami pemasungan dan penelantaran
128. Penjarangan Kasus Pasung (Eliminasi Pasung) di Kab/Kota
129. Peningkatan Kemampuan Petugas Kesehatan Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
130. Evaluasi pelaksanaan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Tk Provinsi
131. Peningkatan kapasitas petugas Kab/kota dalam perawatan gangguan jiwa masyarakat pra, masa dan pasca bencana
132. Asuhan Penglihatan dan Pendengaran bagi petugas kesehatan di Kab/Kota
133. Sosialisasi Dokter Gigi keluarga bagi Petugas Kesehatan di Puskesmas
144. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) KIM di Luar Gedung (Pemeriksaan Mata/Operasi Katarak)
135. Screening Gangguan Penglihatan UPT KIM di Kabupaten/Kota
136. Pertemuan teknis Penanggulangan gangguan Penglihatan bagi dokter dan Perawat Puskesmas Kab/Kota
137. Peningkatan kapasitas bagi pengelola kesehatan indra di kab/Kota

5.8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Tujuan

Program ini bertujuan memberdayakan individu, keluarga/kelompok, dan masyarakat termasuk swasta dalam bidang kesehatan agar mampu menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) sesuai dengan kespesifikan sosial budaya setempat .

2. Indikator outcome

- a. Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat menjadi 65 %.
- b. Jumlah Pos Kesehatan Desa (poskesdes) di Desa/Kel Siaga menjadi 2.950 unit.
- c. Persentase Sekolah Dasar (SD) yang mempromosikan Kesehatan menjadi 36%
- d. Persentasi Posyandu Purnama dan Mandiri menjadi 45%.
- e. Persentase desa siaga aktif menjadi 40%.
- f. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 2 desa yang mengembangkan Program Tanaman Obat Keluarga (TOGA) menjadi 28 K/K.

3. Kegiatan dari program ini meliputi:

- 1 Penyebarluasan informasi kesehatan melalui media promosi di Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
- 2 Peningkatan Pendidikan Kesehatan Kepada Masyarakat Melalui Peringatan Hari-hari Besar Kesehatan
- 3 Penyebarluasan informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronik
- 4 Gerakan Cuci Tangan Pakai Sabun di Institusi Pendidikan
- 5 Pekan raya Sumatera Utara (PRSU)
- 6 Reportase Bidang Kesehatan
- 7 Karnaval Mobil Hias
- 8 Perlombaan dan Penilaian PHBS
- 9 Orientasi/pertemuan Kampanye Aku Bangga Aku tahu (ABAT) bagi Fasilitator Kab/Kota
- 10 TOT Fasilitator dalam rangka kampanye Aku Bangga Aku tahu (ABAT) bagi Fasilitator Kab/Kota
- 11 Pekan Inovasi Sumatera Utara
- 12 Pertemuan capacity building/Desain Media bagi petugas promosi kesehatan Kab/Kota
- 13 Lomba poster kesehatan bagi Kab/Kota
- 14 Konsultasi Kegiatan Promosi Kesehatan (Promkes) ke Pusat
- 15 Study/Kajian kebutuhan Unit pelaksana teknis Unit Pelaksana Teknis (UPT) Promosi Kesehatan di Propinsi dalam rangka Penguatan Program
- 16 Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan lingkungan desa sehat
- 17 Advokasi dan sosialisasi pencegahan Penyakit Tidak Menular
- 18 Pelatihan konseling rehabilitasi berhenti merokok pada petugas kesehatan di kab/Kota
- 19 Advokasi dan sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
- 20 Pengadan Buletin Kesehatan
- 21 Pengembangan desa Siaga
- 22 Pertemuan Evaluasi Desa Siaga
- 23 Pemetaan Poskesdes dan UKBM
- 24 Orientasi Pemberdayaan masyarakat bagi Bidan/Perawat Poskesdes Kab/Kota
- 25 Pelatihan Promosi kesehatan bagi Petugas di Kab/Kota
- 26 Orientasi Pemberdayaan masyarakat bagi Kader Kesehatan Kab/Kota
- 27 Lomba Lingkungan desa sehat
- 28 Pertemuan evaluasi dalam rangka pengembangan Poskesdes
- 29 Pembinaan Program UKS ke Kab/Kota
- 30 Perlombaan institusi pendidikan di Tk SD yang mempromosikan kesehatan
- 31 Jambore Posyandu Tingkat Provinsi Sumatera Utara
- 32 Lomba Posyandu Tingkat Provinsi

- 33 Pertemuan pengelola Posyandu Kab/Kota
- 34 Pembinaan Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) ke Kab/ Kota
- 35 Sosialisasi Program TOGA
- 36 Lomba Toga
- 37 Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan dalam pemanfaatan Toga

5.9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1. Tujuan

Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan balita, serta usia produktif.

2. Indikator outcome

- a. Persentase gizi buruk yang ditangani menjadi 100%.
- b. Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif menjadi 55%
- c. Cakupan Rumah Tangga yang mengkonsumsi garam beryodium menjadi 90 %.
- d. Persentase anak 6-59 bulan mendapatkan Vitamin A menjadi 83 %
- e. Persentase Ibu Hamil mendapatkan Fe menjadi 80 %
- f. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi menjadi 100%
- g. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) menjadi 80 %.
- h. Persentase penyediaan bufferstock MP-ASI untuk bencana 100%
- i. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kalori (KEK) dan anemia mendapatkan PMT menjadi 55%.

3. Kegiatan program ini meliputi:

- 1 Pendamping kasus gizi buruk dan gizi kurang
- 2 Peningkatan kapasitas tatalaksana gizi buruk petugas kesehatan di Kab/Kota
- 3 Pemberian mineral Mix di RSUD kab/Kota
- 4 Penyediaan Pemberian Makanan Tambahan Anak sekolah (PMT-AS)
- 5 Peningkatan petugas konselor Air Susu Ibu (ASI) bagi petugas kesehatan Kab/Kota
- 6 Pertemuan manajemen program gizi di kabupaten Kota
- 7 Surveilans Gizi kabupaten/Kota
- 8 Pelatihan pemantauan Pertumbuhan bagi petugas gizi kab/Kota
- 9 Pemantauan status gizi di kab/kota
- 10 Sosialisasi /Rakontek/Review pemberian tablet Fe bumil dan penggunaan garam beriodium rumah tangga
- 11 Distribusi Tablet Fe di kab/Kota
- 12 Sosialisasi penggunaan garam beriodium rumah tangga
- 13 Penyediaan MP-ASI bagi balita 1 (satu)
- 14 Pengadaan PMT Ibu hamil
- 15 Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi (SUN Movement) dimasyarakat
- 16 Penguatan Manajemen Program Gizi
- 17 Bimbingan teknis program gizi ke Kabupaten/Kota
- 18 Pendidikan pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk
- 19 Pendidikan dan pelatihan Pemantauan Pertumbuhan
- 20 Pendidikan pelatihan Konselor makanan Pendamping Air susu ibu (MP-ASI)
- 21 Peningkatan pemberian Vitamin A dosis tinggi

- 22 Sweeping bulan vitamin A di Kab/Kota
- 23 Pendistribusian kasul Vitamin A

5.10. Program Lingkungan Sehat

1. Tujuan

Program ini bertujuan mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat melalui pengembangan sistem kesehatan kewilayahan untuk menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan.

2. Indikator outcome

1. Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan menjadi 78%
2. Persentase keluarga menggunakan air bersih menjadi 68 %
3. Persentase keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan menjadi 70%.
4. Persentase Tempat-tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan menjadi 80%
5. Jumlah Kab/Kota Sehat menjadi 11 K/K.
6. Jumlah puskesmas yang memiliki klinik sanitasi menjadi 260 Puskesmas
7. Persentase air minum yang diperiksa yang memenuhi syarat kesehatan menjadi 57%
8. Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan menjadi 80%.
9. Jumlah Rumah Sakit (RS) yang melakukan pengelolaan limbah medis Rumah Sakit menjadi 48 Rumah Sakit.
10. Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan program penyehatan lingkungan menjadi 100%

3. Kegiatan dari program ini meliputi:

- a) Peningkatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar, terdiri dari kegiatan-kegiatan:
 - 1 Stimulan pembangunan percontohan rumah sehat dan sederhana
 2. Pertemuan Higiene Sanitasi Depot air Minum
 3. Advokasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
 4. Pelaksanaan Program Rumah Sehat
 5. Monitoring Pembangunan percepatan sanitasi pemukiman (PPSP)
 6. Pertemuan peningkatan Program PPSP
 7. Pengadaan stimulan Sarana Jamban Keluarga
 8. Gerakan Aksi Penyehatan Kawasan Danau Toba
 9. Pilot Project Pembentukan Kota Sehat
 10. Perlombaan Lingkungan bersih dan sehat
 11. Stimulan sarana kesehatan lingkungan Kabupaten/Kota Sehat
 12. Sosialisasi program penyehatan Kabupaten/Kota sehat di Kabupaten/Kota
 13. Stimulan sarana kesehatan lingkungan di daerah wisata
 14. TOT sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di Kabupaten
 15. Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
 16. Pengadaan stimulan sarana air bersih
 17. Pengawasan Penyehatan Air Minum di Kabupaten/Kota
 18. Sosialisasi Program Pengelolaan Limbah Medis Sarana Pelayanan Kesehatan di 6 Kab/Kota

19. Training of trainer (TOT) Program Pengelolaan Limbah Medis Sarana pelayanan kesehatan
20. Pembinaan sanitasi rumah sakit di Kab/Kota
21. Inspeksi Limbah Medis sarana pelayanan kesehatan di Kab/Kota
22. Pengawasan kualitas air minum di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
23. Pengawasan Depot Air Minum di Kab/Kota
24. Pertemuan hygiene sanitasi pasar Sehat di Kabupaten/Kota
25. Stimulan pembangunan percontohan sekolah sehat
26. Review Pembinaan Program Klinik Sanitasi di Kab/Kota
27. Peningkatan prasarana klinik sanitasi di Sarana pelayanan primer di Kab/Kota
28. Pertemuan hygiene sanitasi depot air minum bagi pengusaha depot di Kabupaten/ Kota
29. Pertemuan hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM) bagi Rumah Tangga
30. Pengawasan kualitas Makanan dan Minuman pada Rumah Makan/Restoran di Kab/Kota

5.11. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

1. Tujuan

Program ini bertujuan menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular. Penyakit menular yang diprioritaskan dalam program ini adalah: malaria, demam berdarah dengue, tuberkulosis paru, HIV/AIDS, diare, polio, pneumonia, dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), termasuk penyakit karantina dan resiko masalah kesehatan masyarakat yang memperoleh perhatian dunia internasional. Penyakit tidak menular yang diutamakan adalah: penyakit jantung, kanker, diabetes mellitus, dan penyakit metabolik, penyakit kronis dan degeneratif, serta gangguan akibat kecelakaan dan cedera.

2. Indikator outcome

1. Angka Case Detection Rate penyakit TB menjadi 87 %
2. Angka keberhasilan pengobatan TB menjadi $\geq 95\%$
3. Angka CNR (Case Notification Rate) program TB per 100.000 penduduk menjadi 185/100.000 penduduk
4. Cakupan Penemuan dan tata laksana kasus Pneumonia pada balita menjadi 40%.
5. Angka Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 penduduk menjadi $<5/100.000$ penduduk.
6. Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sosialisasi hepatitis B menjadi 25 K/K
7. Case Fatality Rate diare pada saat Kejadian Luar Biasa menjadi $< 1 \%$
8. Jumlah kabupaten/Kota yang menyelenggarakan sosialisasi demam Thypoid menjadi 33 K/K
9. Prevalensi Kecacingan pada anak sekolah menjadi $<20\%$
10. Angka Kecatatan Tingkat 2 Kusta menjadi $<5 \%$
11. Jumlah penduduk kelompok usia > 15 tahun yang mengikuti test HIV menjadi 16.000 orang
12. Persentase ibu hamil HIV positif mendapatkan ARV menjadi 85%
13. Persentase kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) yang diperiksa dan diobati menjadi 80%
14. Persentase ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) mendapatkan pengobatan ART menjadi 85%
15. Angka Kematian Jemaah Haji kurang dari 2 per 1.000 jemaah haji $<2/1.000$ jemaah haji.

16. Angka penemuan kasus baru Frambusia per 100.000 penduduk menjadi <0,6/100.000 penduduk
17. Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue per 100.000 penduduk menjadi 45/100.000 penduduk
18. Angka zoonosis lainnya (flu burung, rabies, anthrax, leptospirosis) yang ditangani sesuai standar menjadi >94%
19. Cakupan penduduk di daerah endemis mendapatkan pengobatan massal filariasis menjadi 75%.
20. Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 penduduk (API) menjadi 0,6/1.000 penduduk
21. Persentase desa yang mencapai *Universal Child Immunization* (UCI) menjadi 100%
22. Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap menjadi 95%
23. Persentase anak sekolah usia dasar (BIAS) yang mendapatkan imunisasi menjadi 96%
24. Angka Non Acute Flaccid (AFP) pada anak usia <15 tahun per 100.000 penduduk menjadi < 2/100.000
25. Persentase Penyelidikan Epidemiologi dan penanggulangan KLB < 24 jam pada desa/kel yang terjadi Kejadian Luar Biasa menjadi 100%
26. Persentase kab/kota yang melakukan penanganan dan penanggulangan wabah dan bencana menjadi 33 K/K
27. Persentase kab/kota yg melaksanakan Surveilans Deteksi Dini & KIE Penyakit Tidak Menular menjadi 33 K/K
28. Jumlah kab/kota yang melaksanakan surveilans dan KIE kesehatan matra menjadi 33 K/K

3. Kegiatan program ini meliputi:

1. Imunisasi dasar lengkap
2. Pelaksanaan Program Pencegahan penyakit dengan imunisasi
3. Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah Tingkat Dasar
4. Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit
5. Pengendalian penyakit yang dapat di cegah dengan imunisasi (Surveilans PD3I)
6. Peningkatan Surveilans Terpadu Penyakit (STP)
7. Seminar hasil survailans
8. Pengendalian Penyakit Filaria
9. Pemeriksaan Specimen filariasis
10. Bahan Pembantu Penentuan Prevalensi Mikrofilaria
11. Pemantauan dan Evaluasi Daerah endemis filariasis
12. Survey Evaluasi Prevalensi Mikrofilaria
13. Monitoring cakupan pengobatan massal filariasis
14. Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan POMP
15. Pertemuan Pengendalian Vektor penular penyakit
16. Penemuan dan Pengobatan Hepatitis B
17. Sosialisasi hepatitis B di Kab/Kota
18. Pengendalian Penyakit thypoid
19. Sosialisasi Pengendalian Penyakit Demam Thypoid
20. Pembinaan Teknis dan Monitoring evaluasi Kasus Demam Thypoid
21. Pengendalian Penyakit Diare
22. Peningkatan (Sistem Kewaspadaan dini (SKD) Diare
23. Sosialisasi Penatalaksanaan Diare
24. Pengendalian Penyakit Kecacingan

25. Evaluasi Intensitas penyakit kecacangan pada Anak Usia Sekolah Dasar
26. Pemberian Makan Obat Pada Anak Usia Sekolah Dasar
27. Pertemuan Advokasi dan Sosialisasi Program P2 Kecacangan
28. Monitoring dan Evaluasi Advokasi dan sosialisasi Program P2 Kecacangan
29. Sosialisasi Program P2 Kecacangan
30. Pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue
31. Pengadaan Buffer Stock Rapid Diagnosis Test (RDT) Demam Berdarah Dengue
32. Pertemuan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengendalian DBD
33. Pertemuan Lintas Sektor/Lintas Program Dalam Rangka Pengendalian DBD di Kab/Kota
34. Pertemuan Manajemen Kasus dan Faktor Risiko DBD & Arbovirosis Lainnya
35. Penyelidikan Epidemiologi (PE) Kasus DBD & Arbovirosis Lainnya
36. Surveilans Vektor Demam Berdarah Dengue (DBD)
37. Studi Mortalitas Kasus DBD di Kabupaten/Kota
38. Advokasi Program P2 DBD & Arbovirosis Lainnya di Kab/Kota
39. Penelitian ilmiah terkait demam berdarah dengue (DBD)
40. Pertemuan Revitalisasi Kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik) di Kabupaten/Kota
41. Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit/Pengendalian Penyakit Malaria
42. Pertemuan Evaluasi Program P2 Malaria dan Perencanaan Tahun 2016
43. Work Shop Penatalaksanaan Kasus malaria bagi Petugas di sarana pelayanan kesehatan Kab/Kota
44. Work Shop Tatalaksana Laboratorium bagi Petugas di Kab/Kota
45. Pelatihan Tatalaksana Malaria bagi dokter Rumah Sakit
46. Pelatihan Tatalaksana Malaria bagi dokter Puskesmas
47. Pelatihan Petugas Mikroskopis Kabupaten
48. Pelatihan Petugas Mikroskopis di Sarana Pelayanan Primer
49. Mass Blood Survey
50. Pelaksanaan Rapid Village Survey daerah fokus
51. Workshop Hari Malaria Sedunia Tahun 2015
52. Ekspansi TB Dengan Strategy Directly Observe Treatment Short Course (DOTS) ke fasilitas pelayanan kesehatan lain
53. Pembinaan Program TB dengan Strategy DOTS untuk meningkatkan CDR
54. Sosialisasi TB-MDR (TB Multi Drugs)
55. Workshop Program TB dengan Strategi DOTS pada DPS
56. Penemuan dan pengobatan pasien TB di fasilitas pelayanan kesehatan
57. Promosi TB aktif ke Masyarakat
58. Jejaring Internal kasus TB di Rumah sakit
59. Cross check slide sputum ke Laboratorium rujukan provinsi
60. Penerapan PPM dan ISTC di tiap kabupaten Kota
61. Jejaring layanan TB DOTS di tiap kab/Kota
62. Peningkatan Pemeriksaan Kesehatan oleh UPT Labkes di Luar gedung
63. Pembinaan Program TB dengan Strategy DOTS untuk meningkatkan Success Rate (SR)
64. Workshop Pelaksanaan Laboratorium Intermediate TB Provinsi
65. Jejaring eksternal program TB DOTS
66. Workshop TB-MDR (Multi Drug Resisten)
67. Workshop IPT
68. Pembinaan Fasilitas pelayanan kesehatan TB-MDR (Multi Drugs Resisten)

69. Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program TB
70. Pemantapan Petugas analis laboratorium PRM/PPM/RS Kab/Kota
71. Penyuluhan dan tatalaksana pengobatan TB pada penderita baru dengan bantuan PMO
72. Peningkatan jejaring eksternal TB RS sesuai alamt pasien
73. Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program TB
74. Workshop TB-HIV
75. Pelatihan Fasilitas pelayanan kesehatan bagi Dokter dan Petugas TB
76. Pelatihan Mikroskopis TB bagi Petugas Laboratorium
77. Workshop TB-Anak
78. Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program P2HIV dan IMS
79. Update Pedoman Penatalaksanaan Infeksi Menular seksual (IMS)
80. Pengadaan Bahan Laboratorium Infeksi menular seksual (IMS) dan voluntary counseling test (VCT)
81. Advokasi 4 Indikator MDG's Program HIV/AIDS
82. Validasi Data di Layanan VCT dan IMS
83. Pengendalian Penyakit Infeksi Menular seksual (IMS)
84. Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak (PPIA)
85. Pelatihan Prevention Mother To Child Transmissions (PMTCT)
86. Sosialisasi Prevention Mother to Child Transmissions) PMTCT
87. Konseling dan Testing HIV-AIDS
88. Workshop Konseling dan Tes HIV
89. Workshop TIPK (Tes Inisiasi Petugas Kesehatan)
90. Monitoring Layanan Voluntary Counseling Test (VCT) dan Infeksi menular seksual (IMS) di Rumah Sakit
91. Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan KORPRI/PNS dan Keluarga
92. Workshop Estimasi Populasi Risiko Tinggi dan ODHA bagi Kab/Kota
93. Workshop Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP) terhadap ODHA
94. Pengadaan Mesin dan Reagen CD4 serta alat pendukung
95. Pelatihan CST dan LBK, desentralisasi ARV
96. Mentoring Klinis Layanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP) Baru terhadap ODHA
97. Monitoring dan evaluasi Layanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP) terhadap ODHA
98. Pendampingan dan Penjangkauan ODHA
99. Pengendalian Penyakit rabies
100. Pengumpulan data, analisa dan desiminasi informasi kasus dan faktor resiko zoonosis (flu burung, rabies dan leptospirosis)
101. Investigasi dan Pelaporan kasus-kasus zoonosis (flu burung, rabies, leptospirosis)
102. Integrasi Peningkatan Perlindungan masyarakat terhadap penyakit zoonosis (flu Burung, rabies, antraks, leptospirosis)
103. Workshop pengendalian zoonosis dan update data kasus zoonosis
104. Penyelidikan Epidemiologi zoonosis (flu burung, rabies, antraks, leptospirosis)
105. Sosialisasi Usaha Pemberdayaan pengendalian penyebaran zoonosis pada petugas masyarakat dan monitoring Rabies Center
106. Pertemuan Surveylans Kesehatan Haji
107. Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan Haji

108. Gerakan Akselerasi Imunisasi (UCI)
109. Peningkatan Kelengkapan dan Ketepatan Laporan Mingguan Wabah (W2)
110. Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan wabah
111. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan Paru Masyarakat (KPM)
112. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kesehatan Paru Masyarakat (KPM)
113. Peningkatan pelayanan kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan Paru Masyarakat (KPM) di luar gedung (X-Ray keliling) oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan Paru Masyarakat (KPM)
114. Penyediaan Fasilitas deteksi dini terkait penyakit akibat rokok
115. Peningkatan Penanggulangan KLB dan Bencana
116. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan bencana
117. Pembinaan manajemen bencana Kab/Kota
118. Rapid Health Assesment (RHA) pada kejadian bencana
119. Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit/ Penyakit ISPA
120. Sosialisasi tatalaksana kasus Infeksi Saluran pernafasan akut (ISPA) di Kab/Kota
121. Workshop LS/LP Pengendalian Infeksi Saluran pernafasan akut (ISPA) di Kab/Kota
122. Pelaksanaan Care Seeking pneumonia di Kab/Kota
123. Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program P2 ISPA di Provinsi
124. Sosialisasi Pemantapan Cakupan Program P2 ISPA
125. Pertemuan PTM dalam rangka Monev IVA dan CBE
126. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program PTM
127. Pertemuan evaluasi PTM
128. Pertemuan Advokasi Pembentukan Jejaring Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) di Kab/Kota
129. Pemantauan dan Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk mendukung Pergub Nomor 35 tahun 2012
130. Pertemuan Evaluasi Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular
131. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi program Penyakit Tidak Menular (PTM)
132. Deteksi dini Pengendalian penyakit Tidak menular (PTM)
133. Surveilans sentinel Pengendalian Penyakit Tidak menular (PPTM)
134. Pertemuan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) dalam rangka evaluasi Visual Asam Aseta (IVA) dan Clinical Breast Examination (CBE)
135. Pertemuan advokasi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak rokok
136. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) di Luar Gedung (Pemeriksaan gol.darah, gula darah, kolesterol & asam urat)
137. Pengendalian Penyakit Frambusia
138. Sosialisasi Program Frambusia
139. Pemeriksaan Frambusia pada Anak Sekolah
140. Tatalaksana Kasus Frambusia
141. Pengendalian Penyakit Kusta
142. Workshop Kusta di Kab/Kota
143. Pemantauan Pemberian Obat Kemopropilaksis kusta
144. Monitoring Petugas program Kusta
145. Pemeriksaan dan deteksi dini kontak penderita kusta

146. Assesment Kecacatan Kusta
147. Sosialisasi Kesehatan Matra
148. Surveilans kesehatan matra pada kegiatan matra khusus
149. Monitoring evaluasi kesehatan matra
150. Penyelenggaraan kesehatan matra dalam penanggulangan akibat bencana
151. Operasional pengelolaan program pencegahan dan pemberantasan penyakit dan lingkungan sehat

5.12. Program Upaya Kesehatan Perorangan

1. Tujuan

Program ini bertujuan meningkatkan akses, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan kesehatan perorangan.

2. Indikator outcome

- a. Jumlah RSUD yang menyelenggarakan (PONEK) menjadi 34 RSUD
- b. Jumlah RSUD yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar menjadi 34 RSUD
- c. Jumlah RSUD yang menerapkan PPK Badan Layanan Umu Daerah menjad 17 RSUD
- d. Jumlah RSUD yg menerapkan SPM RS menjadi 34 RSUD
- e. Jumlah RSUD yg melaksanakan program keselamatan pasien menjadi 20 RSUD
- f. Jumlah rumah sakit yang terakreditasi menjadi 94 RS
- g. Jumlah rumah sakit yang mendapat kan penetapan kelas rumah sakit menjadi 205 RS
- h. Jumlah RS yg menerapkan standard sarana dan prasarana menjadi 132 RS

3. Kegiatan indikatif dari program ini meliputi:

1. Workshop Penatalaksanaan Kontrasepsi Darurat bagi RSUD Kab/Kota
2. Pertemuan peningkatan Pelayanan Rumah sakit Sayang Ibu dan bayi
3. Peningkatan Pelayanan PONEK bagi 9 RSUD Kab/Kota
4. Pertemuan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK)
5. Penatalaksanaan Ibu Hamil dengan Perdarahan, Pre-Eklamsia dan Infeksi di Rumah Sakit
6. Penatalaksanaan Bayi Prematur dan bayi berat badan lahir rendah (BBLR) di Rumah Sakit
7. Pertemuan peningkatan pelayanan Rumah Sakit Sayang Ibu dan bayi
8. Pertemuan Pelayanan ante natal care (ANC) Rumah Sakit dalam upaya Promotif dan Preventif Perdarahan, Pre-Eklamsia dan Infeksi
9. Workshop Pemeliharaan Gizi Seimbang terhadap Ibu Hamil
10. Peningkatan Pelayanan Gawat Darurat Rumah Sakit yang sesuai Standar
11. Sosialisasi Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Terpadu ke Kabupaten/Kota
12. Peningkatan Pelayanan Ambulans/Stay Lapangan Merdeka
13. Pertemuan SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat darurat Terpadu)
14. Pengadaan Mobil Ambulans dan alat pendukung pelayanan ambulans gawat darurat terpadu
15. Pengadaan Sarana Komunikasi (IT) Pendukung Pelayanan ambulans
16. Peningkatan Kemampuan bagi Petugas Kru Pelayanan Ambulans Gawat Darurat
17. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Terpadu
18. Peningkatan Kemampuan bagi Petugas Operator Pelayanan Ambulans Gawat Darurat

19. Pertemuan Kerjasama Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Terpadu dengan Lintas Sektor Terkait dan rapat intern
20. Workshop Persiapan RS BLUD bagi RSUD Kab/Kota
21. Workshop pengelolaan keuangan BLU RS
22. Pertemuan Evaluasi Tarif RSUD terkait IN CBGs dalam pelaksanaan BPJS
23. Orientasi indikator Kinerja dan Mutu Pelayanan RSUD Kab/Kota
24. Evaluasi Indikator Kinerja dan Mutu Pelayanan RSUD kab/Kota
25. Pertemuan Penatalaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit Kab/Kota
26. Workshop Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan
27. Pertemuan penguatan Fungsi Komite Medik Rumah Sakit terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
28. Sosialisasi Badan Pengawas Rumah Sakit dan Dewan Pengawas Rumah Sakit sesuai Undang-undang Rumah Sakit nomor 44 tahun 2009
29. Pertemuan Pencegahan Resistensi Antibiotika
30. Penguatan Sistem Rujukan Regional Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Sumatera Utara
31. Pertemuan Jejaring dan sistem Rujukan RS mengacu pada UU No 44 tahun 2009
32. Pengembalian Jasa medis tenaga kesehatan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
33. Sosialisasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat ke Kab/Kota
34. Pengelolaan Sistem Informasi Rumah Sakit mendukung sistem rujukan regional
35. Pertemuan SPM RSUD dalam Peningkatan Pelayanan
36. Pertemuan advokasi stakeholder Akreditasi RSUD
37. Workshop akreditasi rumah sakit versi tahun 2012 untuk RSUD dan RSU Swasta
38. Bimbingan teknik dalam rangka akreditasi Rumah Sakit
39. Stimulan akreditasi Rumah Sakit
40. Pertemuan dalam rangka akselerasi Penetapan kelas Rumah sakit Umum daerah
41. Orientasi penetapan kelas RS
42. Pertemuan Dalam Rangka Akselerasi Penetapan Kelas Rumah Sakit Swasta
43. Monitoring dan Evaluasi dalam rangka penetapan kelas Rumah Sakit
44. Pertemuan Peningkatan Mutu penerapan standar bidang sarana dan peralatan medik pada RSUD Kab/Kota
45. Pertemuan Peningkatan Mutu penerapan standar bidang sarana dan peralatan medik pada RS Swasta Kab/Kota
46. Orientasi Standar Sarana dan Prasarana RS
47. Monitoring Evaluasi dalam rangka Penilaian Peralatan Kesehatan RS yang sudah/belum terkalibrasi
48. Pertemuan meningkatkan mutu dalam rangka penerapan proteksi radiasi pada alat kesehatan di RSUD
49. Pertemuan meningkatkan mutu dalam rangka penerapan proteksi radiasi pada alat kesehatan RSU Swasta
50. Monitoring dan Evaluasi dalam rangka meningkatkan mutu penerapan standar bidang sarana dan peralatan medik

51. Pertemuan meningkatkan mutu dalam rangka pelayanan hemodialisa di Rumah Sakit Umum Daerah , Rumah Sakit swasta dan sarana kesehatan lainnya
52. Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pendataan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit yang sudah/Belum Terkalibrasi
53. Pertemuan dalam rangka kalibrasi peralatan kesehatan pada Rumah Sakit swasta
54. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
55. Pengadaan Perbekalan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan Indera Masyarakat (KIM)
56. Pengadaan Perbekalan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Kusta Lau Simomo
57. Penyediaan makanan dan minuman pasien Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Kusta
58. Akreditasi terhadap balai laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
59. Pengadaan Perbekalan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan Paru Masyarakat (KPM)
60. Penyediaan fasilitas perawatan pasien dampak rokok
61. Pengadaan Perbekalan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)
62. Pengadaan Perbekalan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) PTC Indrapura
63. Penyusunan Clinical Pathway di RSUD dalam rangka kendali mutu dan biaya pada pelaksanaan JKN
64. Pertemuan Peningkatan Mutu Keselamatan Pasien (Patient Safety)
65. Integrasi Sistem peningkatan mutu RS dan upaya keselamatan pasien
66. Pengawasan dan pembinaan Rumah Sakit oleh Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Sumatera Utara

5.13. Program Sumber daya Kesehatan

1. Tujuan

Program ini bertujuan meningkatkan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan lainnya, serta pemberdayaan profesi kesehatan, sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan.

2. Indikator outcome

- a. Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi menjadi 95%
- b. Persentase penetapan angka kredit jabatan fungsional menjadi 100%
- c. Jumlah pelatihan kesehatan aparatur dan non aparatur yang diakreditasi menjadi 40 Pelatihan.
- d. Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Saka Bakti Husada (SBH) menjadi 33 K/K
- e. Persentase RSUD yang memenuhi standard ketenagaan dokter spesialis penunjang menjadi 100%
- f. Ratio tenaga medis per puskesmas minimal 1

3. Kegiatan program ini meliputi:

- a) Pembinaan Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, terdiri dari kegiatan-kegiatan:
 1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM

2. Updating Sumber daya manusia Kesehatan
 3. Pembinaan Perencanaan Sumberdaya manusia Kesehatan
 4. Pertemuan Koordinasi Pengembangan Sumberdaya manusia Kesehatan
 5. Sosialisasi Program internsip Dokter Indonesia bagi Rumah Sakit Swasta
 6. Monitoring dan Evaluasi Dokter Internsip
 7. Pertemuan Evaluasi pelaksanaan program dokter internsip
- b) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan yang terakreditasi, terdiri dari kegiatan-kegiatan:
1. Pengkajian/identifikasi Kebutuhan pelatihan tenaga kesehatan
 2. Pengembangan jejaring dan teknologi pelatihan kesehatan
 3. Pengkajian/identifikasi Kebutuhan pelatihan tenaga kesehatan masyarakat
 4. Pengembangan jejaring dan teknologi pelatihan kesehatan
 5. Pelatihan Kepemimpinan Puskesmas
 6. Pelatihan bagi penyelenggaran pelatihan (Training Officer Course)
 7. Supervisi dan Bimbingan teknis Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan
 8. Pelatihan jabatan fungsional epidemiolog kesehatan
 9. Pelatihan jabatan fungsional admistratur kesehatan
 10. Pertemuan Akreditasi Pelatihan
 11. Monitoring dan evaluasi pelatihan kab/kota
 12. Pelatihan Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan
 13. Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat
 14. Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan
 15. Pendidikan dokter spesialis untuk penugasan khusus
 16. Pertemuan Evaluasi pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan
 17. Perkemahan Bakti Husada se-sumatera Utara
 18. Pelatihan pamong Saka Bakti Husada (SBH) Kabupaten/ kota
 19. Pertemuan Penilaian Penetapan Angka Kredit Fungsional Fisioterapi
 20. Dukungan Manajemen Tim Pengelola Jabatan Fungsional
 21. Rapat berkala Tim jabatan Fungsional Provinsi Sumatera Utara
 22. Pertemuan Penilaian Penetapan Angka Kredit (PAK) jabatan Fungsional Sanitarian
 23. Pertemuan Penilaian Penetapan angka kredit (PAK) Jabatan Fungsional Apoteker
 24. Pertemuan Penilaian Penetapan angka kredit (PAK) Jabatan Fungsional Nutrisionist
 25. Pertemuan koordinasi pengelola jabatan fungsional kabupaten/ kota
 26. Pertemuan penilaian PAK (penetapan angka kredit) jabatan fungsional nutrisionist
 27. Pertemuan penilaian PAK (penetapan angka kredit) jabatan fungsional fisioterapist
 28. Konsultasi tim penilai/ sekretariat tim penilai jabatan fungsional ke badan PP Sumberdaya manusia kesehatan Provinsi Sumatera Utara
 29. Supervisi dan bimbingan teknis institusi pendidikan tenaga kesehatan
 30. Pelatihan Manajemen Penatalaksanaan Malaria
 31. Pelatihan Manajemen Penanggulangan HIV Aids
 32. Pelatihan Pelaksanaan BBLR bagi petugas kesehatan di Kab/Kota

33. Pelatihan Immunisasi bagi petugas vaksinator disarana pelayanan kesehatan Kab/Kota
 34. Pelatihan Pengisian Partograf bagi petugas kesehatan di Kab/Kota
 35. Pelatihan TOT HIV AIDS bagi petugas Puskesmas
 36. Perencanaan Manajemen pelayanan kesehatan dasar Kab/Kota
 37. Perencanaan Mutu Kesehatan
 38. Pelatihan Jabatan fungsional dokter gigi di Sarana Pelayanan Kab/Kota
 39. Pelatihan Jaminan Kesehatan Nasional
 40. Pelatihan Jabatan fungsional Administrasi kesehatan
 41. Pelatihan Jabatan fungsional Perawat
 42. Pelatihan Standar Pertumbuhan Balita
 43. Pelatihan teknis pelaporan, penyimpanan, dan pendistribusian Narkotika dan Psikotropika
 44. Pelatihan Manajemen Tata laksana inisiasi menyusui dini (IMD) dan ASI Eksklusif
- c) Pembinaan sistem karir, registrasi dan standarisasi kompetensi tenaga kesehatan, terdiri dari kegiatan-kegiatan:
1. Pelatihan Item Review dan Item Dept dalam rangka Uji Kompetensi tenaga Kesehatan
 2. Pertemuan koordinasi Kompetensi Tenaga Kesehatan
 3. Supervisi dan Pengumpulan data Peserta Uji Kompetensi ke Kab/Kota
 4. Penilaian Tenaga Kesehatan teladan
 5. Operasional Pengelola Sumber Daya Tenaga Kesehatan
 6. Supervisi dan monitoring evaluasi kompetensi tenaga kesehatan rumah sakit dan puskesmas
 7. Penempatan dan Penarikan Tenaga Kesehatan dokter dan dokter gigi PTT
 8. Sosialisasi registrasi tenaga kesehatan
 9. Pelaksanaan mekanisme registrasi tenaga kesehatan
Pelaksanaan uji kompetensi, registrasi dan lisensi tenaga kesehatan

5.14. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

1. Tujuan

Program ini bertujuan mengembangkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan guna mendukung penyelenggaraan Sistem Kesehatan Provinsi (SKP).

2. Indikator outcome

- a. Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan menjadi 95%
- b. Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan menjadi 95%
- c. Jumlah Kabupaten/Kota yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) menjadi 30 K/K.
- d. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Kesehatan yang dihasilkan per tahun 5 dokumen/tahun
- e. Jumlah dokumen monitoring, pengendalian dan evaluasi yang dihasilkan per tahun 7 dokumen/tahun
- f. Persentase Kab/Kota memiliki Profil Kesehatan 100%.
- g. Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan yaitu 33 Kab Kota

3. Kegiatan program ini meliputi:

a) Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat bagi penduduk miskin, terdiri dari kegiatan-kegiatan:

1. Kemitraan pemberdayaan masyarakat dalam penurunan kematian ibu dan anak
2. Pemeliharaan kesehatan masyarakat Sumatera utara
3. Rapat koordinasi Percepatan pelaksanaan kepesertaan Semesta
4. Advokasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke kab/kota
5. Desiminasi informasi Jaminan Kesehatan nasional di Provinsi Sumatera Utara
6. Pembentukan unit layanan pengaduan dan informasi publik
7. Penggalangan komitmen kepesertaan semesta
8. Peningkatan Kapasitas Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
9. Pemantapan Persiapan pelaksanaan BPJS
10. Rapat lintas Program/lintas sektor kepesertaan Penerima bantuan Iuran (PBI)
11. Penggalangan komitmen Kab/Kota untuk bekerja sama dengan Badan penyelenggara jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

b) Pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan penyempurnaan administrasi keuangan serta hukum kesehatan, terdiri dari kegiatan-kegiatan:

1. Sustainability PHP-II (Operasional BP-JHC dan rapat-rapat lintas program dan lintas sektoral tingkat provinsi)
2. Operasional Pengelolaan Program Kebijakan dan manajemen Pembangunan Kesehatan
3. Koordinasi Pembangunan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
4. Musyawarah rencana Pembangunan (Musrenbang) Forum SKPD Bidang Kesehatan tahun 2014
5. Pembinaan Tenaga Perencana Kesehatan Kab/Kota
6. Sinkronisasi perencanaan dan Penganggaran serta penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
7. Penyusunan dan Penyelarasan Renstra Dinkes 2013-2014 pasca Penetapan Perda RPJMD 2013-2018
8. Penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur
9. Rapat kerja kesehatan daerah (Rakerkesda) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015
10. Fasilitasi dan perencanaan dan penganggaran kesehatan Kabupaten/kota
11. Pertemuan penyusunan strategi pasca MDG'S dan analisis pencapaian MDG'S
12. Peningkatan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan pelayanan kesehatan
13. Pemantapan Penyusunan Standard Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Dinas Kesehatan Provinsi dan UPT
14. Penyusunan perencanaan dan anggaran SKPD bidang Kesehatan
15. Pertemuan Pasca Musrenbang bidang Kesehatan
16. Pendataan dan pemeliharaan aset provinsi Sumatera Utara
17. Penataan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pedoman, hukum pengadaan perbekalan kesehatan
18. Sosialisasi dan pembinaan peraturan perundangan serta hukum kesehatan
19. Penyusunan dan pembuatan laporan dan evaluasi tahunan
20. Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan kesehatan

21. Penyusunan dan pembuatan buku semester Hasil-hasil pembangunan kesehatan di Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Utara
 22. Penyusunan laporan keuangan semester I dan semester II Tahun 2014
 23. Tindak lanjut penyelesaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) auditor
 24. Monitoring dan Pengendalian kegiatan/ program kesehatan
 25. Sosialisasi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan
 26. Evaluasi dan Penyusunan Indikator Kesehatan di 3 Kab/ kota
- c) Pengembangan sistem informasi kesehatan, terdiri dari kegiatan-kegiatan:
1. Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi
 2. Finalisasi Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi
 3. Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) dan Pengolahan data SP2TP
 4. Pertemuan Pengelolaan SIK dan bank Data Kesehatan
 5. Pembinaan dan Peningkatan Manajemen data kesehatan ke Kab/Kota
 6. Pengembangan pengolah data Provinsi dan Kab/Kota
 7. Operasional Bank Data dan web site Dinas Kesehatan
 8. Up dating Manajemen data di Kabupaten/ kota
 - 9.. Pertemuan pengelola sistem informasi kesehatan (SIK) dan Bank Data Kesehatan serta pengelolaan informasi Publik
 10. Penilaian mandiri kualitas data rutin (PMKDR)
 11. Pemuktahiran Data Pelayanan Kesehatan Primer di Kab/Kota
 12. Pilot Project Penerapan Sistem Informasi Kesehatan daerah (SIKDA) Generik

5.15. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

1. Tujuan

Program ini bertujuan meningkatkan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan kesehatan.

2. Indikator outcome

a. Jumlah penelitian dan pengembangan kesehatan dilaksanakan menjadi 15 penelitian.

3. Kegiatan program ini meliputi :

1. Penelitian teknologi kesehatan dan biomedis
2. Penelitian pada Intervensi kesehatan masyarakat dan kebijakan kesehatan

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mengacu pada tujuan dan sasaran bidang kesehatan yang terdapat pada RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1.
Sasaran Strategis Jangka Menengah Renstra SKPD 2013-2018

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	Angka Kematian Bayi		21 per 1.000 kelahiran hidup	20,5 per 1.000 kelahiran hidup	20 per 1.000 kelahiran hidup	19,5 per 1.000 kelahiran hidup	19 per 1.000 kelahiran hidup	19 per 1.000 kelahiran hidup
2	Angka Kematian Ibu (AKI)		263 per 100.000 kelahiran hidup	258 per 100.000 kelahiran hidup	250 per 100.000 kelahiran hidup	242 per 100.000 kelahiran hidup	235 per 100.000 kelahiran hidup	235 per 100.000 kelahiran hidup
3	Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk dan Kurang		22%	21,5%	21%	20,5%	20%	20%
4	Umur Harapan Hidup		71,7 thn	71,8 thn	71,9 thn	71,10 thn	72 thn	72 thn

Tabel 6.2.
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan								
1	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	52%	90%	91%	92%	93%	94%	94%
2	Jumlah RSU dan Puskesmas yg melaksanakan pelayanan Kefarmasian sesuai standar.	10 RSUD	12 RSU & 6 Pusk	14 RSU & 12 Pusk	16 RSU & 18 Pusk	18 RSU & 24 Pusk	20 RSU & 30 Pusk	20 RSU & 30 Pusk
3	Persentase penggunaan obat rasional (POR) di sarana pelayanan kesehatan dasar.		36%	38%	40%	42%	44%	44%
4	Persentase sarana sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan GMP (Good Manufacturing Practise) dan GDP (Good Distribution Practise)		62%	64%	66%	68%	70%	70%
5	Persentase IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) yang bersertifikat		15%	20%	25%	30%	35%	35%
6	Persentase sarana produk alat kesehatan dan PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) yang memenuhi persyaratan GMP (Good Manufacturing Practise) dan GDP (Good Distribution Practice)	77,80%	62%	64%	66%	68%	70%	70%
Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
7	Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan.	74,2%	86%	87%	88%	89%	90%	90%

8	Cakupan pelayanan antenatal (K4)	71,9%	90%	91%	92%	93%	94%	94%
9	Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani		75%	76%	77%	78%	79%	79%
10	Cakupan pelayanan ibu nifas		86%	87%	88%	89%	90%	90%
11	Jumlah Puskesmas Rawat Inap yg mampu PONED.	82%	140 Pusk	143 Pusk	146 Pusk	149 Pusk	152 Pusk	152 Pusk
12	Cakupan kunjungan neonatus (KN Lengkap)	80%	86%	87%	88%	89%	90%	90%
13	Cakupan kunjungan bayi		88%	89%	90%	91%	92%	92%
14	Cakupan pelayanan anak balita		85%	86%	87%	88%	89%	89%
15	Cakupan penjangkauan siswa SD dan setingkat		84%	86%	87%	88%	89%	89%
16	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kes reproduksi terhadap wanita dan remaja.	35%	161 Pusk	166 Pusk	171 Pusk	176 Pusk	181 Pusk	181 Pusk
17	Jumlah puskesmas santun usila yang terbentuk di Kab/Kota	77 Pusk	70 pusk	75 pusk	80 pusk	85 pusk	90 pusk	90 pusk
18	Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut.	65%	62%	64%	66%	68%	70%	70%
19	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standard	300 Pusk	347 Pusk	380 Pusk	413 Pusk	446 Pusk	479 Pusk	479 Pusk
20	Jumlah puskesmas DTPK/ DBK yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standard	42 Pusk	40 Pusk	42 Pusk	44 Pusk	46 Pusk	48 Pusk	48 Pusk
21	Jumlah puskesmas yang terakreditasi		15 Pusk	20 Pusk	30 Pusk	40 Pusk	50 Pusk	50 Pusk
22	Jumlah puskesmas yang menerapkan manajemen puskesmas sesuai standard		33 Pusk	66 Pusk	99 Pusk	132 Pusk	165 Pusk	165 Pusk
23	Jumlah puskesmas yang menerapkan pelayanan kesehatan dasar sesuai standard	22 Pusk	33 Pusk	66 Pusk	99 Pusk	132 Pusk	165 Pusk	165 Pusk
24	Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 4 puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	57,1%	30%	35%	40%	45%	50%	50%
25	Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 4 puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja.	11 Kab/Kota	17 KK	21 KK	24 KK	28 KK	33 KK	33 KK
26	Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 3 Puskesmas yang melaksanakan kesehatan Olah Raga	5 Kab/Kota	4 KK	8 KK	12 KK	14 KK	18 KK	18 KK
27	Jumlah pesantren yang memiliki poskestren		55 pesantren	60 pesantren	65 pesantren	70 pesantren	80 pesantren	80 pesantren
28	Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 3 puskesmas yang menyelenggarakan program pengembangan (jiwa, indera, dan gigi mulut)	20 Kab/kota	20 KK	24 KK	28 KK	30 KK	33 KK	33 KK
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat								
29	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat.	65 %	55%	57%	59%	61%	65%	65%
30	Jumlah Pos Kesehatan Desa (poskesdes) di Desa/Kel Siaga.		2.770 Unit	2.800 Unit	2.850 Unit	2.900 Unit	2.950 Unit	2.950 Unit
31	Persentase SD yang mempromosikan kesehatan		25%	28%	31%	34%	36%	36%
32	Persentasi Posyandu Purnama dan Mandiri.	48 %	35%	38%	41%	43%	45%	45%
33	Persentase desa siaga aktif.		22%	25%	30%	35%	40%	40%
34	Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 2 desa yang mengembangkan Program Toga		20 K/K	22 K/K	24 K/K	26 K/K	28 K/K	28 K/K
Program Perbaikan Gizi Masyarakat								
35	Persentase gizi buruk yang ditangani.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

36	Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif.	36%	40%	40%	50%	50%	55%	55%
37	Cakupan Rumah Tangga yang mengkonsumsi garam beryodium.	96%	85%	85%	85%	87%	90%	90%
38	Persentase anak 6-59 bulan mendapatkan Vitamin A	78%	80%	80%	81%	82%	83%	83%
39	Persentase Ibu Hamil mendapatkan Fe	80%	70%	71%	74%	78%	80%	80%
40	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
41	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	80%	70%	70%	70%	75%	80%	80%
42	Persentase penyediaan bufferstock MP-ASI untuk bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
43	Persentase ibu hamil KEK dan anemia mendapatkan PMT	55%	40%	45%	48%	50%	55%	55%
Program Lingkungan Sehat								
44	Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan	78%	72%	73%	74%	75%	78%	78%
45	Persentase keluarga menggunakan air bersih.	75%	60%	62%	64%	66%	68%	68%
46	Persentase keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan.	70%	66%	67%	68%	69%	70%	70%
47	Persentase Tempat-tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan.	73%	75%	76%	77%	78%	79%	79%
48	Jumlah Kab/Kota Sehat	30%	7 K/K	8 K/K	9 K/K	10 K/K	11 K/K	11 K/K
49	Jumlah puskesmas yang memiliki klinik sanitasi	45%	297 puskesmas	300 puskesmas	303 puskesmas	306 puskesmas	310 puskesmas	310 puskesmas
50	Persentase air minum yang diperiksa yang memenuhi syarat kesehatan	80%	45%	48%	51%	54%	57%	57%
51	Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan		75%	77%	78%	79%	80%	80%
52	Jumlah RS yang melakukan pengelolaan limbah medis RS		0 RS	28 RS	38 RS	48 RS	58 RS	58 RS
53	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan program penyehatan lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit								
54	Angka Case Detection Rate penyakit TB.	85%	83%	84%	85%	86%	87%	87%
55	Angka keberhasilan pengobatan TB.	96%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%
56	Angka CNR (Case Notification Rate) program TB per 100.000 penduduk		165/100.000 pendk	170/100.000 pendk	175/100.000 pendk	180/100.000 pendk	185/100.000 pendk	185/100.000 pendk
57	Cakupan Penemuan dan tata laksana kasus Pneumonia pada balita	10,04%	20%	25%	30%	35%	40%	40%
58	Angka Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 penduduk	0,72/1.000 penddk	<5/100.000 pddk	<5/100.000 pddk	<5/100.000 pddk	<5/100.000 pddk	<5/100.000 pddk	<5/100.000 pddk
59	Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sosialisasi hepatitis B		5 K/K	10 K/K	15 K/K	20 K/K	25 K/K	25 K/K

60	CFR diare pada saat Kejadian Luar Biasa (KLB)		< 1,2%	< 1,2%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%
61	Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sosialisasi demam thypoid		10 K/K	20 K/K	30 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K
62	Prevalensi Kecacingan pada anak sekolah		<20%	<20%	<20%	<20%	<20%	<20%
63	Angka Kecamatan Tingkat 2 Kusta		<10%	<10%	<10%	<10%	<5%	<5%
64	Jumlah penduduk kelompok usia > 15 tahun yang mengikuti test HIV		12.000 org	13.000 org	14.000 org	15.000 org	16.000 org	16.000 org
65	Persentase ibu hamil HIV positif mendapatkan ARV		50%	60%	70%	75%	80%	80%
66	Persentase kasus IMS yang diperiksa dan diobati.		40%	55%	70%	75%	80%	80%
67	Persentase ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) mendapatn pengobatan ART.		80%	82%	83%	84%	85%	85%
68	Angka Kematian Jemaah Haji kurang dari 2 per 1.000 jemaah haji		<2/1.000 jemaah haji	<2/1.000 jemaah haji	<2/1.000 jemaah haji	<2/1.000 jemaah haji	<2/1.000 jemaah haji	<2/1.000 jemaah haji
69	Angka penemuan kasus baru Frambusia /100.000 penduduk		<0,6/100.000 pddk	<0,6/100.000 pddk	<0,6/100.000 pddk	<0,6/100.000 pddk	<0,6/100.000 pddk	<0,6/100.000 pddk
70	Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk	14,68/100.000 pddk	49/100.000 pendk	48/100.000 pendk	47/100.000 pendk	46/100.000 pendk	45/100.000 pendk	45/100.000 pendk
71	Angka zoonosis lainnya (flu burung, rabies, anthrax, leptospirosis) yang ditangani sesuai standard		90%	92%	94%	95%	> 95%	> 95%
72	Cakupan penduduk di daerah endemis mendapatkan pengobatan massal filariasis		65%	68%	70%	72%	75%	75%
73	Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk (API)	0,72/1.000 pddk	1/1.000 pddk	0,9/1.000 pddk	0,8/1.000 pddk	0,7/1.000 pddk	0,6/1.000 pddk	0,6/1.000 pddk
74	Persentase desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI).	74,2%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
75	Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	78,4%	85%	88%	90%	92%	95%	95%
76	Persentase anak sekolah usia dasar (BIAS) yang mendapatkan imunisasi.	94,0%	92%	93%	94%	95%	96%	96%
77	Angka Non Acute Flaccid (AFP) pada anak usia <15 tahun per 100.000 pddk	9/100.000 Penddk	> 2/100.000	> 2/100.000	> 2/100.000	> 2/100.000	> 2/100.000	> 2/100.000
78	Persentase Penyelidikan Epidemiologi dan penanggulangan KLB < 24 jam pada desa/kel yang terjadi KLB		100%	100%	100%	100%	100%	100%
79	Persentase kab/kota yang melakukan penanganan dan penanggulangan wabah dan bencana		33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K
80	Persentase kab/kota yg melak sanakan Surveilans Deteksi Dini & KIE Peny Tdk Menular		33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K
81	Jumlah kab/kota yang melaksanakan surveilans dan KIE kesehatan matra.		33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K
Program Upaya Kesehatan Perorangan								
82	Jumlah RSUD yang menyelenggarakan (PONEK).	20 RSUD	21 RSUD	24 RSUD	27 RSUD	30 RSUD	34 RSUD	34 RSUD
83	Jumlah RSUD yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standard		21 RSUD	24 RSUD	27 RSUD	30 RSUD	34 RSUD	34 RSUD
84	Jumlah RSUD yang menerapkan	9 RSUD	8 RSUD	11 RSUD	13 RSUD	15 RSUD	17 RSUD	17 RSUD

	PPK- BLUD							
85	Jumlah RSUD yg menerapkan SPM Rumah Sakit		21 RSUD	23 RSUD	25 RSUD	29 RSUD	34 RSUD	34 RSUD
86	Jumlah RSUD yg melaksanakan program keselamatan pasien		6 RSUD	10 RSUD	14 RSUD	18 RSUD	20 RSUD	20 RSUD
87	Jumlah rumah sakit yang terakreditasi		78 RS	82 RS	86 RS	90 RS	94 RS	94 RS
88	Jumlah rumah sakit yang mendapat kan penetapan kelas rumah sakit	51%	135 RS	155 RS	175 RS	195 RS	205 RS	205 RS
89	Jumlah RS yg menerapkan standard sarana dan prasarana	40%	92 RS	102 RS	112 RS	122 RS	132 RS	132 RS
Program Sumberdaya Kesehatan								
90	Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi		90%	95%	95%	95%	95%	95%
91	Persentase penetapan angka kredit jabatan fungsional		20%	30%	70%	80%	100%	100%
92	Jumlah pelatihan kesehatan aparatur dan non aparatur yang diakreditasi	20 Pelatihan	20 pelatihan	25 pelatihan	30 pelatihan	35 pelatihan	40 pelatihan	40 pelatihan
93	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Saka Bakti Husada (SBH)	33 Kab/Kota	14 K/K	20 K/K	24 K/K	29 K/K	33 K/K	33 K/K
94	Persentase RSUD yang memenuhi standard ketenagaan dokter spesialis penunjang		50%	60%	70%	80%	100%	100%
95	Ratio tenaga medis per puskesmas	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1
Program Manajemen dan Kebijakan Kesehatan								
96	Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan	100%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
97	Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan		60%	70%	82%	90%	95%	95%
98	Jumlah Kabupaten/Kota yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)		5 K/K	11 K/K	17 K/K	24 K/K	30 K/K	30 K/K
99	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran dan kesehatan yang dihasilkan per tahun	3 Dokumen	5 dok/thn	5 dok/thn	5 dok/thn	5 dok/thn	5 dok/thn	5 dok/thn
100	Jumlah dokumen monitoring, pengendalian dan evaluasi yang dihasilkan per tahun	7 Dokumen	7 dok/thn	7 dok/thn	7 dok/thn	7 dok/thn	7 dok/thn	7 dok/thn
101	Persentase Kab/Kota memiliki Profil Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
102	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota
Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan								
103	Jumlah penelitian dan pengembangan kesehatan yang dilaksanakan		3 penelitian	6 penelitian	9 penelitian	12 penelitian	15 penelitian	15 penelitian

BAB VII PENUTUP

Dokumen Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 adalah merupakan Rencana strategis yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang strategis kurun waktu 2013-2018. Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 ini telah melalui proses penyusunan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 dan juga memperhatikan dokumen perencanaan lain yang terkait serta Dokumen RTRW provinsi Sumatera Utara 2013-2018 dan atas kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera 2013-2018 selanjutnya dijadikan sebagai landasan bagi penyusunan rencana kerja program dan kegiatan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara lima tahun kedepan sehingga pembangunan kesehatan dalam rangka pencapaian visi Gubernur Sumatera Utara yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 dapat tercapai.

Dokumen ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam memajukan kesehatan masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Disamping itu juga Renstra ini akan dijadikan juga sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara lima tahun kedepan.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
SKPD DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA 2013-2018

(dalam juta)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Unit capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1			Tahun 2			Tahun 3			Tahun 4					
							Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Dinas Kesehatan				192.215		232.415		395.215		325.215		344.215		1.489.275			
			1 02 1 02 01 01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	10.939	100%	14.184	100%	21.993	100%	19.757	100%	20.839	100%	87.712	Dinkes Provsu dan UPT		
			1 02 1 02 01 01	2	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	12 bulan	850	12 bulan	1.395	12 bulan	1.900	12 bulan	1.900	12 bulan	1.900	100%	7.945	Dinkes Provsu dan UPT		
			1 02 1 02 01 01	3	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	900	12 bulan	950	12 bulan	1.400	12 bulan	1.390	12 bulan	1.390	100%	6.030	Dinkes Provsu dan UPT		
			1 02 1 02 01 01	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran honorarium pengelola kegiatan dan tenaga honor/dukacabang	12 bulan	800	12 bulan	1.400	12 bulan	2.500	12 bulan	1.974	12 bulan	1.974	100%	8.648	Dinkes Provsu dan UPT		
			1 02 1 02 01 01	5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya peralatan kebutuhan kebersihan kantor	12 bulan	1.000	12 bulan	1.350	12 bulan	2.204	12 bulan	2.204	12 bulan	2.204	100%	8.962	Dinkes Provsu dan UPT		
			1 02 1 02 01 01	6	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan	589	12 bulan	589	12 bulan	589	12 bulan	589	12 bulan	589	100%	2.945	Dinkes Provsu dan UPT		
			1 02 1 02 01 01	7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	950	12 bulan	1.600	12 bulan	1.800	12 bulan	1.800	12 bulan	1.832	100%	7.982	Dinkes Provsu dan UPT		
			1 02 1 02 01 01	8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	1.000	12 bulan	1.200	12 bulan	2.800	12 bulan	1.800	12 bulan	2.300	100%	9.100	Dinkes Provsu dan UPT		
			1 02 1 02 01 01	9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	350	12 bulan	400	12 bulan	700	12 bulan	700	12 bulan	800	100%	2.950	Dinkes Provsu dan UPT		
			1 02 1 02 01 01	10	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya rapat-rapat rutin	12 bulan	1.000	12 bulan	1.200	12 bulan	1.600	12 bulan	1.300	12 bulan	1.300	100%	6.400	Dinkes Provsu dan UPT		
			1 02 1 02 01 01	11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	600	12 bulan	900	12 bulan	1.500	12 bulan	1.500	12 bulan	1.800	100%	6.300	Dinkes Provsu dan UPT		
			1 02 1 02 01 01	12	Pengembalian jasa medik	Terlaksananya jasa medis petugas kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	12 bulan	800	12 bulan	800	12 bulan	800	12 bulan	800	12 bulan	800	100%	4.000	Dinkes Provsu dan UPT		
			1 02 1 02 01 01	13	Penyediaan alat-alat kebersihan kantor	Terlaksananya alat-alat kebersihan kantor	12 bulan	400	12 bulan	400	12 bulan	400	12 bulan	400	12 bulan	400	100%	2.000	Dinkes Provsu dan UPT		
			1 02 1 02 01 01	14	Penyediaan jasa keamanan	Terlaksananya pembayaran jasa pengamanan dan supir kantor	12 bulan	1.000	12 bulan	1.150	12 bulan	2.000	12 bulan	1.600	12 bulan	1.750	100%	7.500	Dinkes Provsu dan UPT		
			1 02 1 02 01 01	15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 bulan	700	12 bulan	850	12 bulan	1.800	12 bulan	1.800	12 bulan	1.800	100%	6.950	Dinkes Provsu dan UPT		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rasio Luas kantor/jumlah aparatur	10 m ² /perso no	75%	9.572	76%	11.486	77%	18.064	78%	16.086	79%	17.126	80%	72.334	Dinkes Provsu dan UPT			
				Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional		2 Unit	500	3 Unit	700	3 Unit	750	14 Unit	835		500	80%	3.285	Dinkes Provsu dan UPT			
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhi kebutuhan peralatan gedung kantor			1.000	8 Unit	1.500	8 Unit	1.700	8 Unit	2.650	8 Unit	706	80%	7.556	Dinkes Provsu dan UPT			
				Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Terpenuhi perlengkapan gedung kantor			1.200	8 Unit	1.800	8 Unit	750	8 Unit	750	8 Unit	850	80%	5.350	Dinkes Provsu dan UPT			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			1.000	8 Unit	1.686	8 Unit	500	8 Unit	1.087	8 Unit	800	80%	5.073	Dinkes Provsu dan UPT			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			2.000	8 Unit	2.000	8 Unit	1.264	8 Unit	264	8 Unit	770	80%	6.298	Dinkes Provsu dan UPT			
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			2.372	8 Unit	2.300	8 Unit	600	8 Unit	1.000	8 Unit	1.000	80%	7.272	Dinkes Provsu dan UPT			
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	1.000	12 bulan	1.000	12 bulan	1.000	12 bulan	1.000	12 bulan	1.000	95%	5.000	Dinkes Provsu dan UPT			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhi kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	500	12 bulan	500	12 bulan	500	12 bulan	500	12 bulan	500	95%	2.500	Dinkes Provsu dan UPT			
				Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor						1 Unit	11.000	1 Unit	8.000	1 Unit	11.000	80%	30.000	Dinkes Provsu dan UPT			
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	90%	95%	724	92%	868	95%	1.366	97%	1.216	98%	1.295	98%	5.469	Dinkes Provsu dan UPT			
				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian PDH Provinsi bagi pegawai		100%	724	100%		100%	900	100%	516	100%		100%	2.140	Dinkes Provsu dan UPT			
				Pengadaan pakaian KORPRI	Tersedianya pakaian KORPRI bagi pegawai								100%	700	100%		100%	700	Dinkes Provsu dan UPT			
				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian dinas hari-hari tertentu		100%		100%	864	100%	466	100%		100%	1.295	100%	2.625	Dinkes Provsu dan UPT			
				Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	30 Org	30 Org	1.015	30 Org	1.218	30 Org	1.916	30 Org	1.706	30 Org	1.816	98%	7.672	Dinkes Provsu dan UPT			
				Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi tenaga kesehatan	30 Org	30 Org	1.015	30 Org	1.218	30 Org	1.516	30 Org	1.206	30 Org	1.316	98%	6.272	Dinkes Provsu dan UPT			
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan						1 Keg	300	1 Keg	300	1 Keg	300	100%	900	Dinkes Provsu dan UPT			
				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan						1 Keg	200	1 Keg	200	1 Keg	200	100%	600	Dinkes Provsu dan UPT			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			1 02 1 02 01 05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan		90%	-	95%	300	97%	472	98%	447	98%	1.639		Dinkes Provsu dan UPT				
			1 02 1 02 01 05	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			1 Lap	200	1 Lap	272	1 Lap	220	1 Lap	247	100%	939	Dinkes Provsu dan UPT				
			1 02 1 02 01 05	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran			2 Lap	100	2 Lap	200	2 Lap	200	2 Lap	200	100%	700	Dinkes Provsu dan UPT				
			1 0 01 02 01 06	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	52%	90%	11.746	91%	20.820	92%	31.430	93%	41.185	94%	41.800	100%	146.981				
			1 02 01 02 01 06	Pengadaan obat buffer stock Provinsi dan VAR (Vaksin Anti Rabies)	Terpenuhi kebutuhan obat buffer stock provinsi dan pengadaan VAR		12 bulan	6.000	12 bulan	11.000	12 bulan	25.000	12 bulan	30.000	12 bulan	35.000	12 bulan	107.000	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 06	Pertemuan pengelolaan dan evaluasi obat, vaksin dan perbekalan kesehatan	Tersedianya data, meningkatnya pengetahuan pengelolaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan		33 Kab/Kota	514	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	1.314	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 06	Operasional Pengelolaan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya operasional pengelolaan program Obat dan Perbekalan Kesehatan		70 orang	5	70 orang	10	70 orang	10	70 orang	10	70 orang	10	70 orang	45	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 06	Pertemuan e-logistik bagi petugas kab/kota	Terlaksananya e-logistik bagi petugas kab/kota			33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	220	33 Kab/Kota	240	33 Kab/Kota	240	33 Kab/Kota	900	Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 06	Pertemuan pemutakhiran data kefarmasian dan alat kesehatan tingkat provinsi	Tersedianya data kefarmasian dan alat kesehatan				33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	400	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 06	Pertemuan Perencanaan terpadu obat dan perbekalan kesehatan	Tersedianya data dan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan				33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	155	33 Kab/Kota	160	33 Kab/Kota	465	Dinkes Provsu			
	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap obat, alat kesehatan dan pangan yang tidak sesuai standar				Persentase Penggunaan Obat Rasional (POR) di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar		36%		38%		40%		42%		0,44							
			1 02 01 02 01 06	Pertemuan/Sosialisasi Software Penggunaan Obat Rasional di Sarana Pelayanan Kesehatan	Terlatihnya petugas untuk aplikasi software penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan dasar	1 Keg	1 Keg	212	1 Keg	150	1 Keg	150	1 Keg	150	1 Keg	150		812	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 06	Sosialisasi /Pertemuan Penggunaan Obat Generik di Sarana Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya penggunaan obat generik di sarana pelayanan kesehatan	71 Org	71 Org	200										200	Dinkes Provsu			

Tujuan	Sasaran	Indikator-Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			1 02 01 02 01 06	9	Pertemuan Penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan dasar	Terlaksananya penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan dasar	33 Kab/Kota	200 Kab/Kota	33 Kab/Kota	200 Kab/Kota	33 Kab/Kota	200 Kab/Kota	33 Kab/Kota	200 Kab/Kota	33 Kab/Kota	200	1.000		Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 06	10	Pertemuan Penggunaan Antibiotik bagi tenaga kesehatan	Terlaksananya pertemuan penggunaan antibiotik bagi tenaga kesehatan kab/kota	33 Kab/Kota	200 Kab/Kota	33 Kab/Kota	150 Kab/Kota	33 Kab/Kota	150 Kab/Kota	33 Kab/Kota	150 Kab/Kota	33 Kab/Kota	150	800		Dinkes Provsu			
						Persentase sarana sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan GMP (Good Manufacturing Practice) dan GDP (Good Distribution Practice)	62%		64%		66%		68%		70%							
			1 02 01 02 01 06	11	Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Sediaan Farmasi	Terlaksananya petugas kab/kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sediaan farmasi	33 Kab/Kota	115 Kab/Kota	33 Kab/Kota	150 Kab/Kota	33 Kab/Kota	150 Kab/Kota	33 Kab/Kota	150 Kab/Kota	33 Kab/Kota	150	715		Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 06	12	Pertemuan dalam Rangka CPOB	Terlaksananya cara pembuatan obat tradisional yang baik di sarana produksi obat tradisional	55 Sarana	140 Sarana	55 Sarana	150 Sarana	55 Sarana	150 Sarana	55 Sarana	150 Sarana	55 Sarana	150	740		Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 06	13	Biaya Operasional Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)	Teroperasinya alat pengolahan pasca panen tanaman obat	30 Ton simplisia tanaman obat	450 simplisia tanaman obat	30 Ton simplisia tanaman obat	500 simplisia tanaman obat	30 Ton simplisia tanaman obat	500 simplisia tanaman obat	30 Ton simplisia tanaman obat	500 simplisia tanaman obat	30 Ton simplisia tanaman obat	500	2.450		Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 06	14	Peningkatan sarana dan prasarana Pusat Pasca Panen Tanaman Obat	Teroperasinya alat pengolahan pasca panen tanaman obat	30 Ton simplisia tanaman obat	200 simplisia tanaman obat	30 Ton simplisia tanaman obat	200 simplisia tanaman obat	30 Ton simplisia tanaman obat	220 simplisia tanaman obat	30 Ton simplisia tanaman obat	220 simplisia tanaman obat	30 Ton simplisia tanaman obat	240	860		Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 06	15	Review Penerapan Sistem Pelaporan Narkotika, Psikotropika	Tersedianya data penggunaan sediaan Narkotika dan psikotropika	30 Ton simplisia tanaman obat	120 simplisia tanaman obat	30 Ton simplisia tanaman obat	200 simplisia tanaman obat	30 Ton simplisia tanaman obat	220 simplisia tanaman obat	30 Ton simplisia tanaman obat	220 simplisia tanaman obat	30 Ton simplisia tanaman obat	240	1.000		Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 06	16	Pertemuan dan evaluasi system pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor tingkat provinsi	Termonitornya penggunaan narkotika, psikotropika dan prekursor disarana pelayanan kesehatan	30 Ton simplisia tanaman obat		30 Ton simplisia tanaman obat	200 simplisia tanaman obat	30 Ton simplisia tanaman obat	220 simplisia tanaman obat	30 Ton simplisia tanaman obat	240 simplisia tanaman obat	30 Ton simplisia tanaman obat	260	920		Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 06	17	Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program Dalam Rangka Penggunaan P4TO	Terselenggaranya koordinasi penggunaan P4TO antar lintas sektor dan lintas program	30 Ton simplisia tanaman obat	100 simplisia tanaman obat	30 Ton simplisia tanaman obat	160 simplisia tanaman obat	30 Ton simplisia tanaman obat	160 simplisia tanaman obat	30 Ton simplisia tanaman obat	160 simplisia tanaman obat	30 Ton simplisia tanaman obat	160	740		Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 06	18	Pertemuan dalam rangka CDDB (Cara Distribusi Obat yang baik)	Terlaksananya pertemuan CDDB	30 Ton simplisia tanaman obat		30 Ton simplisia tanaman obat	150 simplisia tanaman obat	30 Ton simplisia tanaman obat	150 simplisia tanaman obat	30 Ton simplisia tanaman obat	150 simplisia tanaman obat	30 Ton simplisia tanaman obat	150	600		Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 06	19	Pemetaan Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan farmasi	terpetaknya Sarana produksi dan Distribusi Sediaan farmasi	30 Ton simplisia tanaman obat		30 Ton simplisia tanaman obat	100 simplisia tanaman obat	30 Ton simplisia tanaman obat	100 simplisia tanaman obat	30 Ton simplisia tanaman obat	100 simplisia tanaman obat	30 Ton simplisia tanaman obat	100	400		Dinkes Provsu			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Unit capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			1 02 01 02 01 06 20	Pembinaan petugas pengelola pasca panen tanaman obat	Terlaksananya pembinaan petugas pengelola pasca panen tanaman obla	30 Ton simplisia tanaman obat	30 Ton simplisia tanaman obat	30 Ton simplisia tanaman obat	30 Ton simplisia tanaman obat	160	30 Ton simplisia tanaman obat	180	30 Ton simplisia tanaman obat	200	30 Ton simplisia tanaman obat	220		760	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 06 21	Pertemuan dalam rangka CPKB (Cara Produksi Kosmetik yang Baik)	Terlaksananya pertemuan dalam rangka CPKB	30 Ton simplisia tanaman obat	30 Ton simplisia tanaman obat	30 Ton simplisia tanaman obat	30 Ton simplisia tanaman obat	150	30 Ton simplisia tanaman obat	200	30 Ton simplisia tanaman obat	200	30 Ton simplisia tanaman obat	200		750	Dinkes Provsu			
					Persentase IRTP (Industri Rumah tangga pangan) yang bersertifikat		15%		20%		25%		30%		35%							
			1 02 01 02 01 06 22	Pelatihan Tenaga penyuluh Keamanan pangan (PKP)	Terlathnya tenaga penyuluh yang bersertifikat	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	150		750	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 06 23	Pembinaan makanan jajanan anak sekolah	Terlaksananya pembinaan makanan jajanan anak sekolah di sekolah dasar	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	140	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota		140	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 06 24	Pertemuan Petugas Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) dan guru tentang Makanan Jajanan Anak Sekolah	Tersedianya MJAS yang sehat	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	150		600	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 06 25	Sosialisasi Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS) di kab/kota	Tersedianya MJAS yang sehat	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	250	33 Kab/Kota	250	33 Kab/Kota	250	33 Kab/Kota	250		1.000	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 06 26	Pembinaan ke Sarana Industri Rumah tangga Pangan (IRT)	Terlaksananya proses produksi di sarana IRT	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	150		600	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 06 27	Pembinaan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan ke sarana Industri Rumah tangga Pangan (IRT)	Terlaksananya keamanan bahan tambahan dalam proses produksi di sarana IRT	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	200		800	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 06 28	Pertemuan dalam rangka CPPB-IRT (Cara Produksi Pangan Yang Baik Industri Rumah Tangga)	Terlaksananya pertemuan CPPB-IRT	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	150		600	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 06 29	Pembinaan Cara Produksi Pangan yang baik-Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) ke sarana Industri Rumah Tangga pangan (IRT)	Terlaksananya pelaksanaan CPPB-IRT	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	150		600	Dinkes Provsu			
					Persentase sarana produk alat kesehatan dan PKRT (Perbekalan kesehatan Rumah tangga) yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat		15%		20%		25%		30%		35%							
			1 02 01 02 01 06 30	Pertemuan tentang CPKB (Cara Produksi Alat Kesehatan yang Baik) dan CPPKTB (Cara Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik)	Terlaksananya cara pembuatan alkes dan PKRT yang baik di sarana produksi alkes dan PKRT	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	150	1 Keg	150	1 Keg	150	1 Keg	150		700	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 06 31	Sosialisasi Cara Distribusi Alat Kesehatan yang baik	Terlaksananya cara distribusi alkes yang baik di sarana distribusi alkes	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	100	33 Kab/Kota	120	33 Kab/Kota	140	33 Kab/Kota	160	33 Kab/Kota	180		700	Dinkes Provsu			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			1 02 01 02 01 06 32	Pertemuan Linas sektor dalam rangka Peningkatan Produksi alat kesehatan dalam negeri	Terlaksananya peningkatan produksi dan alat kesehatan dalam negeri	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	200 Kab/Kota	33 Kab/Kota	220 Kab/Kota	33 Kab/Kota	240 Kab/Kota	33 Kab/Kota	260 Kab/Kota	33 Kab/Kota	280 Kab/Kota	33 Kab/Kota	1.200	Dinkes Provsu			
					Jumlah RSU dan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	30 RSU, 20 Pusk	12 RSU, 6 Pusk				14 Pusk, 12 Pusk		16 RSU, 18 Pusk		18 RSU, 24 Pusk							
			1 02 01 02 01 06 33	Pilot Project Pelayanan Kefarmasian di RSUD	Terlaksananya pelayanan kefarmasian di RSUD sesuai standar	1 Keg	1 Keg	200 1 Keg	250 1 Keg			300 1 Keg	350 1 Keg		400			1.500	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 06 34	Peningkatan Instalasi farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumut		1 Pt	1 Pt	2.400 1 Pt	4.000 1 Pt			1 Pt	5.000 1 Pt					11.400	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 06 35	Pertemuan Pilot Project Pelayanan Kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan dasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan dasar Kabupaten/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	200 Kab/Kota	33 Kab/Kota	200 Kab/Kota	33 Kab/Kota	200 Kab/Kota	33 Kab/Kota	200 Kab/Kota	33 Kab/Kota	200 Kab/Kota	33 Kab/Kota	800	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 06 36	Pertemuan pilot Project Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Rawat Inap	Terlaksananya pelayanan kefarmasian sesuai standar			33 Kab/Kota	200 Kab/Kota		33 Kab/Kota	220 Kab/Kota	33 Kab/Kota	240 Kab/Kota	33 Kab/Kota	260 Kab/Kota	33 Kab/Kota	920	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 06 37	Pertemuan pemutakhiran data Rumah Sakit Umum yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Tersedianya data Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar			33 Kab/Kota	150 Kab/Kota		33 Kab/Kota	150 Kab/Kota	33 Kab/Kota	150 Kab/Kota	33 Kab/Kota	150 Kab/Kota	600	Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 06 38	Pertemuan tenaga kefarmasian untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Terlaksananya pertemuan kefarmasian sesuai standar di sarana pelayanan kesehatan			33 Kab/Kota	150 Kab/Kota		33 Kab/Kota	150 Kab/Kota	33 Kab/Kota	150 Kab/Kota	33 Kab/Kota	150 Kab/Kota	600	Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 06 39	Pertemuan advokasi pelayanan kefarmasian di Kabupaten/Kota	Terlaksananya pertemuan advokasi pelayanan kefarmasian di Kabupaten/Kota			33 Kab/Kota	150 Kab/Kota		33 Kab/Kota	150 Kab/Kota	33 Kab/Kota	150 Kab/Kota	33 Kab/Kota	150 Kab/Kota	600	Dinkes Provsu				
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas terjangkau	Meningkatnya ketersediaan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas terjangkau	Jumlah puskesmas yang menerapkan pelayanan kesehatan dasar sesuai standar menjadi 479 Puskesmas tahun 2018	1 0 01 02 01 07 2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan antenatal (KN)	85%	90%	4.721	91%	10.716	92%	31.620	93%	33.217	94%	39.372	94%	127.646				
					Jumlah Puskesmas yang menerapkan manajemen Puskesmas sesuai standar	33 Pusk		66 Pusk			99 Pusk		132 Pusk		165 Pusk							
			1 02 01 02 01 07 1	Penguatan Pembinaan Manajemen Puskesmas	Meningkatnya Jumlah Puskesmas menjadi BLUD	33 Kab/Kota	900 Kab/Kota	33 Kab/Kota	310 Kab/Kota	33 Kab/Kota	310 Kab/Kota	33 Kab/Kota	310 Kab/Kota	33 Kab/Kota	310 Kab/Kota	33 Kab/Kota	310 Kab/Kota	2.140	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 07 2	Pemantauan Manajemen di Pelayanan Kesehatan Primer di Kab/Kota	Terlaksananya manajemen Puskesmas dalam pelayanan kesehatan primer			33 Kab/Kota	750 Kab/Kota		33 Kab/Kota	1.905 Kab/Kota	33 Kab/Kota	1.827 Kab/Kota	33 Kab/Kota	4.000 Kab/Kota	33 Kab/Kota	8.482	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 07 3	Pembinaan dan Monitoring dan Monitoring Terpadu	Terlaksananya pembinaan dan Monitoring Puskesmas terpadu			33 Kab/Kota	170 Kab/Kota		33 Kab/Kota	230 Kab/Kota	33 Kab/Kota	170 Kab/Kota	33 Kab/Kota	170 Kab/Kota	33 Kab/Kota	740	Dinkes Provsu			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif bagi ibu, balita, anak sekolah dan remaja, usia produktif dan usia lanjut	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan terhadap persalinan ditolong ibu, bayi, balita serta pelayanan kesehatan yang maternal, bayi, responsive gender	Cakupan pertolongan persalinan ditolong tenaga kesehatan menjadi 90% pada Tahun 2018	1 02 01 02 01 07 4	Pemantapan Dokter di Pelayanan Kesehatan Primer dalam Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Kota	Tersedianya dokter puskesmas mantap dalam era JKN		33	Kab/Kota a	150	Kab/Kota a	33	Kab/Kota	200	Kab/Kota	33	Kab/Kota a	200	Kab/Kota	750	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 07 5	Pertemuan Pelayanan Primer di Puskesmas Perkotaan Kab/Kota	Terlaksananya pertemuan pelayanan primer di Puskesmas Kab/Kota		33	Kab/Kota	150	Kab/Kota	33	Kab/Kota	200	Kab/Kota	33	Kab/Kota a	250	Kab/Kota	800	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 07 6	Pendampingan persiapan pelayanan kesehatan Primer Kab/Kota menuju BLUD	Terbentuknya pelayanan kesehatan primer BLUD di Kab/Kota		33	Kab/Kota a	700	Kab/Kota	33	Kab/Kota	700	Kab/Kota	33	Kab/Kota a	700	Kab/Kota	2.800	Dinkes Provsu			
					Jumlah Puskesmas yang telah Terakreditasi		15 Pusk		20 Pusk		30 Pusk		40 Pusk		50 Pusk								
			1 02 01 02 01 07 7	Persiapan Akreditasi di Pelayanan Primer di Kabupaten/Kota	Terlaksananya pertemuan akreditasi Puskesmas				280		400		500		500				1.180	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 07 8	Pertemuan Pembentukan Tim Akreditasi Puskesmas di kabupaten Kota	Terbentuk tim akreditasi Puskesmas				200		200		200		200				800	Dinkes Provsu			
					Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan		86%		87%		88%		89%		9%								
			1 02 01 02 01 07 9	Supervisi Fasilitas P4K bagi Bidan Koordinator Puskesmas	Tersedianya tenaga yang mampu melaksanakan supervisi fasilitatif			170		200		400		500		500				1.770	Dinkes Provsu		
			1 02 01 02 01 07 10	Implementasi buku KIA, P4K, kantong Persalinan	Terlaksananya kegiatan KIA, P4K dan kantong persalinan di kab/kota			15				200		150		250				615	Dinkes Provsu		
			1 02 01 02 01 07 11	Pertemuan Evaluasi dan Orientasi P4K	Terlaksananya Program P4K di Kab/Kota					150		400		250		300				1.100	Dinkes Provsu		
	Umur harapan Hidup		1 02 01 02 01 07 12	Pertemuan percepatan MDGs dengan Lintas Sektor	Tersusunnya dokumen strategi jassa MDGs													650	Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 07 13	Orientasi penyipta petugas dalam penyediaan rumah tunggu persalinan	Meningkatnya jumlah rumah tunggu persalinan					160		500		400		500		1.560	Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 07 14	Pelaksanaan DTIS KIBBLA	Terlaksananya program KIBBLA di Kab/Kota					250		2.000		1.500		3.000		6.750	Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 07 15	Bimbingan teknis Paska Pelatihan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas		86%		87%		88%		89%		0,9				640	Dinkes Provsu			

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
			1 02 01 02 01 07 25	Pemantapan PONED didaerah Fokus MDGs	Meningkatnya jumlah Puskesmas mantap PONED		9 Kab/Kota	365	9 Kab/Kot	476	9 Kab/Kota	700	9 Kab/Kota	800	9 Kab/Kot	900	9 Kab/Kota	3.241	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 07 26	Refreeshing PONED (Penanganan Obstetri Neonatal Emergenasi Dasar)	Terlaksananya penyegaran terhadap petugas Puskesmas yang sudah pernah dilatih PONED		33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kot	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kot	200	33 Kab/Kota	800	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 07 27	Supervisi Terpadu Pelayanan Penanganan Obstetri Neonatal Emergenasi Dasar (PONED)	Terlaksananya supervisi terhadap Puskesmas mampu PONED		33 Kab/Kot	100	33 Kab/Kot	100	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	250	33 Kab/Kot	300	33 Kab/Kota	850	Dinkes Provsu					
					Cakupan pelayanan antenatal care (K4)	71,90%	90%		91%		92%		93%		0,94									
			1 02 01 02 01 07 28	Evaluasi data cakupan Indikator Kesehatan Ibu dan Anak	Terevaluasinya pencatatan dan pelaporan cakupan indikator program KIA		33 Kab/Kota	120			33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kot	200	33 Kab/Kota	720	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 07 29	Perlombaan Penilaian Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan	Terlaksananya perlombaan dan penilaian kesatuan gerak PKK-KB Kesehatan		25 Kab/Kota	150			25 Kab/Kota	150	25 Kab/Kota	150	25 Kab/Kot	150	25 Kab/Kota	600	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 07 30	Pendampingan Kelas Ibu Hamil di Kab/Kota	Tersedianya fasilitator kelas ibu hamil		9 Kab/Kota	150			9 Kab/Kota	200	9 Kab/Kota	250	9 Kab/Kot	300	9 Kab/Kota	900	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 07 31	Peningkatan Kemampuan Petugas sebagai Fasilitator Kelas Ibu Bayi dan Balita	Tersedianya petugas yang mampu melaksanakan kelas ibu bayi dan balita						33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	250	33 Kab/Kot	300	33 Kab/Kota	750	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 07 32	Pemantapan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)	Tersedianya tenaga yang memahami pelaksanaan PWS-KIA			180		180	6 Kab/Kota	400	20 Kab/Kota	1.000	33 Kab/Kot	800	33 Kab/Kota	2.380	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 07 33	Pengendalian Buku ANC (Antenatal Care) Terpadu	Tersedianya pedoman pelaksanaan ANC Terpadu			1.000 buku		70	2.500 buku	200	3.000 buku	300	3.500 buku	400		970	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 07 34	Orientasi ANC (Ante Nasal Care)	Meningkatnya jumlah petugas mampu ANC						33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kot	200	33 Kab/Kota	600	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 07 35	Pemantapan PWS KIA	Meningkatnya jumlah petugas mantap PWS KIA						33 Kab/Kota	400	33 Kab/Kota	500	33 Kab/Kot	300	33 Kab/Kota	1.200	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 07 36	Rapat Koordinasi LP/LS dalam Pelaksanaan PPIA (Pencegahan Penularan HIV/AIDS dari Ibu Ke Anak)	Terlaksananya pertemuan koordinasi dalam pelaksanaan PPIA			33 Kab/Kot		150	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	220	33 Kab/Kot	200	33 Kab/Kota	770	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 07 37	Workshop Kelas Ibu Hamil	Terlaksananya Kelas Ibu Hamil			7 Kab/Kot		90	14 Kab/Kota	150	14 Kab/Kota	150	14 Kab/Kot	150	14 Kab/Kota	540	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 07 38	Peningkatan Kemampuan Pencegahan Penularan Ibu ke Anak (PPIA) bagi Petugas di Kabupaten/Kota	Tersedianya tenaga mampu melaksanakan PPIA di Puskesmas			10 Kab/Kot		100	10 Kab/Kota	100	10 Kab/Kota	100	10 Kab/Kot	100	10 Kab/Kota	400	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 07 39	Peningkatan kemampuan screening PPIA bagi bidan	Meningkatnya jumlah bidan mampu screening PPA						33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	250	33 Kab/Kot	300	33 Kab/Kota	750	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 07 40	Orientasi PKRT Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu bagi Petugas Puskesmas	Tersedianya petugas yang memahami PKRT		15 Org	70			33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kot	200	33 Kab/Kota	670	Dinkes Provsu					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Uraian capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
			1 02 01 02 01 07 41	Workshop Petugas Kab/Kota Pengrusutamaan Gender Bidang Kesehatan dan Anggaran responsif Gender (ARG)	Terselenggaranya workshop PIUG-BK dan ARG bagi tim PIUG-BK Dinkes Provsu	20 Org	60												Dinkes Provsu					
					Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani	75%			76%															
			1 02 01 02 01 07 42	Orientasi PPGDON (Penanganan Gawat Darurat Obstetri Neonatal)	Terlaksananya penanganan kegawatdaruratan obstetri neonatus di daerah terpencil				10 Kab/Kota a	80	33 Kab/Kota a	300	33 Kab/Kota a	300	33 Kab/Kota a	300	33 Kab/Kota a	980	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 07 43	Evaluasi Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) di Provinsi	Terevaluasinya Audit Maternal Perinatal di Provinsi				33 Kab/Kota a	120	33 Kab/Kota a	200	33 Kab/Kota a	200	33 Kab/Kota a	200	33 Kab/Kota a	720	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 07 44	Peningkatan kapasitas tim Audit Maternal dan Perinatal	Terbentuknya tim AMP Kab/Kota				33 Kab/Kota a	240	33 Kab/Kota a	240	33 Kab/Kota a	240	33 Kab/Kota a	240	33 Kab/Kota a	960	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 07 45	Peningkatan kemampuan petugas dalam manajemen aktif kala III	Meningkatnya Jumlah Petugas kesehatan mampu manajemen aktif kala III				33 Kab/Kota a	300	33 Kab/Kota a	350	33 Kab/Kota a	400	33 Kab/Kota a	450	33 Kab/Kota a	1.500	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 07 46	Peningkatan kemampuan petugas dalam manajemen aktif kala IV bagi ibu nifas	Meningkatnya Jumlah Petugas kesehatan mampu manajemen aktif kala IV				33 Kab/Kota a	250	33 Kab/Kota a	300	33 Kab/Kota a	300	33 Kab/Kota a	300	33 Kab/Kota a	1.150	Dinkes Provsu					
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar	300 Pusk	347 Pusk		380 Pusk			413 Pusk	446 Pusk					479 Pusk						
			1 02 01 02 01 07 47	Pelatihan/pemantauan ATLS Dokter Puskesmas	Terselenggaranya pelatihan ATLS dokter Puskesmas		33 Kab/Kota	250				33 Kab/Kota	400	15 Kab/Kota	200	15 Kab/Kota a	250	33 Kab/Kota	1.100	Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 07 48	Pemantauan PPGD (Pelatihan Penanganan Gawat Darurat) bagi dokter fasilitas pelayanan kesehatan Primer	Meningkatnya jumlah dokter maniap PPGD		33 Kab/Kota	210	10 Kab/Kota a	193	33 Kab/Kota a	400	13 Kab/Kota a	200	13 Kab/Kota a	200	33 Kab/Kota a	1.203	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 07 49	Pemantauan (general Emergency Life Support (GELS) untuk Dokter di Kabupaten/Kota	Tersedianya dokter maniap GELS				33 Kab/Kota a	193	33 Kab/Kota a	200	33 Kab/Kota a	200	33 Kab/Kota a	250	33 Kab/Kota a	843	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 07 50	Advance Cardiac Life Support (ACLS) Dokter di Kabupaten/Kota	Tersedianya dokter dengan ACLS di Kab/kota				33 Kab/Kota a	350	33 Kab/Kota a	400	33 Kab/Kota a	350	33 Kab/Kota a	300	33 Kab/Kota a	1.400	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 07 51	Basic Cardiac Life Support (BCLS) Perawat di Kabupaten Kota	Tersedianya perawat dengan BCLS di Kab/Kota				33 Kab/Kota a	270	33 Kab/Kota a	300	33 Kab/Kota a	300	33 Kab/Kota a	350	33 Kab/Kota a	1.220	Dinkes Provsu					
					Jumlah Puskesmas Yang Menerapkan Pelayanan Kesehatan Dasar Sesuai Standar	22 Pusk	33 Pusk		66 Pusk a			99 Pusk a	132 Pusk			165 Pusk								
			1 02 01 02 01 07 52	Persiapan Perawat Penyelia Perkesmas Terintegrasi dengan PMK di Kab/Kota	Tersedianya Perawat Perkesmas terintegrasi dengan PMK				5 Kab/Kota a	120	5 Kab/Kota a	200	5 Kab/Kota a	200	5 Kab/Kota a	150	20 Kab/Kota a	670	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 07 53	Pertemuan Pelayanan Prima dalam meningkatkan Pelayanan Kesehatan Primer di Era JKN	Terlaksananya pelayanan prima di Puskesmas di Era JKN				33 Kab/Kota a	120	33 Kab/Kota a	200	33 Kab/Kota a	250	33 Kab/Kota a	200	33 Kab/Kota a	770	Dinkes Provsu					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			1 02 01 02 01 07 54	Penguatan peran Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam Mengelola Perkesmas di Pelayanan Kesehatan Primer	Terlaksananya penguatan Dinas Kesehatan kab/Kota dalam mengelola Perkesmas		33	Kab/Kota a	Kab/Kota a	150 33	Kab/Kota	150 33	Kab/Kota	150 33	Kab/Kota a	150 33	Kab/Kota	600	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 07 55	Pertemuan Penerapan Perkesmas di Pelayanan Kesehatan Primer	Terlaksananya pertemuan penerapan Perkesmas di Pelayanan Kesehatan Primer		33	Kab/Kota a	Kab/Kota a	198 33	Kab/Kota	198 33	Kab/Kota	198 33	Kab/Kota a	198 33	Kab/Kota	792	Dinkes Provsu			
					Cakupan Penjangkauan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat		84%		86%		87%		88%		0,89							
			1 02 01 02 01 07 55	Evaluasi Pelaksanaan Penjangkauan Anak Sekolah (SD)	Terlaksananya evaluasi penjangkauan kesehatan anak sekolah dasar		33	Kab/Kota a	Kab/Kota a	150 33	Kab/Kota	200 33	Kab/Kota	150 33	Kab/Kota a	150 33	Kab/Kota	650	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 07 56	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Penjangkauan anak sekolah	Meningkatnya keterampilan petugas Kab/Kota dalam penjangkauan kesehatan anak sekolah		33	Kab/Kota a	Kab/Kota a	150 33	Kab/Kota	200 33	Kab/Kota	150 33	Kab/Kota a	150 33	Kab/Kota	650	Dinkes Provsu			
	Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan usia produktif dan usia lanjut				Jumlah Puskesmas Yang Menyenggarakan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terhadap Wanita Dan Remaja		161 Pusk		166 Pusk		171 Pusk		176 Pusk		181 Pusk							
			1 02 01 02 01 07 57	Workshop Pemantauan Indikator Akses Universal Kesehatan Reproduksi	Tersedianya petugas yang memahami pelaksanaan Universal akses kesehatan reproduksi		33	Kab/Kota a	Kab/Kota a	120 33	Kab/Kota	200 33	Kab/Kota	200 33	Kab/Kota a	220 33	Kab/Kota	740	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 07 58	Orientasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT) Bagi Petugas di kabupaten/Kota	Terlaksananya PKRT di kab/kota		15	Kab/Kota a	Kab/Kota a	90 15	Kab/Kota	90 15	Kab/Kota	90 15	Kab/Kota a	90 15	Kab/Kota	360	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 07 59	Evaluasi PUG-BK dan ARG kab/kota	Terevaluasinya pelaksanaan PUG-BK oleh kab/kota					120		120		120		120		480	Dinkes Provsu			
					Jumlah Puskesmas DTPK/DBK yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar		40 Pusk		42 Pusk		44 Pusk		46 Pusk		48 Pusk							
			1 02 01 02 01 07 60	Pertemuan Penerapan Puskesmas di daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK)	Terlaksananya penerapan perkesmas di Puskesmas DTPK dan DBK		15	Kab/Kota a	Kab/Kota a	100 15	Kab/Kota	200 15	Kab/Kota	200 15	Kab/Kota a	200 15	Kab/Kota	800	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 07 61	Kegiatan Tim Kesehatan Bergerak dalam Rangka Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan	Terlaksananya kegiatan Tim di Daerah DTPK				5	Kab/Kota a	250 5	Kab/Kota	2.000 5	Kab/Kota	3.000 5	Kab/Kota a	4.000 5	Kab/Kota	9.250	Dinkes Provsu		
			1 02 01 02 01 07 62	Evaluasi Pelayanan Kesehatan dasar di Puskesmas DTPK/DBK	Ditentukannya jumlah Puskesmas DTPK/DBK standar				5	Kab/Kota a	150 5	5	Kab/Kota	200 5	5	Kab/Kota a	250 5	Kab/Kota	800	Dinkes Provsu		
					Jumlah Puskesmas santun usia lanjut yang terbentuk di kab/kota		70 Pusk		75 Pusk		80 Pusk		85 Pusk		90 Pusk							

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Usia capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target		
1	2	3	4	5	6	7	10 Kab/Kota	100 Kab/Kota	10 Kab/Kota	190 Kab/Kota	12 Kab/Kota	13 Kab/Kota	14 Kab/Kota	15 Kab/Kota	16 Kab/Kota	17 Kab/Kota	18 Kab/Kota	19 Kab/Kota	20 Dinkes Provsu	21
			1 02 01 02 01 07 63	Pembinaan Pelayanan Konseling Usia di Puskesmas santun Usia Percontohan	Meningkatnya mutu konseling di Puskesmas dan kelompok Usia	Pencapaian	10 Kab/Kota	100 Kab/Kota	10 Kab/Kota	190 Kab/Kota	12 Kab/Kota	13 Kab/Kota	14 Kab/Kota	15 Kab/Kota	16 Kab/Kota	17 Kab/Kota	18 Kab/Kota	19 Kab/Kota	Dinkes Provsu	
			1 02 01 02 01 07 64	Pemantauan Program santun Usia di Puskesmas	Terlaksananya pemantauan program santun usia di Puskesmas		4 Kab/Kota	80				300		200		300		880	Dinkes Provsu	
			1 02 01 02 01 07 65	Advokasi/Sosialisasi sarana pelayanan Primer santun usia lanjut di Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya program Puskesmas santun lansia			115 Kab/Kota	33 Kab/Kota	220 Kab/Kota	33 Kab/Kota	220 Kab/Kota	33 Kab/Kota	220 Kab/Kota	33 Kab/Kota	220 Kab/Kota	33 Kab/Kota	995	Dinkes Provsu	
			1 02 01 02 01 07 66	Pertemuan koordinasi Program Kesehatan Lanjut Usia di sarana Pelayanan Kesehatan Kab/Kota	Meningkatkan komitmen pengambil kebijakan dlm penganggaran program usia lanjut di Kab/Kota			33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	250 Kab/Kota	33 Kab/Kota	250 Kab/Kota	33 Kab/Kota	250 Kab/Kota	33 Kab/Kota	250 Kab/Kota	33 Kab/Kota	1.000	Dinkes Provsu	
			1 02 01 02 01 07 67	Training of Trainer (TOT) Senam Isegaran Jasmani Usia Lanjut bagi petugas Kesehatan Usia Lanjut Kab/Kota	Meningkatnya pengetahuan petugas tentang senam dan meningkatnya kesehatan Usia			33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	215 Kab/Kota	33 Kab/Kota	215 Kab/Kota	33 Kab/Kota	215 Kab/Kota	33 Kab/Kota	215 Kab/Kota	33 Kab/Kota	860	Dinkes Provsu	
			1 02 01 02 01 07 68	Peningkatan sarana dan Prasarana di Pelayanan kesehatan santun usia lanjut Kab/Kota	Meningkatnya kualitas pelayanan di Puskesmas dan kelompok usia			33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	180 Kab/Kota	33 Kab/Kota	200 Kab/Kota	33 Kab/Kota	200 Kab/Kota	33 Kab/Kota	200 Kab/Kota	33 Kab/Kota	780	Dinkes Provsu	
					Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut		62%		64%		66%		68%		0,7					
			1 02 01 02 01 07 69	Orientasi Petugas dalam Pemeliharaan Kesehatan usia lanjut di Rumah (Home Care)	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas (dokter,perawat dan pramusia) serta mutu pelayanan kesehatan usia lanjut di rumah		33 Kab/Kota	256 Kab/Kota	18 Kab/Kota	150 Kab/Kota	33 Kab/Kota	200 Kab/Kota	33 Kab/Kota	250 Kab/Kota	33 Kab/Kota	250 Kab/Kota	33 Kab/Kota	1.106	Dinkes Provsu	
			1 02 01 02 01 07 70	Blmtek Pelayanan Usia di kab/Kota dan Puskesmas	Meningkatnya kualifikasi petugas usia tentang pelayanan Puskesmas santun usia		33 Kab/Kota	93			33 Kab/Kota	100						193	Dinkes Provsu	
			1 02 01 02 01 07 71	Pertemuan koordinasi pembinaan rumah sakit dan panti wredha	Meningkatkan koordinasi dan pelayanan kesehatan usia di rumah sakit dan panti			33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	215 Kab/Kota	33 Kab/Kota	215 Kab/Kota	33 Kab/Kota	215 Kab/Kota	33 Kab/Kota	215 Kab/Kota	33 Kab/Kota	860	Dinkes Provsu	
			1 02 01 02 01 07 72	Pemberian Paket Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Usia) di Panti	Meningkatnya mutu pelayanan usia dan pemberdayaan kelompok usia			33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	300 Kab/Kota	33 Kab/Kota	300 Kab/Kota	33 Kab/Kota	300 Kab/Kota	33 Kab/Kota	300 Kab/Kota	33 Kab/Kota	1.200	Dinkes Provsu	
			1 02 01 02 01 07 73	Training of Trainer (TOT) Konseling Kesehatan, Jiwa dan Gizi Usia lanjut 15 Kab/Kota	Meningkatnya mutu konseling di Puskesmas dan kelompok Usia			33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	250 Kab/Kota	33 Kab/Kota	250 Kab/Kota	33 Kab/Kota	250 Kab/Kota	33 Kab/Kota	250 Kab/Kota	33 Kab/Kota	1.000	Dinkes Provsu	
			1 02 01 02 01 07 74	Pembinaan Pelayanan Konseling Usia Lanjut (Usia) di Puskesmas, Rumahsakit dan Panti	Terlaksananya pemantauan program santun usia di Puskesmas, rumah sakit dan panti			33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	150 Kab/Kota	33 Kab/Kota	150 Kab/Kota	33 Kab/Kota	150 Kab/Kota	33 Kab/Kota	150 Kab/Kota	33 Kab/Kota	600	Dinkes Provsu	
			1 02 01 02 01 07 75	Pembinaan ke kab/kota tentang pelayanan usia di kab/kota	Meningkatnya kualifikasi petugas usia tentang pelayanan Puskesmas			33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	100 Kab/Kota	33 Kab/Kota	100 Kab/Kota	33 Kab/Kota	100 Kab/Kota	33 Kab/Kota	100 Kab/Kota	33 Kab/Kota	400	Dinkes Provsu	
			1 02 01 02 01 07 76	Peningkatan Pelayanan Kesehatan melalui Pembentukan kelompok usia lanjut di Kab/Kota	Cakupan Pelayanan usia lanjut di kelompok lansia 20 % desa , memiliki kelompok lansia			33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	100 Kab/Kota	33 Kab/Kota	100 Kab/Kota	33 Kab/Kota	100 Kab/Kota	33 Kab/Kota	100 Kab/Kota	33 Kab/Kota	400	Dinkes Provsu	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
							B	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			1 02 01 02 01 07	77 Pelatihan teknis tenaga Non Tenaga Kesehatan (Kader) untuk Program Kesehatan Lanjut Usia	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga Non Nakes (Kader) untuk Program Kesehatan Lanjut Usia						33 Kab/Kota	200 33 Kab/Kota	250 33 Kab/Kota	300 33 Kab/Kota	300 33 Kab/Kota	300 33 Kab/Kota	750	Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 07	78 Pembentukan, pemberdayaan dan Pembinaan Pelayanan kelompok usia lanjut di kab/kota percontohan	Tertentukannya dan terlaksananya Pembinaan Pelayanan kelompok usia lanjut di kab/kota						33 Kab/Kota	200 33 Kab/Kota	250 33 Kab/Kota	300 33 Kab/Kota	300 33 Kab/Kota	750	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 07	79 Peningkatan komitmen kemitraan LP/LS Kesehatan usia lanjut	Meningkatnya komitmen LP/LS dalam pengembangan program usia lanjut						33 Kab/Kota	200 33 Kab/Kota	250 33 Kab/Kota	300 33 Kab/Kota	300 33 Kab/Kota	750	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 07	80 Pelatihan teknis tenaga Non Tenaga Kesehatan (Kader) untuk Program Kesehatan Lanjut Usia	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga Non Nakes (Kader) untuk Program Kesehatan Lanjut Usia			33 Kab/Kota	180 33 Kab/Kota		180 33 Kab/Kota	180 33 Kab/Kota	180 33 Kab/Kota	180 33 Kab/Kota	180 33 Kab/Kota	720	Dinkes Provsu					
	Meningkatnya pembinaan dan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan kesehatan komunitas				Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 3 Puskesmas yang melaksanakan kesehatan Olah Raga		4 KK	6 KK	10 KK		8 KK				12 KK							
			1 02 01 02 01 07	81 Pertemuan Koordinasi Kesehatan Olah raga Tingkat Provinsi	Tertaksananya koordinasi kesehatan olah raga Tk. Provinsi			83 33 Kab/Kota	120 33 Kab/Kota	120 33 Kab/Kota	120 33 Kab/Kota	120 33 Kab/Kota	120 33 Kab/Kota	120 33 Kab/Kota	120 33 Kab/Kota	120 33 Kab/Kota	563	Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 07	82 Pengukuran kebugaran Jasmani bagi Petugas Kesehatan Dinkes Provinsi	Tertaksananya pengukuran kebugaran jasmani bagi 100 petugas kesehatan Dinkes Prop. Sumut			100 Org	20 100 Org		20 100 Org	20 100 Org	20 100 Org	20 100 Org	20 100 Org	20 100 Org	80	Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 07	83 Peningkatan Kapasitas petugas untuk Pembinaan kebugaran Jasmani bagi Calon Jemaah Haji	Tertaksananya pertemuan peningkatan kapasitas petugas pembinaan kebugaran calon jemaah haji			66 Org	150 66 Org		66 Org	200 66 Org	200 66 Org	200 66 Org	200 66 Org	200 66 Org	750	Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 07	84 Pengukuran kebugaran Jasmani bagi Karyawan Perusahaan di kab/kota binaan	Tertaksananya pengukuran kebugaran jasmani bagi karyawan di 12 Kab/ Kota binaan (1 Kab/ kota = 50 karyawan)			600 Karawana di 12 KK	50								50	Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 07	85 Pertemuan Koordinasi Kesehatan olah raga Tingkat Kab/Kota	Tertaksananya pertemuan koordinasi kesehatan olahraga			33 Kab/Kota	72 33 Kab/Kota		33 Kab/Kota	100 33 Kab/Kota	120 33 Kab/Kota	120 33 Kab/Kota	140 33 Kab/Kota	432	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 07	86 Pembinaan Puskesmas pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh Raga di kab/kota	Meningkatnya jumlah Puskesmas santun usia lanjut						33 Kab/Kota	200 33 Kab/Kota	250 33 Kab/Kota	200 33 Kab/Kota	200 33 Kab/Kota	650	Dinkes Provsu					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	17 KK	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					Jumlah kab/kota yang mempunyai minimal 4 puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja				21 KK		24 KK	28 KK	33 KK									
			1 02 01 02 01 07	Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Kerja bagi tenaga Kesehatan di Kab/Kota	Meningkatnya kemampuan petugas dalam pelayanan kesehatan kerja			83		168		200	200	200		200			851	Dinkes Provsu		
			1 02 01 02 01 07	Review akhir Program Kesehatan Kerja di Kab/Kota	Diperolehnya hasil akhir kesehatan kerja di kab/kota			61		90		100	100	100		100			451	Dinkes Provsu		
			1 02 01 02 01 07	Pendampingan Puan ke Kab/Kota dan Penempatan TKI wanita	Terlaksananya kunjungan kerja dari Kemenkes ke kab/kota		4 Org	15										15	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 07	Pertemuan koordinasi kesehatan Kerja Tingkat Kab/Kota	Terlaksananya pertemuan koordinasi kesehatan kerja pada 4 Kab/ Kota			4	Pusk/KK		60	4	100	4	100	4	Pusk/KK	360	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 07	Pembinaan perusahaan informal dan formal di Kab/Kota tentang ASI dan kesehatan reproduksi	Meningkatnya jumlah perusahaan informal dan formal di Kab/Kota tentang ASI dan kesehatan reproduksi						33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	250	33 Kab/Kota	650	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 07	Pembinaan Pos UKK di sektor informal	Meningkatnya jumlah Pos UKK di sektor informal						33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	250	33 Kab/Kota	600	Dinkes Provsu			
Meningkatnya pembinaan pengobatan tradisional, alternatif dan komplementer					Persentase Kab/kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	30%		35%			40%	45%	0,5									
			1 02 01 02 01 07	Sosialisasi yankestradkom bagi Pengobat Tradisional se Kota Medan	Meningkatnya kemampuan pengobat tradisional dalam Yankestradkom	33 Org	21	60 Pengobatan Tradisional		60								81	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 07	Peningkatan kapasitas Petugas Kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan Pelayanan Kesehatan Tradisional (yankestrad) di Kab/Kota	Meningkatnya kapasitas petugas keshean dalam pelayanan kesehatan tradisional			33 Kab/Kota	110	33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	610	Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 07	Evaluasi program yankestradkom bagi petugas kab/kota	Diperolehnya hasil akhir kesehatan yankestrad di kab/kota			33 Kab/Kota	72	33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	522	Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 07	Operasional Sentra Pengembangan penerapan Pengobatan Tradisional) SP3T Provinsi Sumatera Utara	Diperolehnya hasil akhir kesehatan yankestrad di kab/kota			33 Kab/Kota	250	33 Kab/Kota	300	33 Kab/Kota	300	33 Kab/Kota	300	33 Kab/Kota	1.150	Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 07	Pembinaan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional komplementer	Meningkatnya jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan kesehatan tradisional komplementer						33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	250	33 Kab/Kota	300	33 Kab/Kota	750	Dinkes Provsu			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			1 02 01 02 01 07	98	Pertemuan koordinasi Yankes tradikom Tk Provinsi	Meningkatnya srana kesehatan melaksanakan Yankes tradikom Tk Provinsi					33 Kab/Kota	150 33 Kab/Kota	200 33 Kab/Kota	250 33 Kab/Kota	250 33 Kab/Kota		600		Dinkes Provsu		
						Jumlah pesantren yang memiliki Poskestren	55 Pesantren		60 Pesantren		65 Pesantren		70 Pesantren		80 Pesantren		80				
			1 02 01 02 01 07	99	Pertemuan Koordinasi Poskestren Tingkat Provinsi	Terlaksananya koordinasi kesehatan pesantren Tk. Provinsi	33 Org	70 33 Org	66 33 Org	66 33 Org	66 33 Org	66 33 Org	66 33 Org	66 33 Org	66 33 Org	66 33 Org	334		Dinkes Provsu		
			1 02 01 02 01 07	100	Pembentukan Poskestren bagi Pesantren di Kab/Kota	Terbentuknya Poskestren sebanyak 2 unit		2 unit	15 2 unit	30 2 unit	35 2 unit	40 2 unit	40 2 unit	40 2 unit	40 2 unit	120		Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 07	101	Peningkatan Kapasitas petugas Kesehatan untuk Pembinaan Pos Kesehatan bagi Pesantren di Kab/Kota	Meningkatnya kemampuan petugas kesehatan dalam pembinaan poskestren		20 K/K	66 20 K/K	66 20 K/K	66 20 K/K	66 20 K/K	66 20 K/K	66 20 K/K	66 20 K/K	264		Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 07	102	Peningkatan Pengetahuan Santri tentang Pos Kesehatan bagi Pesantren di Kab/Kota	Meningkatnya pengetahuan santri tentang poskestren		57 org	114 57 org	200 57 org	200 57 org	200 57 org	200 57 org	200 57 org	200 57 org	764		Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 07	103	Pembinaan Pos kesehatan pesantren (Poskestren) di Kab/Kota	Poskestren memperoleh masukan dalam pengembangan Poskestren		20 poskestr	80 20 poskestr	80 20 poskestr	80 20 poskestr	80 20 poskestr	80 20 poskestr	80 20 poskestr	80 20 poskestr	320		Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 07	104	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Pesantren bagi tenaga kesehatan di kab/kota	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Pesantren oleh tenaga kesehatan		10 Pos	40 10 Pos	200 10 Pos	200 10 Pos	200 10 Pos	200 10 Pos	200 10 Pos	200 10 Pos	940		Dinkes Provsu			
						Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 3 Puskesmas yang menyelenggarakan program pengembangan (Indra, Jiwa dan Mulut)	20 KK	24 KK		36 KK	30 KK	33 KK									
			1 02 01 02 01 07	105	Sosialisasi Tim Pembina Pengaruh Pelaksanaan Kesehatan Jiwa Masyarakat	Meningkatnya kemampuan pengobat tradisional dalam Yankes tradikom	20 Kab/Kota	75 20 Kab/Kota	66 25 Kab/Kota	100 28 Kab/Kota	150 33 Kab/Kota	200 33 Kab/Kota	250 33 Kab/Kota	300 33 Kab/Kota	330 33 Kab/Kota	591		Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 07	106	Pertemuan Pelayanan Gigi dan Mulut Anak	Meningkatnya kemampuan petugas dalam pelayanan gigi dan mulut	33 Org	73 33 Org	66 33 Org	100 33 Org	100 33 Org	100 33 Org	100 33 Org	100 33 Org	100 33 Org	489		Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 07	107	Pertemuan pelayanan kesehatan gigi dan mulut anak sekolah	Meningkatnya jumlah puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut anak sekolah					33 Kab/Kota	200 33 Kab/Kota	250 33 Kab/Kota	250 33 Kab/Kota	250 33 Kab/Kota	750		Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 07	108	Peningkatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut bagi Petugas Kesehatan kab/kota	Meningkatnya jumlah Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut bagi Petugas Kesehatan kab/kota					33 Kab/Kota	200 33 Kab/Kota	250 33 Kab/Kota	250 33 Kab/Kota	250 33 Kab/Kota	700		Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 07	109	Pertemuan Fasilitasi Peningkatan Petugas Kesehatan di IPWL	Pertemuan Fasilitasi Peningkatan Petugas Kesehatan di IPWL					33 Kab/Kota	150 33 Kab/Kota	150 33 Kab/Kota	150 33 Kab/Kota	150 33 Kab/Kota	500		Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 07	110	Peningkatan kapasitas petugas kesehatan jiwa masyarakat melalui keterampilan jiwa masyarakat	Meningkatnya jumlah petugas mempunyai kapasitas pelayanan kesehatan jiwa masyarakat melalui keterampilan jiwa masyarakat					33 Kab/Kota	150 33 Kab/Kota	150 33 Kab/Kota	150 33 Kab/Kota	150 33 Kab/Kota	600		Dinkes Provsu			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			1 02 01 02 01 07 111	Peningkatan kapasitas petugas kesehatan jiwa masyarakat dalam meningkatkan keterampilan kader kesehatan jiwa masyarakat	Meningkatnya jumlah petugas mempunyai kapasitas pelayanan kesehatan jiwa masyarakat melalui keterampilan jiwa masyarakat						33 Kab/Kota	150 Kab/Kota	33 Kab/Kota	200 Kab/Kota	33 Kab/Kota	250 Kab/Kota	33 Kab/Kota	600	Dinkes Provsu		
			1 02 01 02 01 07 112	Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam penanganan penderita psikotik yang mengalami pemasangan dan penempatan	Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam penanganan penderita psikotik yang mengalami pemasangan dan penempatan		40 Org	263			33 Kab/Kota	200 Kab/Kota	33 Kab/Kota	400 Kab/Kota	33 Kab/Kota	500 Kab/Kota	33 Kab/Kota	1.363	Dinkes Provsu		
			1 02 01 02 01 07 113	Penjaringan Kasus Pasung (Eliminasi Pasung) di Kab/Kota	Kasus pasung dapat tertangani						66 Kab/Kota	200 Kab/Kota	21 Kab/Kota	200 Kab/Kota	21 Kab/Kota	250 Kab/Kota	21 Kab/Kota	966	Dinkes Provsu		
			1 02 01 02 01 07 114	Peningkatan Kemampuan Petugas Kesehatan Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Meningkatnya kemampuan petugas kesehatan dalam penanganan ODGJ Berat					21 Kab/Kota	90 Kab/Kota	150 Kab/Kota	21 Kab/Kota	200 Kab/Kota	21 Kab/Kota	250 Kab/Kota	21 Kab/Kota	690	Dinkes Provsu		
			1 02 01 02 01 07 115	Evaluasi pelaksanaan Indeks Penerimaan Wajib Laporan (IPWL) TIK Provinsi	Diperolehnya hasil evaluasi IPWL Kab/ Kota					11 IPWL	50	100	11 IPWL	100	11 IPWL	100	11 IPWL	350	Dinkes Provsu		
			1 02 01 02 01 07 116	Peningkatan kapasitas petugas Kab/kota dalam perawatan gangguan jiwa masyarakat pra, masa dan pasca bencana	Meningkatnya kemampuan petugas dalam penanganan gangguan jiwa masyarakat di daerah bencana						20 Kab/Kota	300 Kab/Kota	20 Kab/Kota	400 Kab/Kota	20 Kab/Kota	500 Kab/Kota	20 Kab/Kota	1.200	Dinkes Provsu		
			1 02 01 02 01 07 117	Asuhan Penghormatan dan Penghargaan bagi petugas kesehatan di Kab/Kota	Meningkatnya pengetahuan petugas puskesmas dalam asuhan penghormatan dan penghargaan						150 Kab/Kota	150 Kab/Kota	33 Kab/Kota	150 Kab/Kota	33 Kab/Kota	150 Kab/Kota	33 Kab/Kota	600	Dinkes Provsu		
			1 02 01 02 01 07 118	Sosialisasi Dokter Gigi keluarga bagi Petugas Kesehatan di Puskesmas	Meningkatnya pengetahuan dokter gigi tgg dokter gigi keluarga						66 Kab/Kota	100 Kab/Kota	33 Kab/Kota	150 Kab/Kota	33 Kab/Kota	200 Kab/Kota	33 Kab/Kota	516	Dinkes Provsu		
			1 02 01 02 01 07 119	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) KIM di Luar Gedung (Pemeriksaan Mata/Oberasi Katarak)	Tertaksananya pelayanan kesehatan mata di luar gedung		33 Kab/Kota	322 Kab/Kota	33 Kab/Kota	3.104 Kab/Kota	33 Kab/Kota	800 Kab/Kota	33 Kab/Kota	770 Kab/Kota	33 Kab/Kota	600 Kab/Kota	33 Kab/Kota	5.596	UPT KIM		
			1 02 01 02 01 07 120	Screening Gangguan Penglihatan UPT KIM di Kabupaten/Kota	Terdapatnya jumlah kasus penderita gangguan penglihatan di Kab/ Kota		7 Kab/Kota	25 Kab/Kota	15 Kab/Kota	190 Kab/Kota	25 Kab/Kota	400 Kab/Kota	30 Kab/Kota	400 Kab/Kota	33 Kab/Kota	400 Kab/Kota	33 Kab/Kota	1.415	UPT KIM		
			1 02 01 02 01 07 121	Pertemuan teknis Penanggulangan gangguan Penglihatan bagi dokter dan Perawat Puskesmas Kab/Kota	Terdapatnya tenaga teknis kesehatan mata di Puskesmas Kab/Kota		28 Org	76 Kab/Kota	80 Org	110 Kab/Kota	110 Kab/Kota	110 Kab/Kota	80 Org	110 Kab/Kota	80 Org	110 Kab/Kota	80 Org	516	Dinkes Provsu		
			1 02 01 02 01 07 122	Peningkatan kapasitas bagi pengelola kesehatan jiwa di Kab/Kota	Tertaksananya program kesehatan jiwa di Kab/Kota						33 Kab/Kota	100 Kab/Kota	33 Kab/Kota	120 Kab/Kota	33 Kab/Kota	140 Kab/Kota	33 Kab/Kota	360	Dinkes Provsu		
Membrdayakan individu, keluarga dan masyarakat untuk berprilaku hidup bersih dan sehat	Meningkatnya Perilaku hidup bersih dan sehat	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat menjadi 65% tahun 2018	1 0 01 02 01 08 2	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	52%	55%	3.364	57%	6.615	59%	7.935	61%	8.265	61%	8.485	100%	34.664	Dinkes Provsu		

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			1 02 01 02 01 08 17	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Penyakit Tidak Menular	Meningkatnya upaya pencegahan penyakit tidak menular kab/kota				33 Kab/Kota	250 Kab/Kota	33 Kab/Kota	250 Kab/Kota	33 Kab/Kota	250 Kab/Kota	33 Kab/Kota	250 Kab/Kota	33 Kab/Kota	1.000	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 08 18	Pelatihan konseling rehabilitasi berhenti merokok pada petugas kesehatan di kab/kota	Meningkatnya kemampuan petugas kesehatan dalam konseling berhenti merokok kab/kota				33 kab/kota	180 kab/kota	33 kab/kota	180 kab/kota	33 kab/kota	180 kab/kota	33 kab/kota	180 kab/kota	33 kab/kota	720	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 08 19	Advokasi dan sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Terbentuknya KTR di Area Publik Kab/Kota				33 Kab/Kota	180 Kab/Kota	33 Kab/Kota	180 Kab/Kota	33 Kab/Kota	180 Kab/Kota	33 Kab/Kota	180 Kab/Kota	33 Kab/Kota	720	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 08 20	Pengaduan Buletin Kesehatan	Terbitnya buletin Kesehatan setiap bulan				33 Kab/Kota	180 Kab/Kota	33 Kab/Kota	180 Kab/Kota	33 Kab/Kota	180 Kab/Kota	33 Kab/Kota	180 Kab/Kota	33 Kab/Kota	720	Dinkes Provsu			
					Persentase desa siaga aktif	22%			25%		30%		35%		0,4							
			1 02 01 02 01 08 21	Pengembangan desa Siaga	meningkatnya jumlah desa siaga		5 Kab/Kota	215			5 Kab/Kota	200 Kab/Kota	5 Kab/Kota	250 Kab/Kota	5 Kab/Kota	300 Kab/Kota	20 Kab/Kota	965	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 08 22	Pertemuan Evaluasi Desa Siaga	Tersedianya data dan meningkatnya pemahaman petugas kab/ kota tentang desa siaga aktif				33 Kab/Kota	300 Kab/Kota	33 Kab/Kota	300 Kab/Kota	33 Kab/Kota	300 Kab/Kota	33 Kab/Kota	300 Kab/Kota	33 Kab/Kota	1.200	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 08 23	Pemetaan Poskesdes dan UKBM	Tersedianya data Poskesdes dan UKBM				33 Kab/Kota	100 Kab/Kota	33 Kab/Kota	100 Kab/Kota	33 Kab/Kota	150 Kab/Kota	33 Kab/Kota	200 Kab/Kota	33 Kab/Kota	450	Dinkes Provsu			
					Jumlah Pos kesehatan desa (Poskesdes) di desa/kel siaga	2.770 unit			2.800 Unit		2.850 Unit	2.900 Unit	2.900 Unit		2.950 Unit							
			1 02 01 02 01 08 24	Orientasi Pemberdayaan masyarakat bagi Bidan/Perawat Poskesdes Kab/Kota	Terlaksananya orientasi pemberdayaan masyarakat di kab/kota				5 kab/kota	235 kab/kota	5 kab/kota	235 kab/kota	5 kab/kota	235 kab/kota	5 kab/kota	235 kab/kota	20 Kab/Kota	940	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 08 25	Pelatihan Promosi kesehatan bagi Petugas di Kab/Kota	Terlaksananya pelatihan Promosi Kesehatan bagi petugas Puskesmas				5 kab/kota	240 kab/kota	5 kab/kota	240 kab/kota	5 kab/kota	240 kab/kota	5 kab/kota	240 kab/kota	20 Kab/Kota	960	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 08 26	Orientasi Pemberdayaan masyarakat bagi kader Kesehatan Kab/Kota	Terlaksananya orientasi pemberdayaan masyarakat bagi kader kesehatan di kab/kota				5 kab/kota		5 kab/kota	200 kab/kota	5 kab/kota	200 kab/kota	5 kab/kota	200 kab/kota	15 Kab/Kota	600	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 08 27	Lomba Lingkungan desa sehat	Meningkatnya desa sehat				33 Kab/Kota	250 Kab/Kota	33 Kab/Kota	250 Kab/Kota	33 Kab/Kota	250 Kab/Kota	33 Kab/Kota	250 Kab/Kota	33 Kab/Kota	1.000	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 08 28	Pertemuan evaluasi dalam rangka pengembangan Poskesdes	Meningkatnya jumlah Poskesdes aktif						33 Kab/Kota	250 Kab/Kota	33 Kab/Kota	250 Kab/Kota	33 Kab/Kota	250 Kab/Kota	33 Kab/Kota	750	Dinkes Provsu			
					Persentase SD yang mempromosikan kesehatan	25%			28%		31%		34%		0,36							
			1 02 01 02 01 08 29	Pembinaan Program UKS ke Kab/Kota	Terlaksananya pembinaan program UKS	33 Kab/Kota	85 Kab/Kota	33 Kab/Kota	150 Kab/Kota	33 Kab/Kota	150 Kab/Kota	33 Kab/Kota	150 Kab/Kota	33 Kab/Kota	150 Kab/Kota	33 Kab/Kota	150 Kab/Kota	685	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 08 30	Perluasan institusi pendidikan di TK SD yang mempromosikan kesehatan	Meningkatnya institusi mempromosikan kesehatan				33 Kab/Kota	100 Kab/Kota	33 Kab/Kota	100 Kab/Kota	33 Kab/Kota	100 Kab/Kota	33 Kab/Kota	100 Kab/Kota	33 Kab/Kota	300	Dinkes Provsu			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja SKPD	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode 5 tahun SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri		35%		38%		41%		43%							
			1 02 01 02 01 08 31	Jambore Posyandu Tingkat Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya Jambore Posyandu Tingkat Provinsi Sumatera Utara		33 Kab/Kota	750	33 Kab/Kota	750	33 Kab/Kota	750	33 Kab/Kota	750	33 Kab/Kota	750	33 Kab/Kota	3.750	Dinkes Provsu	
			1 02 01 02 01 08 32	Lomba Posyandu Tingkat Provinsi	Terlaksananya Lomba Posyandu dalam rangka peningkatan pengelolaan Posyandu Kab/Kota		10 Posyandu	160	10 Posyandu	250	10 Posyandu	250	10 Posyandu	250	10 Posyandu	250	10 Posyandu	1.160	Dinkes Provsu	
			1 02 01 02 01 08 33	Pertemuan pengelola Posyandu Kab/Kota	Terlaksananya koordinasi pengelolaan Posyandu Kab/Kota		33 Kab/Kota	130	33 Kab/Kota	130	33 Kab/Kota	130	33 Kab/Kota	130	33 Kab/Kota	130	33 Kab/Kota	520	Dinkes Provsu	
			1 02 01 02 01 08 34	Pembinaan Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) ke Kab/ Kota	Terlaksananya pembinaan program UKS		33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	600	Dinkes Provsu	
					Jumlah Kab/ Kota yang memiliki minimal 2 desa yang mengembangkan Program TOGA		20 KK		22 KK		24 KK		26 KK		28 KK					
			1 02 01 02 01 08 35	Sosialisasi Program TOGA	Terlaksananya pembinaan program TOGA		2 Desa,33 kab/ kota	130	2 Desa,33 kab/ kota			200	2 Desa,33 kab/ kota	250	2 Desa,33 kab/ kota	290	2 Desa,33 kab/ kota	870	Dinkes Provsu	
			1 02 01 02 01 08 36	Lomba TOGA	Tercapainya capaian desa siaga		33 kab/kota	147	33 kab/kota	250	33 kab/kota	250	33 kab/kota	250	33 kab/kota	250	33 kab/kota	1.147	Dinkes Provsu	
			1 02 01 02 01 08 37	Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan dalam pemanfaatan TOGA	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan pe3manfaatn TOGA		33 Kab/kota	130	33 Kab/kota	130	33 Kab/Kota	130	33 Kab/Kota	130	33 Kab/Kota	130	33 Kab/Kota	520	Dinkes Provsu	
Meningkatkan kualitas gizi upaya penanggulangan kasus gizi buruk dan masyarakat		Persentase gizi buruk yang ditangani menjadi 100% Tahun 2018	1 0 01 02 01 09 2	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase gizi buruk yang ditangani	100%	100%	932	100%	6.655	100%	8.863	100%	8.563	100%	9.413	100%	34.436		
		Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk dan Kurang 20% Tahun 2018	1 02 01 02 01 09 1	Pendamping kasus gizi buruk dan gizi kurang	Meningkatnya kualitas penanganan kasus balita penderita gizi buruk		700 kasus	280	700 kasus	280	700 kasus	280	700 kasus	280	700 kasus	280	700 kasus	1.400	Dinkes Provsu	
			1 02 01 02 01 09 2	Peningkatan kapasitas tatalaksana gizi buruk petugas kesehatan di Kab/ Kota	Tersedianya petugas yang mampu menangani gizi buruk di Tingkat Puskesmas		33 Kab/kota	300	33 Kab/Kota	300	33 Kab/Kota	300	33 Kab/Kota	300	33 Kab/Kota	300	33 Kab/Kota	1.200	Dinkes Provsu	
			1 02 01 02 01 09 3	Pemberian mineral Mix di RSU Kab/ Kota	Menurunnya jumlah kasus gizi buruk melalui Pemberian mineral Mix di RSU kab/kota				33 Kab/kota	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	600	Dinkes Provsu	
			1 02 01 02 01 09 4	Penyediaan Pemberian Makanan Tambahan Anak sekolah (PMT-AS)	Tersedianya paket PMT-AS di Kab/ Kota		33 Kab/kota	400	33 Kab/kota	400	33 Kab/Kota	650	33 Kab/Kota	850	33 Kab/Kota	1.300	33 Kab/Kota	3.200	Dinkes Provsu	
					Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI eksklusif		40%		40%		50%		50%		50%					
			1 02 01 02 01 09 5	Peningkatan petugas konselor Air Susu Ibu (ASI) bagi petugas kesehatan Kab/ Kota	Tersedianya petugas konselor ASI di Puskesmas		33 Kab/kota	300	33 Kab/Kota	300	33 Kab/Kota	300	33 Kab/Kota	300	33 Kab/Kota	300	33 Kab/Kota	1.200	Dinkes Provsu	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
					Persentase kabupaten/kota melaksanakan surveillans gizi				100%		100%		100%		1									
			1 02 01 02 01 09 6	Pertemuan manajemen program gizi di Kabupaten Kota	Terselenggaranya pertemuan manajemen program Kab/kota		33 Kab/Kot ^a	133 33 Kab/Kot	133 33 Kab/Kota	133 33 Kab/Kota	133 33 Kab/Kot ^a	133 33 Kab/Kota	133 33 Kab/Kota	133 33 Kab/Kot ^a	133 33 Kab/Kota	532	Dinkes Provsu							
			1 02 01 02 01 09 7	Surveilans Gizi Kabupaten/Kota	Terselenggaranya survey/lans gizi di kab/kota		33 Kab/Kot ^a	650 33 Kab/Kot	650 33 Kab/Kota	650 33 Kab/Kota	650 33 Kab/Kota	500 33 Kab/Kota	650 33 Kab/Kota	650 33 Kab/Kota	2.450	Dinkes Provsu								
			1 02 01 02 01 09 8	Pelatihan pemantauan Pertumbuhan bagi petugas gizi kab/kota	Meningkatnya jumlah petugas mampu melakukan pemantauan pertumbuhan bagi petugas gizi kab/kota						300 33 Kab/Kota	300 33 Kab/Kota	300 33 Kab/Kota ^a	300 33 Kab/Kota	900	Dinkes Provsu								
					Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)		70%		70%		70%		75%		0,8									
			1 02 01 02 01 09 9	Pemantauan status gizi di kab/kota	Meningkatnya D/S			33 Kab/Kot ^a	150 33 Kab/Kot	150 33 Kab/Kota	150 33 Kab/Kota	150 33 Kab/Kota	150 33 Kab/Kota	150 33 Kab/Kota	600	Dinkes Provsu								
					Persentase ibu hamil mendapatkan Fe		70%		71% ^a		74%		78%		0,8									
			1 02 01 02 01 09 10	Sosialisasi /Rakontek/ Review pemberian tablet Fe bumil dan penggunaan garam beriodium rumah tangga	Tersosiasasinya pemberian tablet Fe dan penggunaan garam beriodium rumah tangga oleh petugas			33 Kab/Kot ^a	200 33 Kab/Kot	200 33 Kab/Kota	200 33 Kab/Kota	200 33 Kab/Kota	200 33 Kab/Kota	200 33 Kab/Kota	800	Dinkes Provsu								
			1 02 01 02 01 09 11	Distribusi Tablet Fe di kab/Kota	Meningkatnya Jumlah Bumil KEK mendapat Tablet Fe di kab/Kota						33 Kab/Kota	200 33 Kab/Kota	250 33 Kab/Kota	300 33 Kab/Kota ^a	750	Dinkes Provsu								
					Cakupan Rumah Tangga yang mengkonsumsi garam beryodium.		85%		85%		85%		87%		0,9									
			1 02 01 02 01 09 12	Sosialisai penggunaan garam beriodium rumah tangga	Tersosiasasinya pemberian tablet Fe dan penggunaan garam beriodium rumah tangga oleh petugas			33 Kab/Kot ^a	200 33 Kab/Kot	200 33 Kab/Kota	200 33 Kab/Kota	200 33 Kab/Kota	200 33 Kab/Kota	200 33 Kab/Kota	800	Dinkes Provsu								
	Meningkatnya Intervensi kesehatan dan gizi sesuai siklus hidup	Persentase ibu hamil KEK dan anemia mendapatkan PMT menjadi 55% Tahun 2018.			Persentase penyediaan buffer stock MP-ASI untuk bencana		100%		100%		100%		100%		1		100%		Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 09 13	Penyediaan MP-ASI bagi balita 1 (satu)	Tersedianya paket MP-ASI bagi bayi di Kab/kota			200		352		1.000		1.200		1.300		4.052	Dinkes Provsu					
					Persentase ibu hamil KEK dan anemia yang mendapatkan PMT		40%		45%		48%		50%		0,55									
			1 02 01 02 01 09 14	Pengadaan PMT Ibu hamil	Tersedianya paket PMT Bumil di Kab/kota		10 Kab/Kota	452 15 Kab/Kot ^a	500 Kab/Kot	500 Kab/Kota	20 Kab/Kota	700 Kab/Kota	25 Kab/Kota	900 Kab/Kota	33 Kab/Kota	1.200 Kab/Kota	33 Kab/Kota	3.752	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 09 15	Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi (SUN Movement)	Tersosiasasinya dalam penyebaran perubahan perilaku					1.500		1.500		700 ^a		500		4.200	Dinkes Provsu					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>21</td>	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
			1 02 01 02 01 09 16	Penguatan Manajemen Program Gizi	Terjalinnya pelaksanaan program gizi di kab/kota				Provinsi, 33 Kab/Kota	250	Provinsi, 33 Kab/Kota	250	Provinsi, 33 Kab/Kota	250	Provinsi, 33 Kab/Kota	250	Provinsi, 33 Kab/Kota	1.000	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 09 17	Bimbingan teknis program gizi ke Kabupaten/Kota	Terlaksananya program gizi di kab/kota				33 kab/kota	600	33 kab/kota	600	33 kab/kota	600	33 kab/kota	600	33 kab/kota	2.400	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 09 18	Pendidikan pelatihan Tata laksana Gizi Buruk	Terlaksananya pelatihan tata laksana gizi buruk				33 kab/kota	200	33 kab/kota	200	33 kab/kota	200	33 kab/kota	200	33 kab/kota	800	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 09 19	Pendidikan dan pelatihan Pemantauan Pertumbuhan	Terlaksananya pelatihan pemantauan pertumbuhan				20 Pusk	200	20 Pusk	200	20 Pusk	200	20 Pusk	200	20 Pusk	800	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 09 20	Pendidikan pelatihan Konselor makanan Pendamping Air susu ibu (MP-ASI)	Tersedianya konselor MP ASI				20 Pusk	150	20 Pusk	150	20 Pusk	150	20 Pusk	150	20 Pusk	600	Dinkes Provsu					
					Persentase anak 6-59 bulan mendapatkan vitamin A	78%	80%		80%			81%	82%		0,83									
			1 02 01 02 01 09 21	Peningkatan pemberian Vitamin A dosis tinggi	Terlaksananya penyediaan Vitamin A dosis tinggi				33 Kab/Kota	300	33 Kab/Kota	300	33 Kab/Kota	300	33 Kab/Kota	300	33 Kab/Kota	1.200	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 09 22	Sweeping bulan vitamin A di Kab/Kota	Meningkatnya jumlah bayi/balita mendapat Vit A dosis tinggi				33 Kab/Kota		33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	600	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 09 23	Pendistribusian kasus Vitamin A	Meningkatnya jumlah bayi/balita mendapat Vit A dosis tinggi						33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	600	Dinkes Provsu					
Mewujudkan lingkungan yang sehat	Meningkatnya cakupan masyarakat terdapat air bersih, sanitasi dasar, dan perumahan sehat	Persentase keluarga memenuhi rumah yang memenuhi syarat kesehatan menjadi 78% Tahun 2018	1 0 01 02 01 10 2	Program Lingkungan Sehat	Persentase keluarga memenuhi rumah yang memenuhi syarat kesehatan	65%	72%	1.618	73%	5.936	74%	8.261	75%	9.311	78%	11.361	78%	36.487						
			1 02 01 02 01 10 1	Stimulan pembangunan percontohan rumah sehat dan sederhana	Tersedianya percontohan rumah sehat dan sederhana		15 Unit	200	15 Unit	225	30 Unit	500	40 Unit	700	50 Unit	900	150 Unit	2.525	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 10 2	Pertemuan Hygiene Sanitasi Depot air Minum	Meningkatnya hygiene sanitasi depot air minum		33 Kab/Kota	200										200	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 10 3	Advokasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Terlaksananya sosialisasi PPSP di kab/kota				33 orang	100	33 orang	100	33 orang	100	33 orang	100	33 orang	400	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 10 4	Pelaksanaan Program Rumah Sehat	Ditentukannya kondisi rumah yang memenuhi syarat kesehatan				33 Kab/Kota	250	33 Kab/Kota	250	33 Kab/Kota	250	33 Kab/Kota	250	33 Kab/Kota	1.000	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 10 5	Monitoring Pembangunan percepatan sanitasi pemukiman (PPSP)	Tersedianya informasi sanitasi pemukiman				33 Kab/Kota	76	33 Kab/Kota	76	33 Kab/Kota	76	33 Kab/Kota	76	33 Kab/Kota	304	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 10 6	Pertemuan peningkatan Program PPSP	Terlaksananya program PPSP di Kab/Kota				33 Kab/Kota	100	33 Kab/Kota	100	33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	450	Dinkes Provsu					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Usia capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					Persentase keluarga menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan		66%		67%		68%		69%		0,7							
			1 02 01 02 01 10	7	Pengadaan stimulan Sarana jamban Keluarga	Terbangunnya percontohan SAG/jamban keluarga	15 Unit	470	7 unit	260	15 Unit	500	18 Unit	600	20 Unit	700	75 Unit		2.550	Dinkes Provsu		
					Jumlah Kab/Kota sehat		7 KK 3 Kegiatan, 10 Sarana	265	8 KK 3 Kegiatan, 10 Sarana	600	9 KK 3 Kegiatan, 30 Sarana	600	10 KK 3 Kegiatan, 30 Sarana	600	11KK 3 Kegiatan, 30 Sarana	600	3	2.665	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 10	8	Gerakan Aksi Penyelamatan Kawasan Danau Toba	Terlaksananya pertemuan kesehatan kawasan Danau Toba	1 Kota	186	1 Kota	450	1 Kota	500	1 Kota	600	1 Kota	700	1 Kota	2.436	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 10	9	Pilot Project Pembentukan Kota Sehat	Terlaksananya kota sehat	33 kab/kota	177										177	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 10	10	Perombaan Lingkungan bersih dan sehat																	
			1 02 01 02 01 10	11	Stimulan sarana kesehatan lingkungan Kabupaten/Kota Sehat	Terbangunnya unit sarana lingkungan sehat			5 unit	125	5 unit	500	5 unit	600	5 unit	700	5 unit	1.925	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 10	12	Sosialisasi program penyehatan Kabupaten/Kota sehat di Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya program kabupaten/kota sehat			3 Kab/kota	150	3 Kab/kota	150	3 Kab/Kota	150	3 Kab/Kota	150	3 Kab/Kota	600	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 10	13	Stimulan sarana kesehatan lingkungan di daerah wisata	Terbangunnya unit sarana lingkungan sehat di daerah wisata			6 Unit	110	24 Unit	400	26 Unit	500	28 Unit	600	84 Unit	1.610	Dinkes Provsu			
					Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan program penyehatan lingkungan		100%		100%		100%		100%									
			1 02 01 02 01 10	14	TOT santias total berbasis masyarakat (STBM) di Kabupaten	Tersedianya fasilitator STBM			20 Org	190	20 Org	200	20 Org	200	20 Org	200	100 Org	790	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 10	15	Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Terlaksananya STBM	6 desa	120	10 desa	150	14 desa	300	24 desa	400	30 desa	500	84 desa	1.470	Dinkes Provsu			
					Persentase keluarga menggunakan air bersih		60%		62%		64%		66%		0,68							
			1 02 01 02 01 10	16	Pengadaan stimulan sarana air bersih	Terbangunnya percontohan SAG				200		1.000		1.000		2.000		4.200	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 10	17	Pengawasan Penyehatan Air Minum di Kabupaten/Kota	Terpentannya kualitas Air yang dipergunakan oleh masyarakat			15 Unit	200	15 Unit	200	15 Unit	200	15 Unit	200	60 Unit	800	Dinkes Provsu			
					Persentase rumah sakit yang melakukan pengelolaa limbah medis RS				28 RS		38 RD		48 RS		58 RS							
			1 02 01 02 01 10	18	Sosialisasi Program Pengelolaan Limbah Medis Sarana Pelayanan Kesehatan di 6 Kab/Kota	Bertambah pengetahuan pengelolaan Sarana Pelayanan Kesehatan			66 orang	300	66 orang	300	66 orang	300	66 orang	300	66 orang	1.200	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 10	19	Training of trainer (TOT) Program Pengelolaan Limbah Medis Sarana pelayanan	Tersedianya tenaga yang mampu menjalankan program Pengelolaan Limbah Medis Sarana pelayanan			33Kab/ Kota	250	33kab/ Kota	250	33kab/ko ta	250	33kab/ Kota	250	33Kab/Kota	1.000	Dinkes Provsu			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			1 02 01 02 01 10 20	Pembinaan sanitasi rumah sakit di Kab/Kota	Diperolehnya informasi pelaksanaan sanitasi dan pengelolaan limbah Rumah Sakit				20 Rumah Sakit	80 Rumah Sakit	20 Rumah Sakit	200 Rumah Sakit	20 Rumah Sakit	300 Rumah Sakit	20 Rumah Sakit	400 Rumah Sakit	100 Rumah Sakit	980 Rumah Sakit	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 10 21	Inspeksi Limbah Medis sarana pelayanan kesehatan di Kab/Kota	Tersedianya informasi capaian program Limbah Medis Saranikes		45%		48%		51%		54%		0,57			33Kab/Kota	Dinkes Provsu			
					Persentase air minum yang diperiksa yang memenuhi syarat kesehatan																	
			1 02 01 02 01 10 22	Pengawasan kualitas air minum di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	Diperolehnya informasi kualitas air minum di PDAM				5 PDAM	150 PDAM	5 PDAM	150 PDAM	5 PDAM	150 PDAM	5 PDAM	150 PDAM	600 PDAM	Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 10 23	Pengawasan Depot Air Minum di Kab/Kota	Terlaksananya Sanitasi Depot Air minum,				33 Kab/Kota	200 Kab/Kota	33 Kab/Kota	200 Kab/Kota	33 Kab/Kota	200 Kab/Kota	33 Kab/Kota	200 Kab/Kota	800 Kab/Kota	Dinkes Provsu				
					Persentase Tempat-tempat Umum/TTU yang memenuhi Syarat Kesehatan,		75%		76%		77%		78%		0,79							
			1 02 01 02 01 10 24	Pertemuan hygiene sanitasi pasar Sehat di Kabupaten/Kota	Terlaksananya hygiene sanitasi di pasar tradisional				3 Kab/Kota	150							150	Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 10 25	Stimulan pembangunan percontohan sekolah sehat	Terbangunnya percontohan sekolah sehat				9 Unit	135	13 Unit	200	26 Unit	400	32 Unit	600	80 Unit	1.335	Dinkes Provsu			
					Jumlah Puskesmas yang memiliki klinik sanitasi		297 Pusk		300 Pusk		303 Pusk		306 Pusk		310 Pusk							
			1 02 01 02 01 10 26	Review Pembinaan Program Klinik Sanitasi di Kab/Kota	Diperolehnya informasi masalah pelaksanaan klinik sanitasi di puskesmas				20 Kab/Kota	280 Kab/Kota	20 Kab/Kota	280 Kab/Kota	20 Kab/Kota	280 Kab/Kota	20 Kab/Kota	280 Kab/Kota	20 Kab/Kota	1.120 Kab/Kota	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 10 27	Peningkatan prasarana klinik sanitasi di Sarana pelayanan primer di Kab/Kota	Meningkatnya pelaksanaan klinik sanitasi di Puskesmas				33 Pusk	235	33 Pusk	235	33 Pusk	235	33 Pusk	235	33 Pusk	165 Pusk	Dinkes Provsu			
					Persentase Tempat Pengelolaan Makanan/TPM yang memenuhi syarat kesehatan,		75%		77%		78%		79%		0,8							
			1 02 01 02 01 10 28	Pertemuan hygiene sanitasi depot air minum bagi pengusaha depot di Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi hygiene sanitasi pada depot air minum				125 orang/5 kabupat	325	125 orang/5 kabupat	325	125 orang/5 kabupat	325	125 orang/5 kabupat	325	125 orang/5 kabupat	1.300	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 10 29	Pertemuan hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM) bagi Rumah Tangga	Terlaksananya hygiene sanitasi TPM				125 orang/5 Kabupat	235	125 orang/5 Kabupat	235	125 orang/5 Kabupat	235	125 orang/5 Kabupat	235	125 orang/5 Kabupat	940 Kabupat	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 10 30	Pengawasan kualitas Makanan dan Minuman pada Rumah Makan/Restoran di Kab/Kota	Tersedianya informasi kualitas Makmin				5 Kab/Kota	150	5 Kab/Kota	150	5 Kab/Kota	150	5 Kab/Kota	150	5 Kab/Kota	600 Kab/Kota	Dinkes Provsu			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Menurunkan angka kesakitan dan kematian penduduk oleh karena penyakit menular dan dampak bencana wabah	Meningkatnya pengendalian kesehatan masyarakat karena penyakit menular dan dampak bencana wabah	Persentase desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) menjadi 100% tahun 2018	1 0 01 02 01 11 2	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Persentase desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI)	75%	80%	7.883	85%	23.066	90%	28.502	100%	27.648	100%	28.337	100%	115.436	Dinkes Prosu	Kab/Kota		
			1 02 01 02 01 11 1	Pencegahan penyakit menular dengan Imunisasi dasar lengkap	Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	78,40%	85%		88%		90%		92%		0,95				Dinkes Prosu	Kab/Kota		
			1 02 01 02 01 11 2	Pelaksanaan Program Pencegahan penyakit dengan imunisasi	Terlaksananya kegiatan pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dasar lengkap		33 Kab/Kota	422			33 Kab/Kota	700	33 Kab/Kota	900	33 Kab/Kota	1.000	33 Kab/Kota	3.022	Dinkes Prosu	Kab/Kota		
																			Dinkes Prosu	Kab/Kota		
			1 02 01 02 01 11 3	Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah Tingkat Dasar	Terlaksananya pemberian imunisasi lanjutan bagi anak sekolah tingkat dasar		>2/1.000 pddk		33 Kab/Mot	900	33 Kab/Kota	900	33 Kab/Kota	651	33 Kab/Kota	900	33 Kab/Kota	3.351	Dinkes Prosu	Kab/Kota		
					Angka Neri Acute Flaccid (AFP) pada anak usia <15 tahun per 100.000 pddk		>2/1.000 pddk		>2/1.000 pddk		>2/1.000 pddk		>2/1.000 pddk		>2/1.000 pddk							
			1 02 01 02 01 11 4	Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit (AFP)	Terbinanya kegiatan surveilans penyakit di kabupaten/kota				≥ 2/100.000 anak usia < 15 tahun	450	≥ 2/100.000 anak usia < 15 tahun	450	≥ 2/100.000 anak usia < 15 tahun	450	≥ 2/100.000 anak usia < 15 tahun	450	≥ 2/100.000 anak usia < 15 tahun	1.800	Dinkes Prosu	Kab/Kota		
			1 02 01 02 01 11 5	Pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (Surveilans PDI3)	Meningkatnya kegiatan surveilans penyakit menular & tidak menular, surveilans khusus PDI3 (Surveilans campak, difteri, pertusis dan Tetanus Neonatorum)				50% specimen dengan konfirmasi laboratorium dari kasus penyakit KLB	200	50% specimen dengan konfirmasi laboratorium dari kasus penyakit PDI3	200	50% specimen dengan konfirmasi laboratorium dari kasus penyakit PDI3	200	50% specimen dengan konfirmasi laboratorium dari kasus penyakit KLB	200	50% specimen dengan konfirmasi laboratorium dari kasus penyakit PDI3	800	Dinkes Prosu	Kab/Kota		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Jata capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			1 02 01 02 01 11	6 Peningkatan Surveilans Terpadu Penyakit (STP)	Meningkatnya kegiatan surveilans penyakit menular rutin terpadu, surveilans khusus, surveilans penyakit baru dan penyelidikan epidemiologi				33 kab/kota	200 kab/kota	33 kab/kota	200 kab/kota	33 kab/kota	200 kab/kota	33 kab/kota	200 kab/kota	33 kab/kota	800 Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 11	7 Seminar hasil surveilans	Terselenggaranya seminar hasil surveilans		65%		68%			70%	72%		0,75			800 Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 11	8 Pengendalian Penyakit Filaria	Menurunnya angka MF Rate menjadi < 1%		33 kab/kota	305										305 Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 11	9 Pemeriksaan Specimen filariasis	Alas Survey untuk pemeriksaan hasil SDJ				1800 smpl 3 pkt	9 1800 smpl 3 pkt	9 1800 smpl 3 pkt	9 1800 smpl 3 pkt	9 1800 smpl 3 pkt	9 1800 smpl 3 pkt	9 1800 smpl 3 pkt	9 1800 smpl 3 pkt	9 1800 smpl 3 pkt	36 Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 11	10 Bahan Pembantu Penentuan Prevalensi Mikrofilaria	Tetunah Sakitelenggaranya pelaksanaan SDJ di kab/kota				15 3 pkt	15 3 pkt	15 3 pkt	15 3 pkt	15 3 pkt	15 3 pkt	15 3 pkt	15 3 pkt	15 3 pkt	60 Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 11	11 Pemantauan dan Evaluasi Daerah endemis filariasis	Penyelidikan epidemiologi dan Rekomendasi penanggulangan kasus filariasis				10 kab/kota	85 kab/kota	10 kab/kota	85 kab/kota	10 kab/kota	85 kab/kota	10 kab/kota	85 kab/kota	10 kab/kota	340 Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 11	12 Survey Evaluasi Prevalensi Mikrofilaria	Menurunkan Mikrofilaria <1%				4 kab/kota	20 kab/kota	4 kab/kota	20 kab/kota	4 kab/kota	20 kab/kota	4 kab/kota	20 kab/kota	4 kab/kota	80 Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 11	13 Monitoring cakupan pengobatan musal filariasis	Cakupan pemberian obat musal pencegahan filariasis >68%				36 kab/kota	36 kab/kota	36 kab/kota	36 kab/kota	36 kab/kota	36 kab/kota	36 kab/kota	36 kab/kota	36 kab/kota	144 Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 11	14 Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan POM	Terselenggaranya pengobatan musal di kab/kota				2 kab/kota	70 kab/kota	2 kab/kota	70 kab/kota	2 kab/kota	70 kab/kota	2 kab/kota	70 kab/kota	2 kab/kota	280 Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 11	15 Pertemuan Pengendalian Vektor penular penyakit filariasis	Terselenggaranya pengendalian vektor di kab/kota		5 KK		10 KK		15 KK		20 KK		25 KK			600 Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 11	16 Penemuan dan Pengobatan Hepatitis B	Meningkatnya Penemuan dan Pengobatan Hepatitis B				33 kab/kota	300 kab/kota	33 kab/kota	300 kab/kota	33 kab/kota	300 kab/kota	33 kab/kota	300 kab/kota	33 kab/kota	1.200 Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 11	17 Sosialisasi hepatitis B di Kab/kota	Meningkatnya Penemuan dan Pengobatan Hepatitis B				20 kab/kota	264								264 Dinkes Provsu				
					Jumlah Kab/kota yang menyelenggarakan sosialisasi demam Thypoid		10 KK		20 KK		30 KK		33 KK		33 KK							
			1 02 01 02 01 11	18 Pengendalian Penyakit thypoid	Peningkatan upaya pengendalian Demam Typoid		10 Kab/Kota	204	10 Kab/Kot	240 Kab/Kota	10 Kab/Kota	240 Kab/Kota	10 Kab/Kota	240 Kab/Kota	10 Kab/Kot	240 Kab/Kota	10 Kab/Kota	1.164 Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 11	19 Sosialisasi Pengendalian Penyakit Demam Thypoid	Peningkatan Upaya Pengendalian Demam Thypoid				10 Kab/Kota	190								190 Dinkes Provsu				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Usia capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	B	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				20 Pembinaan Teknis dan Monitoring evaluasi Kasus Demam Thyphoid	Peningkatan Pengetahuan Upaya pencegahan & perilaku masyarakat tentang thypoid				33 Kab/Kot a	90 Kab/Kota	33 Kab/Kota	90 33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	90 33 Kab/Kota	33 Kab/Kot a	90 33 Kab/Kot	33 Kab/Kota	360 Dinkes Provsu			
					CFR diare pada saat KLB		<1,2%		<1,2%		<1%		<1%								
				21 Pengendalian Penyakit Diare	Peningkatan Upaya P2 Diare		33 Kab/Kota	88 33 Kab/Kota	33 Kab/Kot a	275 33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	400 33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	275 33 Kab/Kota	33 Kab/Kot a	275 33 Kab/Kot	33 Kab/Kota	1.313 Dinkes Provsu			
				22 Peningkatan Sistem Kewaspadaan dini (SKD) Diare	Menurunkan terjadinya KLB Diare			33 Kab/Kota	33 Kab/Kot a	253 33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	253 33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	253 33 Kab/Kota	33 Kab/Kot a	253 33 Kab/Kot	33 Kab/Kota	1.012 Dinkes Provsu			
				23 Sosialisasi Penatalaksanaan Diare	Meningkatkan tatalaksana Diare sesuai standar			10 Kab/Kot	10 Kab/Kot a	231 Kab/Kota		-		-		-		231 Dinkes Provsu			
					Prevalensi kecacingan pada anak sekolah		<20%		<20%		<20%		<20%		<20%						
				24 Pengendalian Penyakit Kecacingan	Menurunnya prevalensi kecacingan		<20%	204				204	<20%	204	<20%	204	<20%	816 Dinkes Provsu			
				25 Evaluasi Intenstias penyakit kecacingan pada Anak Usia Sekolah Dasar	Tertaksananya evaluasi intensitas penyakit kecacingan pada Anak Usia Sekolah Dasar				10 kab/kot a	150 kab/kot	10 kab/kota	150 kab/kota	10 kab/kota	150 kab/kota	10 kab/kot a	150 kab/kot	10 kab/kota	600 Dinkes Provsu			
				26 Pemberian Makan Obat Pada Anak Usia Sekolah Dasar	Tertaksananya makan obat pada anak usia sekolah dasar			10 Kab/kot	10 Kab/kot a	50 kab/kota	10 Kab/kota	50 Kab/kota	10 Kab/kota	50 Kab/kota	10 Kab/kot a	50 Kab/kot	10 Kab/kota	200 Dinkes Provsu			
				27 Pertemuan Advokasi dan Sosialisasi Program P2 Kecacingan	Tertaksananya advokasi dan sosialisasi Program P2 Kecacingan			33 kab/kot	33 kab/kot a	150 kab/kota	33 kab/kota	150 kab/kota	33 kab/kota	150 kab/kota	33 kab/kot a	150 kab/kot	33 kab/kota	600 Dinkes Provsu			
				28 Monitoring dan Evaluasi Advokasi dan sosialisasi Program P2 Kecacingan	Tertaksananya monitoring program P2 Kecacingan			10 kab/kot	10 kab/kot a	50 kab/kota	10 kab/kota	50 kab/kota	10 kab/kota	50 kab/kota	10 kab/kot a	50 kab/kot	10 kab/kota	200 Dinkes Provsu			
				29 Sosialisasi Program P2 Kecacingan	Tertaksananya sosialisasi program P2 Kecacingan				4 kab/kot	120 kab/kota		-		-		-		120 Dinkes Provsu			
					Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk	14,66/100.000 pdk	49/100.000 pdk		48/100.000 pdk		47/100.000 pdk		46/100.000 pdk		45/100.000 pdk						
				30 Pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue	Terselenggaranya penatalaksanaan (diagnose dan pengobatan) penyakit DBD		33 Kab/Kota	233 33 Kab/Kota	33 Kab/Kot a	233 33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	233 33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	233 33 Kab/Kota	33 Kab/Kot a	233 33 Kab/Kot	33 Kab/Kota	1.165 Dinkes Provsu			
				31 Pengujian Buffer Stock Rapid Diagnostic Test (RDT) Demam Berdarah Dengue	Terselainya NSI IgG/IgM testing		3 Pt	150 3 Pt	3 Pt	150 3 Pt	3 Pt	150 3 Pt	3 Pt	150 3 Pt	3 Pt	150 3 Pt	3 Pt	750 Dinkes Provsu			
				32 Pertemuan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengendalian DBD	Masyarakat di desa/kecamatan endemis DBD dapat terlibat dalam pengendalian DBD			33 Kab/Kot a	33 Kab/Kot a	250 Kab/Kota	33 Kab/Kota	250 Kab/Kota	33 Kab/Kota	250 Kab/Kota	33 Kab/Kot a	250 Kab/kot	33 Kab/Kota	1.000 Dinkes Provsu			
				33 Pertemuan Untas Sektor/Lintas Program Dalam Rangka Pengendalian DBD di Kab/Kota	Linias sektor/linias program strategis yang terkait dalam hal pengendalian DBD dapat terlibat secara aktif dan terpadu			33 Kab/Kot a	33 Kab/Kot a	250 Kab/Kota	33 Kab/Kota	250 Kab/Kota	33 Kab/Kota	250 Kab/Kota	33 Kab/Kot a	250 Kab/kot	33 Kab/Kota	1.000 Dinkes Provsu			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			1 02 01 02 01 11	34	Pertemuan Manajemen Kasus dan Faktor Risiko DBD & Arbovirus Lainnya	Tertindakannya manajemen kasus DBD & arbovirus lainnya di fasyankes dengan optimal dan pencegahan faktor risiko DBD & arbovirus lainnya di masyarakat			33 Kab/Kota	60 Kab/Kota	33 Kab/Kota	60 Kab/Kota	33 Kab/Kota	60 Kab/Kota	33 Kab/Kota	60 Kab/Kota	33 Kab/Kota	240	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11	35	Penyelidikan Epidemiologi (PE) Kasus DBD & Arbovirus Lainnya	Tertindakannya PE KLB kasus DBD di seluruh kab/kota			CFR DBD <1%	60	CFR DBD <1%	60	CFR DBD <1%	60	CFR DBD <1%	60	CFR DBD <1%	240	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11	36	Surveilans Vektor Demam Berdarah Dengue (DBD)	Pelaksanaan Program P2 DBD & Arbovirus lainnya di Sumatera Utara dapat berjalan optimal serta sesuai dengan prosedur & tata laksana yang sesuai			33 Kab/Kota	50 Kab/Kota	33 Kab/Kota	50 Kab/Kota	33 Kab/Kota	50 Kab/Kota	33 Kab/Kota	50 Kab/Kota	33 Kab/Kota	200	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11	37	Studi Mortalitas Kasus DBD di Kabupaten/Kota	Tertindakannya pelaksanaan kasus kematian DBD di seluruh kab/kota			CFR DBD <1%	60	CFR DBD <1%	60	CFR DBD <1%	60	CFR DBD <1%	60	CFR DBD <1%	240	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11	38	Advokasi Program P2 DBD & Arbovirus Lainnya di Kab/Kota	Tertindakannya komitmen pemerintah daerah dalam pengendalian DBD & arbovirus lainnya			33 Kab/Kota	200 Kab/Kota	33 Kab/Kota	200 Kab/Kota	33 Kab/Kota	200 Kab/Kota	33 Kab/Kota	200 Kab/Kota	33 Kab/Kota	800	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11	39	Penelitian ilmiah terkait demam berdarah dengue (DBD)	Adanya penelitian ilmiah terkait DBD yang berhubungan dengan kasus, virus Dengue, dan inovasi pengendalian penyakit			1 Penelitian	100	1 Penelitian	100	1 Penelitian	100	1 Penelitian	100	5 Penelitian	400	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11	40	Pertemuan Revitalisasi Kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik) di Kabupaten/Kota	Revitalisasi kader jumantik di seluruh desa/kelurahan endemis DBD			20 desa di 30 kab/kota	300	20 desa di 30 kab/kota	300	20 desa di 30 kab/kota	300	20 desa di 30 kab/kota	300	20 desa di 30 kab/kota	1.200	Dinkes Provsu			
					Angka Penemuan kasus malaria per 1000 penduduk (API)	Angka Penemuan kasus malaria per 1000 penduduk	0,72/1000 pddk	1/1000 pddk	0,8/1000 pddk		0,7/1000 pddk		0,6/1000 pddk									
			1 02 01 02 01 11	41	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit/Pengendalian Penyakit Malaria	Terselenggaranya penatalaksanaan (diagnose dan pengobatan) kasus malaria yang benar menuju eliminasi malaria		323										323	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11	42	Pertemuan Evaluasi Program P2 Malaria dan Perencanaan Tahun 2016	Tertindakannya pertemuan evaluasi program pengendalian malaria tahun 2015 dan Tersusunnya rencana kegiatan thn 2016			33 Kab/Kota	138	33 Kab/Kota	138	33 Kab/Kota	138	33 Kab/Kota	138	33 Kab/Kota	552	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11	43	Work Shop Penatalaksanaan Kasus malaria bagi Petugas di sarana pelayanan kesehatan Kab/Kota	Tertindakannya work shop penatalaksanaan kasus malaria bagi petugas Kabupaten, Rumah Sakit dan Puskesmas untuk meningkatkan kompetensi/kemampuan petugas dalam hal tatalaksana kasus malaria bagi Petugas Rumah Sakit dan Puskesmas			10 Kab/Kota	250	10 Kab/Kota	250	10 Kab/Kota	250	10 Kab/Kota	250	10 Kab/Kota	1.000	Dinkes Provsu			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			1 02 01 02 01 11 44	Work Shop Tatalaksana Laboratorium bagi Petugas di Kab/Kota	Terlaksananya work shop tatalaksana Laboratorium Malaria yang sesuai dengan standar operasional Prosedur (SOP)				10 Kab/Kota		150 10 Kab/Kota	150 10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	150 10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	150 10 Kab/Kota	600	Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 11 45	Pelatihan Tatalaksana Malaria bagi dokter Rumah Sakit	terlaluinya dokter yang bertugas di Rumah Salit,tentang tatalaksana malaria sebagai pusat rujukan			260	33 Org dokter Rumah Sakit		33 Org dokter Rumah Sakit	260	33 Org dokter Rumah Sakit	260	33 Org dokter Rumah Sakit	260	33 Org dokter Rumah Sakit	1.040	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11 46	Pelatihan Tatalaksana Malaria bagi dokter Puskesmas	terlaluinya dokter yang bertugas di puskt. Tentang tatalaksana malaria			220	20 Org dokter Puskesmas		20 Org dokter Puskesmas	220	20 Org dokter Puskesmas	220	20 Org dokter Puskesmas	220	20 Org dokter Puskesmas	880	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11 47	Pelatihan Petugas Mikroskopis Kabupaten	terlaluinya petugas mikroskopis malaria di kabupaten			220	20 Org Pet Mikroskopi Kabupaten		20 Org Pet Mikroskopi Kabupaten	220	20 Org Pet Mikroskopi Kabupaten	220	20 Org Pet Mikroskopi Kabupaten	220	20 Org Pet Mikroskopi Kabupaten	880	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11 48	Pelatihan Petugas Mikroskopis di Sarana Pelayanan Primer	terlaluinya petugas mikroskopis malaria di puskesmas endemis			220	20 Org Orang Pet Mikroskopi Puskesmas		20 Org Orang Pet Mikroskopi Puskesmas	220	20 Org Orang Pet Mikroskopi Puskesmas	220	20 Org Orang Pet Mikroskopi Puskesmas	220	20 Org Orang Pet Mikroskopi Puskesmas	880	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11 49	Mass Blood Survey	Diketahuinya suatu wilayah sebagai daerah endemis malaria baru atau sporadik maupun bebas malaria			70	10 Kab/Kota		10 Kab/Kota	70	10 Kab/Kota	70	10 Kab/Kota	70	10 Kab/Kota	280	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11 50	Pelaksanaan Rapid Village survey daerah fokus	Terlaksananya rapid village survey daerah fokus						10 Kab/Kota	100 10 Kab/Kota	100 10 Kab/Kota	100 10 Kab/Kota	100 10 Kab/Kota	100 10 Kab/Kota	300	Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 11 51	Workshop Hari Malaria Sedunia Tahun 2015	Terlaksananya peringatan HMS dalam rangka meninjau program EM tahun 2030.			1 Keg	1 Keg	90 1 Keg	90 1 Keg	90 1 Keg	90 1 Keg	90 1 Keg	90 1 Keg	90 1 Keg	360	Dinkes Provsu				
					Angka Case Detection Rate Penyakit TB Tersosialisasinya program TB di Fasyankes			83%	84%	200 4 Fasyankes	85%	300 4 Fasyankes	86%	200 4 Fasyankes	200 4 Fasyankes	200 4 Fasyankes	1.060	Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 11 52	Ekskasi TB Dengan Strategy Directly Observe Treatment Short Course (DOTS) ke fasilitas pelayanan kesehatan lain	pengobatan TB dengan strategi DOTS di DPS			10 Kab/Kota	27 10 Kab/Kota	55 10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	200 10 Kab/Kota	55 10 Kab/Kota	55 10 Kab/Kota	55 10 Kab/Kota	55 10 Kab/Kota	392	Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 11 54	Sosialisai TB-MDR (TB Multi Drugs)				15 Kab/Kota	73 Kab/Kota								73	Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 11 55	Workshop Program TB dengan Strategi DOTS pada DPS	Bertambahnya DPS yang ikut dlm Program TB dengan Strategi DOTS			2 Keg	2 Keg	44 2 Keg	44 2 Keg	44 2 Keg	44 2 Keg	44 2 Keg	44 2 Keg	44 2 Keg	176	Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 11 56	Penemuan dan pengobatan pasien TB di fasilitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya Penemuan dan pengobatan pasien TB di fasilitas pelayanan kesehatan			33 Kab/Kota	100 33 Kab/Kota	100 33 Kab/Kota	100 33 Kab/Kota	100 33 Kab/Kota	100 33 Kab/Kota	100 33 Kab/Kota	100 33 Kab/Kota	150 33 Kab/Kota	350	Dinkes Provsu				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			1 02 01 02 01 11 57	Promosi TB aktif ke Masyarakat	Meningkatnya Penemuan dan pengobatan pasien TB di fasilitas pelayanan kesehatan						33 Kab/Kota	100 33 Kab/Kota	100 33 Kab/Kota	100 33 Kab/Kota	150 33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	350	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 11 58	Jejaring Internal kasus TB di Rumah sakit	Meningkatnya jumlah jejaring Internal kasus TB di Rumah sakit						33 Kab/Kota	100 33 Kab/Kota	100 33 Kab/Kota	100 33 Kab/Kota	150 33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	350	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 11 59	Cross check slide sputum ke Laboratorium rujukan provinsi	Meningkatnya jumlah Cross check slide sputum ke Laboratorium rujukan provinsi						750 slide	100 750 slide	100 750 slide	100 750 slide	100 750 slide	300	Dinkes Provsu						
			1 02 01 02 01 11 60	Penerapan PPM dan ISTC di tiap kabupaten Kota	Meningkatnya jumlah PPM dan ISTC di tiap kabupaten Kota						33 Kab/Kab	200 33 Kab/Kab	200 33 Kab/Kab	200 33 Kab/Kab	200 33 Kab/Kab	600	Dinkes Provsu						
			1 02 01 02 01 11 61	Jejaring layanan TB DOTS di tiap kab/Kota	Meningkatnya Jejaring layanan TB DOTS di tiap kab/Kota						33 Kab/Kab	200 33 Kab/Kab	200 33 Kab/Kab	200 33 Kab/Kab	200 33 Kab/Kab	600	Dinkes Provsu						
			1 02 01 02 01 11 62	Peningkatan Pemantauan Kesehatan oleh UPT Labkes di Luar gedung	Terlaksananya pelayanan kesehatan (Laboratorium) di luar gedung		20 Kab/Kota	403								403	Dinkes Provsu						
					Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Success Rate)		>95%		>95%		>95%		>95%										
			1 02 01 02 01 11 63	Pembinaan Program TB dengan Strategy DOTS untuk meningkatkan Success Rate (SR)	Meningkatnya kemampuan petugas laboratorium TB		10 Kab/Kota	19			33 Kab/Kota	200 33 Kab/Kota	250 33 Kab/Kota	300 33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	769	Dinkes Provsu						
			1 02 01 02 01 11 64	Workshop Pelaksanaan Laboratorium Intermediate TB Provinsi	Meningkatkan kemampuan petugas laboratorium TB			5 kab/kota	154 5 kab/kota		5 kab/kota	160 5 kab/kota	170 5 kab/kota	180 5 kab/kota	5 kab/kota	664	Dinkes Provsu						
			1 02 01 02 01 11 65	Jejaring eksternal program TB DOTS	Meningkatkan jejaring eksternal			3 kab/kota	55 3 kab/kota		55 3 kab/kota	55 3 kab/kota	55 3 kab/kota	55 3 kab/kota	220	Dinkes Provsu							
			1 02 01 02 01 11 66	Workshop TB-MDR (Multi Drug Resisten)	Meningkatkan kemampuan fasyankes dalam penatalaksanaan pasien TB-MDR			1 keg	94							94	Dinkes Provsu						
			1 02 01 02 01 11 67	Workshop IPT	Meningkatkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan dalam pemberian INH pada pasien HIV			1 keg	45							45	Dinkes Provsu						
			1 02 01 02 01 11 68	Pembinaan Fasilitas pelayanan Kesehatan TB-MDR (Multi Drug Resisten)	Meningkatkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan dalam Penatalaksanaan pasien TB-MDR			15 kab/kota	270 15 kab/kota		15 kab/kota	270 15 kab/kota	270 15 kab/kota	270 15 kab/kota	270 15 kab/kota	1.080	Dinkes Provsu						
			1 02 01 02 01 11 69	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program TB	Terlaksananya program TB di Kab/Kota		33 Kab/Kota	117			33 Kab/Kota	200			33 Kab/Kota	200 33 Kab/Kota	517	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 11 70	Pemantapan Petugas analisis laboratorium PRM/PPM/RS Kab/Kota	Terlaksananya pemantapan analisis laboratorium PRM/PPM dan RS		33 Kab/Kota	300			33 Kab/Kota	200			33 Kab/Kota	200 33 Kab/Kota	700	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 11 71	Penyuluhan dan tatalaksana pengobatan TB pada penderita baru dengan bantuan PMO	Meningkatnya angka keberhasilan pengobatan TB						33 kab/kota	200				200	Dinkes Provsu						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			1 02 01 02 01 11	72	Peningkatan jejaring eksternal TB RS sesuai alamat pasien	Meningkatnya jumlah jejaring eksternal TB RS sesuai alamat pasien	165/100.000 pddk		170/100.000 pddk		175/100.000 pddk	180/100.000 pddk	185/100.000 pddk					600	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11	73	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program TB	Monitoring dan Evaluasi TB			1 kg	150	1 kg	150	1 kg	150	1 kg	150	1 kg	600	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11	74	Workshop TB-HIV	Meningkatkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan dalam Penatalaksanaan pasien TB-HIV		15 kab/kot a	80	15 kab/kota	80	15 kab/kota	80	15 kab/kota	80	15 kab/kota	80	15 kab/kota	320	Dinkes Provsu		
			1 02 01 02 01 11	75	Pelatihan Fasilitas pelayanan kesehatan bagi Dokter dan Petugas TB	Meningkatkan kognitif, efektif, dan psikomotor Dokter dan Petugas TB di Fasilitas		33 Kab/Kot a	340	33 Kab/Kota	340	33 Kab/Kota	340	33 Kab/Kota	340	33 Kab/Kota	340	33 Kab/Kota	1.360	Dinkes Provsu		
			1 02 01 02 01 11	76	Pelatihan Mikroskopis TB bagi Petugas Laboratorium	Meningkatkan kognitif, efektif, dan psikomotor Petugas Laboratorium TB		33 Kab/Kot a	220	33 Kab/Kota	220	33 Kab/Kota	220	33 Kab/Kota	220	33 Kab/Kota	220	33 Kab/Kota	880	Dinkes Provsu		
			1 02 01 02 01 11	77	Workshop TB-Anak	Meningkatkan kemampuan fasyankes dalam penatalaksanaan pasien TB-Anak		33 Kab/Kot a	80	33 Kab/Kota	80	33 Kab/Kota	80	33 Kab/Kota	80	33 Kab/Kota	80	33 Kab/Kota	320	Dinkes Provsu		
						Persentase Kasus IMS yang diperiksa dan diobati	45%		50%		70%		75%		0,8							
			1 02 01 02 01 11	78	Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program P2HIV dan IMS	Diperolehnya informasi program P2HIV dan IMS dari dan Bagi Kab./Kota.		33 Kab/Kot a	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	800	Dinkes Provsu		
			1 02 01 02 01 11	79	Update Pedoman Penatalaksanaan Infeksi Menular seksual (IMS)	Dilaksanakannya update pedoman penatalaksanaan IMS		33 Kab/Kot a	150	33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	600	Dinkes Provsu		
			1 02 01 02 01 11	80	Pengadaan Bahan Laboratorium Infeksi menular seksual (IMS) dan voluntary counseling test (VCT)	Diperolehnya bahan laboratorium untuk layanan IMS dan VCT		33 Kab/Kot a	160	33 Kab/Kota	160	33 Kab/Kota	160	33 Kab/Kota	160	33 Kab/Kota	160	33 Kab/Kota	640	Dinkes Provsu		
			1 02 01 02 01 11	81	Advokasi 4 indikator MDC's Program HIV/AIDS	Dilaksanakannya advokasi 4 indikator MDC's Program HIV/AIDS ke Kab. Kota		33 Kab/Kot a	100	33 Kab/Kota	100							200	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11	82	Validasi Data di Layanan VCT dan IMS	Dilaksanakannya validasi data di layanan VCT dan IMS		33 Kab/Kot a	40	33 Kab/Kota	40	33 Kab/Kota	40	33 Kab/Kota	40	33 Kab/Kota	40	33 Kab/Kota	160	Dinkes Provsu		
			1 02 01 02 01 11	83	Pengendalian Penyakit Infeksi Menular seksual (IMS)	Terselenggaranya pelayanan IMS		241 33 Kab/Kot a	180	33 Kab/Kota	180	33 Kab/Kota	180	33 Kab/Kota	180	33 Kab/Kota	180	33 Kab/Kota	961	Dinkes Provsu		
						Persentase Ibu hamil HIV positif mendapat ARV	50%		60%		70%		75%		0,85							
			1 02 01 02 01 11	84	Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak (PPIA)	Terselenggaranya pelayanan HIV pada Ibu hamil		33 Kab/Kota	205									205	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11	85	Pelatihan Prevention Mother To Child Transmissions (PMTCT)	Dilatihnya Petugas kesehatan untuk mampu dan terampil dalam upaya pencegahan penularan HIV/AIDS dari Ibu ke anak		33 Kab/Kot a	180	33 Kab/Kota	180	33 Kab/Kota	180	33 Kab/Kota	180	33 Kab/Kota	180	33 Kab/Kota	720	Dinkes Provsu		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Unit capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			1 02 01 02 01 11	86	Sosialisasi Prevention Mother to Child Transmissions) PMTCT	Tersosialisasinya PMTCT bagi petugas kesehatan kab./kota			33	Kab/Kota							33	Kab/Kota	Dinkes Provsu			
					Jumlah penduduk Kelompok usia >15 tahun yang mengikuti test HIV	12.000 org	12.000 org		13.000 org		14.000 org		15.000 org		16.000 org							
			1 02 01 02 01 11	87	Konseling dan Testing HIV-AIDS	Terselenggaranya pelayanan konseling dan testing HIV AIDS kelompok usia > 15 tahun	33	212			33	Kab/Kota	200	33	Kab/Kota	400	33	Kab/Kota	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11	88	Workshop Konseling dan Tes HIV	Dilatihnya Petugas Kesehatan kab./kota untuk mampu dan terampil dalam konseling dan testing HIV			11	Kab/Kota	130	11	130						260	Dinkes Provsu		
			1 02 01 02 01 11	89	Workshop TPK (Tes Inisiasi Petugas Kesehatan)	Terlaksananya workshop TPK di 4 kab. Kota			4	Kab/Kota	60	4	60				8	Kab/Kota	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11	90	Monitoring Layanan Voluntary Counseling Test (VCT) dan Infeksi menular seksual (IMS) di Rumah Sakit	Dilaksanakannya monitoring layanan konseling dan testing HIV dan layanan infeksi menular seksual di Rumah Sakit/Puskesmas			33	Kab/Kota	350	33	350	33	Kab/Kota	350	33	Kab/Kota	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11	91	Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan KORPRI/PNS dan Keluarga	Disosialisasinya P4GN di Lingkungan KORPRI/PNS dan Keluarga			33	Kab/Kota	100								100	Dinkes Provsu		
			1 02 01 02 01 11	92	Workshop Estimasi Populasi Risiko Tinggi dan ODHA bagi Kab/Kota	Dilatihnya petugas Kab/Kota dalam membuat estimasi populasi risti dan ODHA di Kab/Kota	80%		33	Kab/Kota	200	33	200		33	Kab/Kota	200	33	Kab/Kota	Dinkes Provsu		
					Persentase ODHA mendapatkan pengobatan ART				82%		83%		84%		0,85							
			1 02 01 02 01 11	93	Workshop Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP) terhadap ODHA	Dilatihnya Petugas Kesehatan kab./kota untuk mampu dan terampil dalam Perawatan, Dukungan dan Pengobatan			10	Kab/Kota	150	10	150	10	Kab/Kota				450	Dinkes Provsu		
			1 02 01 02 01 11	94	Pengadaan Mesin dan Reagen CD4 serta alat pendukung	Diperolehnya Mesin dan Reagen CD4 serta alat pendukung untuk menunjang diagnostik awal terapi ARV			1 Pkt	600									600	Dinkes Provsu		
			1 02 01 02 01 11	95	Pelatihan CST dan LBK, desentralisasi ARV	Meningkatnya jumlah petugas mampu CST dan LBK, desentralisasi ARV					33	Kab/Kota	200							Dinkes Provsu		
			1 02 01 02 01 11	96	Mentoring Klinis Layanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP) Baru terhadap ODHA	Dilaksanakannya mentoring Klinis ARV ke layanan PDP yang baru			4	Kab/Kota	70	4	70	4	Kab/Kota	70	4	Kab/Kota	280	Dinkes Provsu		
			1 02 01 02 01 11	97	Monitoring dan evaluasi Layanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP) terhadap ODHA	Dilaksanakannya monitoring layanan ARV di Rumah Sakit			4	Kab/Kota	35	4	35	4	Kab/Kota	35	4	Kab/Kota	140	Dinkes Provsu		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
							B	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			1 02 01 02 01 11	98	Pendampingan dan Penjangkauan ODHA	Meningkatnya jumlah ODHA yang dilampangi												600	Dinkes Provsu			
							90%	92%			94%		95%		>95%							
			1 02 01 02 01 11	99	Pengendalian Penyakit rabies	Peningkatan Upaya P2 Rabies	33 kab/kota	250			33 kab/kota	400	33 kab/kota	500	33 kab/kota	400	33 kab/kota	1.550	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11	100	Pengumpulan data, analisa dan desiminasi informasi kasus dan faktor resiko zoonosis (flu burung, rabies dan leptospirosis)	Terselenggaranya kegiatan surveilans epidemiologi zoonosis oleh district surveilans officer dan province surveilans officer	kelengkapan laporan (90%), ketepatan n (80%)	228			kelengkapan laporan (90%), ketepatan n (80%)	200	kelengkapan laporan (90%), ketepatan n (80%)	200	kelengkapan laporan (90%), ketepatan n (80%)	200	kelengkapan laporan (90%), ketepatan n (80%)	828	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11	101	Investigasi dan Pelaporan kasus-kasus zoonosis (flu burung, rabies, leptospirosis)	Terselenggaranya penyelidikan epidemiologi dan rekomendasi penanggulangan kasus termasuk KLB zoonosis	100%	280			100%	200	100%	200	100%	200	100%	880	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11	102	Integrasi Peningkatan Perlindungan masyarakat terhadap penyakit zoonosis (flu Burung,rabies,antraks,leptospirosis)	Peningkatan kerjasama dan kapasitas petugas serta Tersedianya rumusan upaya pembaharuan daerah terhadap dampak zoonosis		33 kab/kota	275	33 kab/kota	275	33 kab/kota	275	33 kab/kota	275	33 kab/kota	275	33 kab/kota	1.100	Dinkes Provsu		
			1 02 01 02 01 11	103	Workshop pengendalian zoonosis dan update data kasus zoonosis	peningkatan kemampuan petugas dan validasi data zoonosis		kelengkapan laporan (90%) ketepatan n(80)	280		kelengkapan laporan (90%) ketepatan n(80)	280	kelengkapan laporan (90%) ketepatan n(80)	280	kelengkapan laporan (90%) ketepatan n(80)	280	kelengkapan laporan (90%) ketepatan n(80)	1.120	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11	104	Penyelidikan Epidemiologi zoonosis (flu burung, rabies, antraks, leptospirosis)	Terselenggaranya penyelidikan epidemiologi dan rekomendasi penanggulangan kasus termasuk KLB zoonosis		kelengkapan laporan (90%) ketepatan n(80)	260 kab/kota	260 kab/kota	260 kab/kota	260 kab/kota	260 kab/kota	260 kab/kota	260 kab/kota	260 kab/kota	260 kab/kota	1.040	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11	105	Sosialisasi Usaha Pemberdayaan pengendalian penyebaran zoonosis pada petugas masyarakat dan monitoring Rabies.Center	Kasus - kasus zoonosis ditangani sesuai standar		10 kab/kota	350	10 kab/kota	350	10 kab/kota	350	10 kab/kota	350	10 kab/kota	350	10 kab/kota	1.400	Dinkes Provsu		
						Angka kematian jemaah haji kurang dari 2 hari per 1000 jemaah haji	<2/1000 jemaah haji	<2/1000 jemaah haji		<2/1000 jemaah haji		<2/1000 jemaah haji		<2/1000 jemaah haji		<2/1000 jemaah haji						
			1 02 01 02 01 11	106	Pertemuan Surveilans Kesehatan Haji	Tersedianya Informasi penyelenggaraan pelayanan jemaah haji	33 Kab/kota	118	33 Kab/Kota	200	33 Kab/kota	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/kota	200	33 Kab/Kota	918	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11	107	Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan Haji	Penyamaan persepsi Provinsi & Kab/Kota dalam pelaksanaan program kesehatan haji	33 Kab/Kota	130	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	930	Dinkes Provsu			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
			1 02 01 02 01 11 108	Pelayanan kesehatan haji	Terkendalinya penularan penyakit pada jemaah haji		33 Kab/Kota	130	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	930	Dinkes Provsu					
					Persentase desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI)	78,40%	80%				90%		95%		1									
			1 02 01 02 01 11 109	Gerakan Akselerasi Imunisasi (UCI)	Terselenggaranya gerakan akselerasi imunisasi		33 kab/kota	588	33 kab/kota	400	33 kab/kota	600	33 kab/kota	600	33 kab/kota	700	33 kab/kota	2.888	Dinkes Provsu					
					Persentase penyelidikan epidemiologi < 24 jam pada desa/kelurahan terjadi KLB		100%		100%		100%		100%		1									
			1 02 01 02 01 11 110	Peningkatan Kelengkapan dan Ketepatan Laporan Mingguan Wabah (W2)	Terlaksananya penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan wabah		33 kab/kota	75	33 kab/kota	75	33 kab/kota	150	33 kab/kota	200	33 kab/kota	250	33 kab/kota	750	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 11 111	Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan wabah	Terlaksananya penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan wabah				33 kab/kota	250	33 kab/kota	250	33 kab/kota	250	33 kab/kota	250	33 kab/kota	1.000	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 11 112	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan Paru Masyarakat (KPM)	Peningkatan mutu tenaga kesehatan di KPM				1 Keg	100	1 Keg	100	1 Keg	100	1 Keg	100	1 Keg	400	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 11 113	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan Paru Masyarakat (KPM)	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di KPM				1 Keg	100	1 Keg	100	1 Keg	100	1 Keg	100	1 Keg	400	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 11 114	Peningkatan pelayanan kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan Paru Masyarakat (KPM) di luar gedung (X-Ray kelling) oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan Paru Masyarakat (KPM)	Terselenggaranya pelayanan X-Ray kelling bagi pasien paru di kab/kota				20 Kab/Kota	1.000	20 Kab/Kota	1.000	20 Kab/Kota	1.000	20 Kab/Kota	900	20 Kab/Kota	3.900	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 11 115	Penyediaan Fasilitas deteksi dini terkait penyakit akibat rokok	Terlaksananya penderita PTM terikat rokok di sarana pelayanan kesehatan				1 Pt	900	1 Pt	900	1 Pt	900	1 Pt	900	1 Pt	3.600	Dinkes Provsu					
					Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan penanggulangan dan penanganan wabah dan bencana		33 KK		33 KK		33 KK		33 KK		33 KK									
			1 02 01 02 01 11 116	Peningkatan Penanggulangan KLB dan Bencana	Terlaksananya kegiatan penanggulangan KLB dan Bencana		33 Kab/kota	250	33 Kab/kota	250	33 Kab/kota	250	33 Kab/kota	250	33 Kab/kota	250	33 Kab/kota	1.250	Dinkes Provsu					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Usia capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SIKRO Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SIKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			1 02 01 02 01 11	117	Penyediaan sarana dan prasarana penanganan bencana	Tersedianya barang dan bahan pendukung penanganan bencana	Kab/kota	10	250	10 Kab/hot	150	10 Kab/kota	150	10 Kab/kota	150	10 Kab/hot	150	10 Kab/kota	850	Dinkes Provsu		
			1 02 01 02 01 11	118	Pembinaan manajemen bencana Kab/kota	Tertelaksananya kegiatan manajemen bencana kab/kota	33 Kab/kota	125	33 Kab/hot	200	33 Kab/kota	200	33 Kab/kota	200	33 Kab/hot	200	33 Kab/kota	925	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11	119	Rapid Health Assessment (RHA) pada kejadian bencana	Tertelaksananya penilaian cepat bidang kesehatan pada kejadian bencana			33 Kab/hot	250	33 Kab/kota	250	33 Kab/kota	250	33 Kab/hot	250	33 Kab/kota	1.000	Dinkes Provsu			
						Cakupan penemuan dan tatalaksana kasus pneumonia pada balita	20%		25%		30%		35%		0,4							
			1 02 01 02 01 11	120	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit/Penyakit ISPA	Terselenggaranya penatalaksanaan (diagnose dan pengobatan) kasus ISPA	33 Kab/kota	346			33 Kab/kota	300	33 Kab/kota	400	33 Kab/hot	500	33 Kab/kota	1.546	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11	121	Sosialisasi tatalaksana kasus Infeksi Saluran pernafasan akut (ISPA) di Kab/kota	Terselenggaranya sosialisasi tatalaksana kasus ISPA di kab/kota			15 Kab/hot	250	15 Kab/kota	250	15 Kab/kota	250	15 Kab/hot	250	15 Kab/kota	1.000	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11	122	Workshop LS/LP Pengendalian Infeksi Saluran pernafasan akut (ISPA) di Kab/kota	Terselenggaranya kegiatan Workshop LS/LP Pengendalian ISPA di Kab/kota			15 Kab/hot	250	15 Kab/kota	250	15 Kab/kota	250	15 Kab/hot	250	15 Kab/kota	1.000	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11	123	Pelaksanaan Care Seeking pneumonia di Kab/kota	Terselenggaranya Care Seeking di Kab/kota			7 Kab/hot	100	7 Kab/kota	100	7 Kab/kota	100	7 Kab/hot	100	7 Kab/kota	400	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11	124	Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program P2 ISPA di Provinsi	Terselenggaranya Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program P2 ISPA di Provinsi			33 kk	150	33 kk	150	33 kk	150	33 kk	150	33 kk	600	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11	125	Sosialisasi Pemantapan Cakupan Program P2 ISPA	Meningkatnya cakupan Pneumonia yakni 10% dari jumlah balita	33KK		10 Kab/hot	300	10 Kab/kota	300	10 Kab/kota	300	10 Kab/hot	300	10 Kab/kota	1.200	Dinkes Provsu			
					Persentase Kab/kota Yang Melakukan Surveillans Deteksi Dini & KIE Penyakit Tidak Menular		33KK		33KK		33KK		33KK		33KK							
	Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular pada kelompok resiko	Peningkatan pengendalian faktor resiko penyakit tidak degeneratif dan penyakit gaya hidup pada kelompok resiko	Persentase kab/kota yg melaksanakan inspeksi Visual Asam aseta (IVA) dan Clinical Breast Examination (CBE)	1 02 01 02 01 11	126	Pertemuan PTM dalam rangka Monev IVA dan CBE		130				200		200		200		730	Dinkes Provsu			
				1 02 01 02 01 11	127	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program PTM	Terevaluasinya dan terbinanya kegiatan program PPTM di masing-masing kab/kota di provinsi Sumatera Utara	33 Kab/kota	115			33 Kab/kota	200	33 Kab/kota	200	33 Kab/hot	200	33 Kab/kota	715	Dinkes Provsu		
				1 02 01 02 01 11	128	Pertemuan evaluasi PTM	Terevaluasinya dan terbinanya kegiatan program PPTM di masing-masing kab/kota di provinsi Sumatera Utara	33 Kab/kota	180			33 Kab/kota	200	33 Kab/kota	200	33 Kab/hot	200	33 Kab/kota	780	Dinkes Provsu		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi						
							Tahun 1			Tahun 2			Tahun 3			Tahun 4			Tahun 5					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp				Target	Rp		Target	Rp	
							8	9		10	11		12	13		14	15		16	17				18	19		20	21	
1	2	3	4	5	6	7	2 KI	160			2 KI	200	2 KI	200	2 KI	200	2 KI	200	2 KI	200	2 KI	760	Dinkes Provsu						
							1 KI	140			1 KI	200	1 KI	200	1 KI	200	1 KI	200	1 KI	200	1 KI	740	Dinkes Provsu						
										33 Kab/kota	165	33 Kab/kota	165	33 Kab/kota	165	33 Kab/kota	165	33 Kab/kota	165	33 Kab/kota	165	33 Kab/kota	660	Dinkes Provsu					
										33 Kab/kota	140	33 Kab/kota	140	33 Kab/kota	140	33 Kab/kota	140	33 Kab/kota	140	33 Kab/kota	140	33 Kab/kota	560	Dinkes Provsu					
										6 Kab/kota	400	6 Kab/kota	400	6 Kab/kota	400	6 Kab/kota	400	6 Kab/kota	400	6 Kab/kota	400	6 Kab/kota	1.600	Dinkes Provsu					
										6 Kab/kota	220	6 Kab/kota	220	6 Kab/kota	220	6 Kab/kota	220	6 Kab/kota	220	6 Kab/kota	220	6 Kab/kota	880	Dinkes Provsu					
										5 org. 11 Kab/kota	190	5 org. 11 Kab/kota	190	5 org. 11 Kab/kota	190	5 org. 11 Kab/kota	190	5 org. 11 Kab/kota	190	5 org. 11 Kab/kota	190	5 org. 11 Kab/kota	760	Dinkes Provsu					
										3 Kab/kota	180	3 Kab/kota	180	3 Kab/kota	180	3 Kab/kota	180	3 Kab/kota	180	3 Kab/kota	180	3 Kab/kota	720	Dinkes Provsu					
										20 Kab/kota	480	20 Kab/kota	480	20 Kab/kota	480	20 Kab/kota	480	20 Kab/kota	480	20 Kab/kota	480	20 Kab/kota	1.920	Dinkes Provsu					
										<0,6/100.000 pdak		<0,6/100.000 pdak		<0,6/100.000 pdak		<0,6/100.000 pdak		<0,6/100.000 pdak		<0,6/100.000 pdak									
										339												339	Dinkes Provsu						
										200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	800	Dinkes Provsu						
										20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	80	Dinkes Provsu						
										80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	320	Dinkes Provsu						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Uraian capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					Angka penemuan kasus baru kusta per 100.000 penduduk		<5/100.000 pddk		<5/100.000 pddk		<5/100.000 pddk		<5/100.000 pddk		<5/100.000 pddk							
			1 02 01 02 01 11 143	Pengendalian Penyakit Kusta	Tersedianya informasi penemuan baru kusta di kabupaten/kota		33 Kab/Kota	273 Kab/kot	33 Kab/kot		33 Kab/Kota	300 Kab/Kota	33 Kab/Kota	300 Kab/Kota	33 Kab/kot	300 Kab/Kota	33 Kab/Kota	1.173	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11 144	Workshop Kusta di Kab/Kota	Tersedianya Workshop di Kab/kota			375 Kab/kot	11 Kab/kot	375 Kab/kot	11 Kab/kota	375 Kab/kota	11 Kab/kota	375 Kab/kota	11 Kab/kota	375 Kab/kota	11 Kab/kota	1.125	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11 145	Pemantauan Pemberian Obat Kemopropilaksis kusta	Tersedianya Pemberian Obat Kemopropilaksis kusta			135 Kab/kot	10 Kab/kot	135 Kab/kot	10 Kab/kota	135 Kab/kota	10 Kab/kota	135 Kab/kota	10 Kab/kota	135 Kab/kota	10 Kab/kota	405	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11 146	Monitoring Petugas program Kusta	Terbinanya Petugas Kusta			145 Kab/kot	11 Kab/kot	145 Kab/kot	11 Kab/kota	145 Kab/kota	11 Kab/kota	145 Kab/kota	11 Kab/kota	145 Kab/kota	11 Kab/kota	435	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11 147	Pemeriksaan dan deteksi dini kontak penderita kusta	Angka Kecacatan Tingkat 2 Kusta		<10%		<10%		<10%		<10%		<5%			750	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11 148	Assesment Kecacatan Kusta	Menurunnya tingkat cacat 2 kusta			125 Kab/kot	12 Kab/kot	125 Kab/kot	12 Kab/kota	125 Kab/kota	12 Kab/kota	125 Kab/kota	12 Kab/kota	125 Kab/kota	12 Kab/kota	520	Dinkes Provsu			
					Jumlah Kab/Kota melaksanakan mapping vektor penyakit		30%		30%		40%		50%		70%		80%					
			1 02 01 02 01 11 149	Pengendalian dan identifikasi vektor penyakit P2B2	Tersedianya pengendalian vektor penyakit P2B2 di kab/kota										20 Kab/Kot	800 Kab/Kota	24 Kab/Kota	1.400	Dinkes Provsu			
					Jumlah Kab/Kota Yang Melakukan Surveilans Kesehatan Matra		33 KK		33 KK		33 KK		33 KK		33 KK							
			1 02 01 02 01 11 150	Sosialisasi Kesehatan Matra	Tersedianya informasi surveilans kesehatan matra		33 Kab/Kota	90 Kab/Kota										90	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11 151	Surveilans kesehatan matra pada kegiatan matra khusus	Tersedianya kegiatan surveilans matra pada kegiatan matra khusus				33 Kab/Kot	150 Kab/Kota	33 Kab/Kota	150 Kab/Kota	33 Kab/Kota	200 Kab/Kota	33 Kab/Kot	200 Kab/Kota	33 Kab/Kota	700	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11 152	Monitoring evaluasi kesehatan matra	Terpantau dan teravaluasinya pelaksanaan surveilans kesehatan matra pada kegiatan wisata bahari				33 Kab/kot	150 Kab/kot	33 Kab/Kota	200 Kab/Kota	33 Kab/Kota	200 Kab/Kota	33 Kab/Kot	200 Kab/Kota	33 Kab/Kota	750	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11 153	Penyelenggaraan kesehatan matra dalam penanganan akibat bencana	Terselenggaranya surveilans kesehatan matra pada kegiatan matra lapangan				33 Kab/kot	50 Kab/kot	33 Kab/Kota	70 Kab/Kota	33 Kab/Kota	50 Kab/Kota	33 Kab/Kot	100 Kab/Kota	33 Kab/Kota	270	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 11 154	Operasional pengelolaan program pencegahan dan pemberantasan penyakit dan lingkungan sehat	Tersedianya pengelolaan program P2P dan Lingkungan Sehat				33 Kab/Kot	50 Kab/kot	33 Kab/Kota	100 Kab/Kota	33 Kab/Kota	50 Kab/Kota	33 Kab/Kot	100 Kab/Kota	33 Kab/Kota	300	Dinkes Provsu			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target
1 Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat terhadap pelayanan rujukan yang bermutu	2 Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas pelayanan medik dan penunjang medik pada Rumah Sakit	3 Jumlah rumah sakit yang terakreditasi menjadi 94 RS Tahun 2018	1 0 01 02 01 12 2	5 Program Upaya Kesehatan Perorangan	6 Jumlah RSUD yang menyelenggarakan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK)	20 RSUD	21 RSUD	9.855	24 RSUD	29.340	27 RSUD	11	35.552	34 RSUD	17	29.038	18	19	20	21	
							20 RSUD														
	Meningkatnya dan jangkauan kualitas pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit, rumah sakit khusus, dan balai kesehatan, dan laboratorium kesehatan		1 02 01 02 01 12 1	1 Workshop Penatalaksanaan Kontrasepsi Darurat bagi RSUD Kab/Kota	Terselenggaranya bintek pelayanan PONEK di RS		33 RSUD Kab/Kota , 1 RSU Provinsi	74			33 RSUD Kab/Kota, 1 RSU Provinsi	100		33 RSUD Kab/Kot a, 1 RSU Provinsi	200				Dinkes Provsu		
			1 02 01 02 01 12 2	2 Pertemuan peningkatan Pelayanan Rumah sakit Sayang Ibu dan bayi	Terselenggaranya Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi		33 RSUD Kab/Kota , 1 RSU Provinsi	74			33 RSUD Kab/Kota, 1 RSU Provinsi	200		33 RSUD Kab/Kot a, 1 RSU Provinsi	200				Dinkes Provsu		
			1 02 01 02 01 12 3	3 Peningkatan Pelayanan emergensi terpadu di sarana pelayanan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Tim Ponak RS		9 RSUD	145			33 RSUD	4.000							Dinkes Provsu		
			1 02 01 02 01 12 4	4 Pertemuan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK)	Terselenggaranya pelayanan PONEK di Rumah Sakit						33 RSUD Kab/Kota, 1 RSU Provinsi	366	33 RSUD Kab/Kota, 1 RSU Provinsi	366	33 RSUD Kab/Kota, 1 RSU Provinsi	366	33 RSUD Kab/Kota, 1 RSU Provinsi	33 RSUD Kab/Kota, 1 RSU Provinsi	Dinkes Provsu		
			1 02 01 02 01 12 5	5 Penatalaksanaan Ibu Hamil dengan Perdarahan, Pre-Eklamsia dan Infeksi di Rumah Sakit	Tertanggannya Kasus-kasus Perdarahan, Pre/Eklamsia dan Infeksi pada Ibu Hamil di Rumah Sakit						33 RSUD Kab/Kota, 1 RSU Provinsi	162	33 RSUD Kab/Kota, 1 RSU Provinsi	162	33 RSUD Kab/Kota, 1 RSU Provinsi	162	33 RSUD Kab/Kota, 1 RSU Provinsi	33 RSUD Kab/Kota, 1 RSU Provinsi	Dinkes Provsu		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			1 02 01 02 01 12 6	Penatalaksanaan Bayi Prematur dan bayi berat badan lahir rendah (BBLR) di Rumah Sakit	Tertanganinya Kasus-kasus Bayi Prematur dan BBLR di Rumah Sakit				33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota a, 1 Rumah Sakit Provinsi org/Rumah sakit	162 33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota 1 Rumah Sakit Provinsi (2 org/Rumah sakit)	162 33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota 1 Rumah Sakit Provinsi (2 org/Rumah sakit)	162 33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota 1 Rumah Sakit Provinsi (2 org/Rumah sakit)	162 33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota 1 Rumah Sakit Provinsi (2 org/Rumah sakit)	162 33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota 1 Rumah Sakit Provinsi (2 org/Rumah sakit)	33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota a, 1 Rumah Sakit Provinsi (2 org/Rumah sakit)	33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota a, 1 Rumah Sakit Provinsi (2 org/Rumah sakit)	33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota a, 1 Rumah Sakit Provinsi (2 org/Rumah sakit)	648	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 12 7	Pertemuan peningkatan pelayanan Rumah Sakit Sayang Ibu dan bayi	Terselenggaranya Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi				33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota a, 1 Rumah Sakit Provinsi (2 org/Rumah sakit)	162 33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota 1 Rumah Sakit Provinsi (2 org/Rumah sakit)	162 33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota 1 Rumah Sakit Provinsi (2 org/Rumah sakit)	162 33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota 1 Rumah Sakit Provinsi (2 org/Rumah sakit)	162 33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota 1 Rumah Sakit Provinsi (2 org/Rumah sakit)	162 33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota 1 Rumah Sakit Provinsi (2 org/Rumah sakit)	33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota a, 1 Rumah Sakit Provinsi (2 org/Rumah sakit)	33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota a, 1 Rumah Sakit Provinsi (2 org/Rumah sakit)	33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota a, 1 Rumah Sakit Provinsi (2 org/Rumah sakit)	648	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 12 8	Pertemuan Pelayanan ante natal care (ANC) Rumah Sakit dalam upaya Promotif dan Preventif Perdarahan, Pre-Eklamsia dan Infeksi	Terlaksananya Pelayanan ANC di Rumah Sakit				33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota a, 1 Rumah Sakit Provinsi (2 org/Rumah sakit)	162 33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota 1 Rumah Sakit Provinsi (2 org/Rumah sakit)	162 33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota 1 Rumah Sakit Provinsi (2 org/Rumah sakit)	162 33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota 1 Rumah Sakit Provinsi (2 org/Rumah sakit)	162 33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota 1 Rumah Sakit Provinsi (2 org/Rumah sakit)	162 33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota 1 Rumah Sakit Provinsi (2 org/Rumah sakit)	33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota a, 1 Rumah Sakit Provinsi (2 org/Rumah sakit)	33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota a, 1 Rumah Sakit Provinsi (2 org/Rumah sakit)	33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota a, 1 Rumah Sakit Provinsi (2 org/Rumah sakit)	648	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 12 9	Workshop Pemeliharaan Gizi Seimbang terhadap Ibu Hamil	Tertataletkannya Gizi seimbang di Rumah Sakit				33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota a, 1 Rumah Sakit Provinsi (2 org/Rumah sakit)	162 33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota 1 Rumah Sakit Provinsi (2 org/Rumah sakit)	162 33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota 1 Rumah Sakit Provinsi (2 org/Rumah sakit)	162 33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota 1 Rumah Sakit Provinsi (2 org/Rumah sakit)	162 33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota 1 Rumah Sakit Provinsi (2 org/Rumah sakit)	162 33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota 1 Rumah Sakit Provinsi (2 org/Rumah sakit)	33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota a, 1 Rumah Sakit Provinsi (2 org/Rumah sakit)	33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota a, 1 Rumah Sakit Provinsi (2 org/Rumah sakit)	33 Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota a, 1 Rumah Sakit Provinsi (2 org/Rumah sakit)	648	Dinkes Provsu			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Uraian capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			1 02 01 02 01 12 18	Peningkatan Kemampuan bagi Petugas Operator Pelayanan Ambulans Gawat Darurat	Terlatihnya Petugas Operator Pelayanan Ambulans Gawat Darurat				1 Unit Pelaksanaan a Teknis (UPT), 19 Rumah Sakit Swasta	150	1 Unit Pelaksanaan a Teknis (UPT), 19 Rumah Sakit Swasta	150	1 Unit Pelaksanaan a Teknis (UPT), 19 Rumah Sakit Swasta	150	1 Unit Pelaksanaan a Teknis (UPT), 19 Rumah Sakit Swasta	150	1 Unit Pelaksanaan a Teknis (UPT), 19 Rumah Sakit Swasta	600	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 12 19	Pertemuan Kerjasama Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Terpadu dengan Lintas Sektor Terkait dan rapat Intern	Terjalannya kerjasama yang baik antara lintas sektor terkait				1 Unit Pelaksanaan a Teknis (UPT)	80	1 Unit Pelaksanaan a Teknis (UPT)	80	1 Unit Pelaksanaan a Teknis (UPT)	80	1 Unit Pelaksanaan a Teknis (UPT)	80	1 Unit Pelaksanaan a Teknis (UPT)	320	Dinkes Provsu			
					Jumlah RSUD menerapkan PPK-BLUD		8 RSUD		10 RSUD		13 RSUD		15 RSUD		17 RSUD							
			1 02 01 02 01 12 20	Workshop Persiapan RS BLUD bagi RSUD Kab/Kota	Terselenggaranya workshop persiapan RS BLUD bagi RSUD Kab/Kota		33 RSUD, 1 Rumah Sakit Provinsi (3 org/Rumah Sakit)	213	33 RSUD, 1 Rumah Sakit Provinsi (3 org/Rumah Sakit)	357	33 RSUD, 1 Rumah Sakit Provinsi (3 org/Rumah Sakit)	357						927	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 12 21	Workshop pengelolaan keuangan BLU RS	Bertambahnya jumlah RSUD jadi BLUD								33 Kab/Kota	300	33 Kab/Kota	300		600	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 12 22	Pertemuan Evaluasi Tarif RSUD terkait IN CEGs dalam pelaksanaan BPJS	Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Tarif RSUD terkait IN CEGs dalam pelaksanaan BPJS								33 Kab/Kota	300	33 Kab/Kota	300		600	Dinkes Provsu			
					Jumlah RSUD yg menerapkan SPM Rumah Sakit		21 RSUD		23 RSUD		25 RSUD		29 RSUD		34 RSUD							
			1 02 01 02 01 12 23	Orientasi Indikator Kinerja dan Mutu Pelayanan RSUD Kab/Kota	Terlaksananya indikator Kinerja dan mutu di RSUD Kab/Kota		33 RSUD	253										253	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 12 24	Evaluasi Indikator Kinerja dan Mutu Pelayanan RSUD kab/Kota	Terevaluasinya indikator Kinerja dan mutu pelayanan di RSUD Kab/Kota		33 RSUD	73										73	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 12 25	Pertemuan Penatalaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit Kab/Kota	Tertatasikannya PPI dalam rangka menurunkan Angka Kejadian Infeksi di Rumah Sakit				33 RSU	210	33 RSU	210	33 RSU	210	33 RSU	210	33 RSU	840	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 12 26	Workshop Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Tercapainya Persentase Rumah Sakit Umum Daerah yang menyelenggarakan pelayanan berdasarkan SPM Rumah Sakit				33 RSU	170	33 RSU	170	33 RSU	170	33 RSU	170	33 RSU	660	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 12 27	Pertemuan penguatan Fungsi Komite Medik Rumah Sakit terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Terselenggaranya Komite Medik Rumah Sakit				33 RSU	130	33 RSU	130	33 RSU	130	33 RSU	130	33 RSU	520	Dinkes Provsu			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Usia capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			1 02 01 02 01 12 28	Sosialisasi Badan Pengawas Rumah Sakit dan Dewan Pengawas Rumah Sakit sesuai Undang-undang Rumah Sakit nomor 44 tahun 2009	Tersosialisasiya Badan Pengawas Rumah Sakit dan Dewan Pengawas Rumah Sakit				33 RSU	130	33 RSU	130	33 RSU	130	33 RSU	130	33 RSU	520	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 12 29	Pertemuan Pencegahan Resistensi Antibiotika	Tertangginya kasus-kasus Resistensi Antibiotika				33 RSU	130	33 RSU	130	33 RSU	130	33 RSU	130	33 RSU	520	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 12 30	Penguatan Sistem Rujukan Regional Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Sumatera Utara	Adanya Sistem Rujukan Regional Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Sumatera Utara				33 RSU	6.000	33 RSU	25.000	33 RSU	10.000	33 RSU	9.600	33 RSU	50.600	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 12 31	Pertemuan Jejaring dan sistem Rujukan RS mengacu pada UU No 44 tahun 2009	Terbangunnya jejaring sistem rujukan RS di Provinsi Sumatera Utara						33 RSU	300						300	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 12 32	Pengembangan jasa medis tenaga kesehatan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Terperluhinya jasa medis petugas kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara		4 UPT	2.000	4 UPT	2.000	4 UPT	2.000	4 UPT	2.000	4 UPT	2.000	4 Upt	8.000	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 12 33	Sosialisai Pelayanan Pengaduan Masyarakat ke Kab/Kota	Terperluhinya Pelayanan Kesehatan dasar di Masyarakat		33 RSU	300	33 RSU	300	33 RSU	300	33 RSU	300	33 RSU	300	33 RSU	1.200	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 12 34	Pegelolaan Sistem Informasi Rumah Sakit mendukung sistem rujukan regional	Meningkatnya sistem jejaring RS dalam rangka pelayanan rujukan						33 RSU	3.000	33 RSU	3.000				6.000	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 12 35	Pertemuan SPM RSUD dalam Peningkatan Pelayanan	Meningkatnya jumlah RS yang memiliki SPM						33 Kab/Kota	300						300	Dinkes Provsu			
					Jumlah rumah sakit yang terakreditasi		78 RS	82 RS			86 RS		90 RS		94 RS							
			1 02 01 02 01 12 36	Pertemuan advokasi stakeholder Akreditasi RSUD	Terlaksananya pertemuan advokasi stake holder akreditasi RSUD		33 Kab/Kota	435	33 Kab/Kota	483	33 Kab/Kota	483	33 Kab/Kota	483	33 Kab/Kota	483	33 Kab/Kota	2.367	Dinkes Provsu	Medan		
			1 02 01 02 01 12 37	Workshop akreditasi rumah sakit versi tahun 2012 untuk RSUD dan RSU Swasta	Meningkatnya jumlah RS yang terakreditasi		30 RS	307	30 RS	345	30 RS	360	30 RS	374	30 RS	400	30 RS	1.786	Dinkes Provsu	Medan		
			1 02 01 02 01 12 38	Bimbingan teknik dalam rangka akreditasi Rumah Sakit	Terlaksananya bimbingan teknis dalam rangka akreditasi Rumah Sakit			40 RS	200	40 RS	200	40 RS	200	40 RS	200	40 RS	200	40 RS	800	Dinkes Provsu	RS	
			1 02 01 02 01 12 39	Stimulan akreditasi Rumah Sakit	Terlaksananya stimulan akreditasi Rumah Sakit			5 RS	600	6 RS	600	6 RS	600	6 RS	600	6 RS	400	74 RS	2.200	Dinkes Provsu	RS	
					Jumlah rumah sakit yang mendapatkan penetapan kelas rumah sakit		135 RS		155 RS		175 RS		195 RS		205 RS							
			1 02 01 02 01 12 40	Pertemuan dalam rangka akselerasi Penetapan kelas Rumah sakit Umum daerah	Terlaksananya pertemuan dalam rangka akselerasi penetapan kelas RSUD		33 RSUD	140	33 RSUD	150	33 RSUD	150	33 RSUD	150	33 RSUD	150	33 RSUD	740	Dinkes Provsu	Medan		
			1 02 01 02 01 12 41	Orientasi penetapan kelas RS	Terlaksananya pertemuan dalam rangka penetapan kelas RS		33 RSUD	397	33 RSUD	437	33 RSUD	437	33 RSUD	437	33 RSUD	437	33 RSUD	1.845	Dinkes Provsu	Medan		
			1 02 01 02 01 12 42	Pertemuan Dalam Rangka Akselerasi Penetapan Kelas Rumah Sakit Swasta	Terlaksananya Pertemuan Dalam Rangka Akselerasi Penetapan Kelas Rumah Sakit Swasta			33 RSUD	33 RSUD	350	33 RSUD	350	33 RSUD	350	33 RSUD	350	33 RSUD	1.200	Dinkes Provsu	Medan		
			1 02 01 02 01 12 43	Monitoring dan Evaluasi dalam rangka penetapan kelas Rumah Sakit	Tersedianya informasi penetapan kelas Rumah Sakit			33 RSUD	33 RSUD	200	33 RSUD	200	33 RSUD	200	33 RSUD	200	33 RSUD	800	Dinkes Provsu	RS		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	92 RS	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					Jumlah RS yang menerapkan standar sarana dan prasarana					102 RS		112 RS		122 RS		132 RS						
			1 02 01 02 01 12	44	Peremuan Peningkatan Mutu penerapan standar bidang sarana dan peralatan medik pada RSUD Kab/Kota		33 Kab/Kota	260	33 Kab/Kota	300	33 Kab/Kota	300	33 Kab/Kota	300	33 Kab/Kota	200	63 RSUD dan RS Swasta	1.360	Dinkes Provsu	Medan		
			1 02 01 02 01 12	45	Peremuan Peningkatan Mutu penerapan standar bidang sarana dan peralatan medik pada RS Swasta Kab/Kota			30 RS	300	30 RS	300	30 RS	300	30 RS	300	30 RS	200	63 RSUD dan RS Swasta	1.100	Dinkes Provsu	Medan	
			1 02 01 02 01 12	46	Orientasi Standar Sarana dan Prasarana RS		33 RS	410				40 RS	450	50 RS	500	63 RSUD dan RS Swasta	1.360	Dinkes Provsu	Medan			
			1 02 01 02 01 12	47	Monitoring Evaluasi dalam rangka Penilaian Peralatan Kesehatan RS yang sudah/belum terkalibrasi		33 RS	73	60 RS	125	60 RS	125	60 RS	125	60 RS	125	63 RSUD dan RS Swasta	573	Dinkes Provsu	RS		
			1 02 01 02 01 12	48	Peremuan meningkatkan mutu dalam rangka penerapan proteksi radiasi pada alat kesehatan di RSUD		63 RSUD dan RS Swasta	305	63 RSUD dan RS Swasta	300	63 RSUD dan RS Swasta	300	63 RSUD dan RS Swasta	300	63 RSUD dan RS Swasta	200	63 RSUD dan RS Swasta	1.405	Dinkes Provsu	Medan		
			1 02 01 02 01 12	49	Peremuan meningkatkan mutu dalam rangka penerapan proteksi radiasi pada alat kesehatan RSU Swasta				63 RSUD dan RS Swasta	250	63 RSUD dan RS Swasta	250	63 RSUD dan RS Swasta	250	63 RSUD dan RS Swasta	250	63 RSUD dan RS Swasta	1.000	Dinkes Provsu	Medan		
			1 02 01 02 01 12	50	Monitoring dan Evaluasi dalam rangka meningkatkan mutu penerapan standar bidang sarana dan peralatan medik				63 RSUD dan RS Swasta	175	63 RSUD dan RS Swasta	175	63 RSUD dan RS Swasta	175	63 RSUD dan RS Swasta	175	63 RSUD dan RS Swasta	700	Dinkes Provsu	RS		
			1 02 01 02 01 12	51	Peremuan meningkatkan mutu dalam rangka pelayanan hemodialisa di Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit swasta dan sarana kesehatan lainnya				63 RSUD dan RS Swasta	250	63 RSUD dan RS Swasta	250	63 RSUD dan RS Swasta	250	63 RSUD dan RS Swasta	250	63 RSUD dan RS Swasta	1.000	Dinkes Provsu	Medan		
			1 02 01 02 01 12	52	Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pendataan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit yang sudah/belum Terkalibrasi			33 RSUD	100	33 RSUD	100	33 RSUD	100	33 RSUD	100	33 RSUD	100	33 RSUD	400	Dinkes Provsu	RS	
			1 02 01 02 01 12	53	Peremuan dalam rangka kalibrasi peralatan kesehatan pada Rumah Sakit swasta			33 RSUD	300	33 RSUD	300	33 RSUD	300	33 RSUD	300	33 RSUD	300	33 RSUD	1.200	Dinkes Provsu	Medan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			1 02 01 02 01 12 54	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Terperuhnya kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan di sarana pelayanan kesehatan																	
			1 02 01 02 01 12 55	Pengadaan Perbekalan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan Indera Masyarakat (KIM)	Terperuhnya kebutuhan perbekalan kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) KIM																	
			1 02 01 02 01 12 56	Pengadaan Perbekalan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Kusta Lau Simomo	Terperuhnya kebutuhan perbekalan kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT)																	
			1 02 01 02 01 12 57	Penyediaan makanan dan minuman pasien Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Kusta	Terperuhnya kebutuhan makan dan minum pasien Unit Pelaksana Teknis (UPT)																	
			1 02 01 02 01 12 58	Akreditasi terhadap balai laboratorium kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Terakreditasi pelayanan laboratorium di Provinsi Sumatera Utara				1 kg	100								100	UPT Labkes			
			1 02 01 02 01 12 59	Pengadaan Perbekalan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan Paru Masyarakat (KPM)	Terperuhnya kebutuhan perbekalan kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan Paru Masyarakat (KPM)		12 bln	1.465	12 bln	1.000	12 bln	10.000	12 bln	1.000	12 bln	1.000	12 bln	14.465	UPT KPM			
			1 02 01 02 01 12 60	Penyediaan fasilitas perawatan pasien dampak rokok	Tersedianya Fasilitas perawatan pasien dampak rokok		1 Pt	897			1 Pt	2.000						2.897	UPT KPM			
			1 02 01 02 01 12 61	Pengadaan Perbekalan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)	Terperuhnya kebutuhan perbekalan kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan daerah		12 Bln	427	12 Bln	1.000	12 Bln	1.000	12 Bln	750	12 Bln	750	12 Bln	3.927	UPT Labkes			
			1 02 01 02 01 12 62	Pengadaan Perbekalan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) PTC Indrapura	Terperuhnya kebutuhan perbekalan kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) PTC Indrapura				12 Bln	410	12 Bln	410	12 Bln	410	12 Bln	410	12 Bln	1.640	UPT PTC Indrapura			
			1 02 01 02 01 12 63	Peningkatan standar Pelayanan UPT kesehatan indra, kesehatan paru, laboratorium, kusta dan ambulans Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Terperuhnya standar pelayanan pada UPT Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara								3 UPT	250	2 UPT	250		500	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 12 64	Facilitasi peningkatan standar sarana dan prasarana Rumah Sakit	Terfasilitasinya peningkatan standar sarana dan prasarana Rumah Sakit									150	33 Kab/Kota	160	33 Kab/Kota	480	RS di Provsu			
			1 02 01 02 01 12 65	Clinical Pathway di RSUD dalam rangka kendali mutu dan biaya pada pelaksanaan JKN	Jumlah RSUD yang melaksanakan program keselamatan pasien Teraksennanya clinical pathway di Rumah Sakit		6 RSUD		10 RSUD		14 RSUD		18 RSUD		20 RSUD							
			1 02 01 02 01 12 66	Pertemuan Peningkatan Mutu Keselamatan Pasien (Patient Safety)	Tertanganinya kasus-kasus keselamatan pasien		33 RSUD	273										273	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 12 66	Pertemuan Peningkatan Mutu Keselamatan Pasien (Patient Safety)	Tertanganinya kasus-kasus keselamatan pasien				33 Kab/Kota	170	33 Kab/Kota	170						340	Dinkes Provsu			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			1 02 01 02 01 12 67	Integrasi Sistem peningkatan mutu RS dan upaya keselamatan pasien	Terkaitkannya integrasi sistem peningkatan mutu RS dan upaya keselamatan pasien						33 Kab/Kota	300						300	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 12 68	Pengawasan dan pembinaan Rumah Sakit oleh Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Sumatera Utara	Terkaitkannya pengawasan Rumah sakit di provinsi Sumatera Utara				33 Kab/Kota	250	33 Kab/Kota	250	33 Kab/Kota	250	33 Kab/Kota	250	33 Kab/Kota	1.000	Dinkes Provsu			
Meningkatkan kompetensi dan persebaran tenaga kesehatan	Meningkatnya ketersediaan tenaga kesehatan tersertifikasi dan pendidikan tenaga kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi menjadi 95% tahun 2018	1 0 01 02 01 13 2	Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	80%	90%	2.126	95%	8.558	95%	20.608	95%	19.808	95%	20.008	100%	71.110				
			1 02 01 02 01 13 1	Pelatihan Item Review dan Item Dept dalam rangka Uji Kompetensi tenaga Kesehatan	Tersedianya tenaga kesehatan yang teruji kompetensi		134 Institusi kesehatan	191	134 Institusi kesehatan	450	134 Institusi kesehatan	450	134 Institusi kesehatan	450	134 Institusi kesehatan	450	134 Institusi kesehatan	1.991	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 13 2	Pertemuan koordinasi Kompetensi Tenaga Kesehatan	Terkaitkannya koordinasi kompetensi tenaga kesehatan		33 orang	86	33 orang	70	33 orang	70	33 orang	70	33 orang	70	33 orang	366	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 13 3	Supervisi dan Pengumpulan data Peserta Uji Kompetensi ke Kab/Kota	Tersedianya tenaga kesehatan yang teruji kompetensi		33 Kab/Kota	55	33 Kab/Kota	172	33 Kab/Kota	172	33 Kab/Kota	172	33 Kab/Kota	172	33 Kab/Kota	743	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 13 4	Penilaian Tenaga Kesehatan teladan	Terpilihnya nakes teladan		33 Kab/Kota	115	33 Kab/kot	250	33 Kab/kot	250	33 Kab/kota	250	33 Kab/kot	250	33 Kab/kota	1.115	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 13 5	Operasional Pengelola Sumber Daya Tenaga Kesehatan	Terkaitkannya operasional program SDK		12 bulan	50											Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 13 6	Supervisi dan monitoring evaluasi kompetensi tenaga kesehatan rumah sakit dan Puskesmas	Tersedianya data tentang kompetensi tenaga kesehatan sesuai standart kompetensi				33 Kab/kot	175	33 Kab/kota	175	33 Kab/kota	175	33 Kab/kot	175	33 Kab/kota	700	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 13 7	Penempatan dan Penarikan Tenaga Kesehatan dokter dan dokter gigi PTT	Terpenuhinya tenaga kesehatan pd sarana yankes				33 Kab/kot	750	33 Kab/kota	750	33 Kab/kota	750	33 Kab/kot	750	33 Kab/kota	3.000	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 13 8	Sosialisasi registrasi tenaga kesehatan	Tersosialisasinya mekanisme registrasi tenaga kesehatan				33 Kab/kot	150								150	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 13 9	Pelaksanaan mekanisme registrasi tenaga kesehatan	Terpenuhinya mekanisme registrasi tenaga kesehatan Kab/Kota						33 Kab/kota	200	33 Kab/kota	200	33 Kab/kot	200	33 Kab/kota	600	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 13 10	Pelaksanaan uji kompetensi, registrasi dan lisenis tenaga kesehatan	Meningkatnya tenaga kesehatan yang mengikuti uji kompetensi, registrasi dan lisenis						33 Kab/kota	400	33 Kab/kota	500	33 Kab/kot	600	33 Kab/kota	1.500	Dinkes Provsu			
Meningkatnya standarisasi penyelenggaraan pelatihan kesehatan dan kesehatan masyarakat	Meningkatnya standarisasi penyelenggaraan pelatihan kesehatan masyarakat	Jumlah pelatihan kesehatan aparatur dan non aparatur yang diakreditasi menjadi 40 tahun 2018			Jumlah pelatihan kesehatan aparatur dan non aparatur yang diakreditasi		20 pelatihan		25 pelatihan		30 pelatihan		35 pelatihan		40 pelatihan							

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target		Rp		
			1 02 01 02 01 13	Pengujian/identifikasi kebutuhan pelatihan tenaga kesehatan	Terpetakannya kebutuhan pelatihan dan pendidikan tenaga kesehatan		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	500	UPT Pelkes	21
			1 02 01 02 01 13	Pengembangan jejaring dan teknologi pelatihan kesehatan	Terpetakannya standar pelatihan dan jejaring pelatihan tenaga kesehatan		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	500	UPT Pelkes	
			1 02 01 02 01 13	Pengujian/identifikasi kebutuhan pelatihan tenaga kesehatan masyarakat	Terpetakannya kebutuhan pelatihan dan pendidikan tenaga kesehatan masyarakat		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	500	UPT PTC Indrapura	
			1 02 01 02 01 13	Pengembangan jejaring dan teknologi pelatihan kesehatan	Terpetakannya standar pelatihan dan jejaring pelatihan tenaga kesehatan masyarakat		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	500	UPT PTC Indrapura	
			1 02 01 02 01 13	Pelatihan Kepemimpinan Puskesmas	Terlatihnya Kepala Puskesmas dalam bidang kepemimpinan pelayanan kesehatan dasar		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	200	Dinkes Provsu	
			1 02 01 02 01 13	Pelatihan bagi penyelenggaraan pelatihan (Training Officer Course)	Terlatihnya pengelola program yang menyelenggarakan pelatihan		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	100	Dinkes Provsu	
			1 02 01 02 01 13	Supervisi dan Bimbingan teknis Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan	Terlaksananya supervisi dan pembinaan teknis institusi pendidikan tenaga kesehatan		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	87	Dinkes Provsu	
			1 02 01 02 01 13	Pelatihan jabatan fungsional epidemiolog kesehatan	Terlatihnya tenaga fungsional epidemiolog kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	800	Dinkes Provsu	
			1 02 01 02 01 13	Pelatihan jabatan fungsional administrator kesehatan	Terlatihnya tenaga fungsional administrator kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	800	Dinkes Provsu	
			1 02 01 02 01 13	Pertemuan Akreditasi Pelatihan	Meningkatnya pengetahuan pengelola pelatihan dalam mengakreditasi pelatihan		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	600	Dinkes Provsu	
			1 02 01 02 01 13	Monitoring dan evaluasi pelatihan kab/kota	Terlaksananya implementasi pelatihan di kab/kota		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	480	Dinkes Provsu	
			1 02 01 02 01 13	Pelatihan jabatan Fungsional Enomolog Kesehatan	Terlatihnya tenaga fungsional enomolog kesehatan Provinsi / Kabupaten/Kota		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	800	Dinkes Provsu	
			1 02 01 02 01 13	Pelatihan jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Terlatihnya tenaga fungsional penyuluh kesehatan masyarakat Provinsi / Kabupaten/Kota		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	600	Dinkes Provsu	
			1 02 01 02 01 13	Peningkatan Standar Pelayanan UPT pelatihan kesehatan dan kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Terpetakannya standar UPT pelatihan kesehatan dan kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	200	Dinkes Provsu	
			1 02 01 02 01 13	Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit jabatan Fungsional Kesehatan	Terlatihnya Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional kesehatan Provinsi / Kabupaten/Kota		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	800	Dinkes Provsu	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Uraian capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	Pemerataan tenaga medis kesehatan strategis per Puskesmas sesuai kebutuhan di pelayanan dasar maupun rujukan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					Ratio tenaga medis per Puskesmas	1	minimal	1	minimal	1	minimal	1	minimal	1	minimal	1						
			1 02 01 02 01 13	25	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Tersedianya informasi terbaru kebijakan perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan di kab/kota		596										596	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 13	26	Updating Sumber daya manusia Kesehatan	Tersedianya sistem Informasi Kesehatan di kab/kota				129		129		129		129		516	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 13	27	Pembinaan Perencanaan Sumberdaya manusia Kesehatan	Terpenuhi rasio Tenaga Medis per Puskesmas Min 1				129		129		129		129		516	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 13	28	Pertemuan Koordinasi Pengembangan Sumberdaya manusia Kesehatan	Terpenuhi rasio Tenaga Medis per Puskesmas Min 1				121		121		121		121		484	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 13	29	Sosialisasi Program Internship Dokter Indonesia bagi Rumah Sakit Swasta	Program Kebijakan dan Manajemen Pengembangan Kesehatan				80		80		80		80		320	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 13	30	Monitoring dan Evaluasi Dokter Internship	Terpenuhi rasio Tenaga Medis per Puskesmas Min 1				90		90		90		90		360	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 13	31	Pertemuan Evaluasi pelaksanaan program dokter Internship	Terkoordinasinya pelaksanaan pendampingan dokter Internship				132		132		132		132		528	Dinkes Provsu			
					Persentase RSUD yang memenuhi standar ketenangan dokter spesialis		50%		60%		70%		80%		1							
			1 02 01 02 01 13	32	Pendidikan dokter spesialis untuk penguasan khusus	meningkatkan jumlah dokter spesialis di RSUD Pemrintah Kab/Kota						10.000		10.000		10.000		30.000	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 13	33	Pertemuan Evaluasi pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan	Terselenggaranya koordinasi evaluasi pengembangan Sumberdaya manusia Kesehatan				170		170		170		170		680	Dinkes Provsu			
					Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Saka bakti Husada (SBH)		14 KK		20 KK		24 KK		29 KK		33 KK							
			1 02 01 02 01 13	34	Pertemuan Bakti Husada se-sumatera Utara	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan SBH pada institusi pendidikan negeri & swasta				200		200		200		200		800	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 13	35	Facilitasi/Pelatihan Pamong Saka Bakti Husada (SBH) Kabupaten/ kota	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pamong SBH kabupaten/ kota				200		200		200		200		800	Dinkes Provsu			
					Persentase Penetapan angka kredit jabatan fungsional		20%		30%		70%		80%		1							

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			1 02 01 02 01 13 36	Pertemuan Penilaian Penetapan Angka Kredit Fungsional Fisioterapi	Tersedianya informasi penetapan angka kredit jabatan fungsional fisioterapist			200										200	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 13 37	Dukungan Manajemen Tim Pengelola Jabatan Fungsional	Tersedianya operasional penilaian dan penetapan angka kredit			127		150	150	150	150	150	150	150		727	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 13 38	Rapat berkala Tim jabatan Fungsional Provinsi Sumatera Utara	Tersedianya rapat berkala Tim Penilai Jabatan Fungsional Provsu			60		60	60	60	60	60	60	60		300	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 13 39	Pertemuan Penilaian Penetapan Angka Kredit (PAK) jabatan Fungsional Sanitarian	Meningkatnya pemahaman petugas tentang PAK jabatan fungsional sanitarian			75										75	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 13 40	Pertemuan Penilaian Penetapan angka kredit (PAK) jabatan Fungsional Apoteker	Meningkatnya pemahaman petugas tentang PAK jabatan fungsional apoteker			111										111	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 13 41	Pertemuan Penilaian Penetapan angka kredit (PAK) jabatan Fungsional Nutrisionist	Meningkatnya pemahaman petugas tentang PAK jabatan fungsional nutrisionist			75										75	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 13 42	Pertemuan koordinasi pengelolaan jabatan fungsional kabupaten/ kota	Tersedianya pertemuan koordinasi pengelola jabatan fungsional kab/ kota					130	130	130	130	130	130	130		520	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 13 43	Pertemuan penilaian PAK (penetapan angka kredit) jabatan fungsional nutrisionist	Meningkatnya pemahaman petugas tentang PAK jabatan fungsional nutrisionist					150	150	150	150	150	150	150		600	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 13 44	Pertemuan penilaian PAK (penetapan angka kredit) jabatan fungsional fisioterapist	Tersedianya informasi penetapan angka kredit jabatan fungsional fisioterapist					100	100	100	100	100	100	100		400	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 13 45	Dukungan Pengembangan dan peningkatan Mutu jabatan Fungsional tenaga Kesehatan	Diperolehnya informasi mutu tentang Tenaga kesehatan Fungsional					100	100	100	100	100	100	100		400	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 13 46	Supervisi dan bimbingan teknis institusi pendidikan tenaga kesehatan	Tersedianya supervisi dan pembinaan teknis institusi pendidikan tenaga kesehatan					100	100	100	100	100	100	100		400	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 13 47	Pelatihan Manajemen Penatalaksanaan Malaria	Terdithnya petugas kesehatan di Kab/Kota dalam penatalaksanaan Malaria sebanyak 60 org.				2 akt	175	2 akt	175	2 akt	175	2 akt	175	2 akt	700	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 13 48	Pelatihan Manajemen Penanggulangan HIV Aids	Terdithnya petugas Puskesmas kesehatan di Dinkes Kab/Kota dalam Penanggulangan HIV Aids sebanyak 60 org.				2 akt	175	2 akt	175	2 akt	175	2 akt	175	2 akt	700	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 13 49	Pelatihan Pelaksanaan BBLR bagi petugas kesehatan di Kab/Kota	Terdithnya petugas kesehatan di Kab/Kota dalam penatalaksanaan BBLR sebanyak 60 org.				2 akt	175	2 akt	175	2 akt	175	2 akt	175	2 akt	700	Dinkes Provsu			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Uraian capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
			1 02 01 02 01 13 50	Pelatihan Immunisasi bagi petugas vaksinasi disarana pelayanan kesehatan Kab/Kota	Terlathnya petugas vaksinator Puskesmas di Kab/Kota dalam pelaksanaan imunisasi sebanyak 60 org.				2 akt	175	2 akt	175	2 akt	175	2 akt	175	2 akt	700	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 13 51	Pelatihan Pengisian Partograf bagi petugas kesehatan di Kab/Kota	Terlathnya petugas kesehatan Puskesmas di Kab/Kota dalam pengisian Partograf sebanyak 60 org.				2 akt	175	2 akt	175	2 akt	175	2 akt	175	2 akt	700	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 13 52	Pelatihan TOT HIV AIDS bagi petugas Puskesmas	Terlathnya 150 orang petugas kesehatan Puskesmas di Kab/Kota dalam				5 akt	450	5 akt	450	5 akt	450	5 akt	450	5 akt	1800	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 13 53	Perencanaan Manajemen pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan primer kab/kota	Terlathnya 60 orang Petugas (KTU/Kapusk) Puskesmas di Kab/Kota.				2 akt	175	2 akt	175	2 akt	175	2 akt	175	2 akt	700	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 13 54	Perencanaan Mutu Tenaga Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Primer	Terlathnya 60 orang KTU/Kapusk, Puskesmas di Kab/Kota.				2 akt	175	2 akt	175	2 akt	175	2 akt	175	2 akt	700	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 13 55	Pelatihan jabatan fungsional dokter gigi di Sarana Pelayanan Kesehatan	Terlathnya 60 drg Puskesmas di Dinkes Kab/Kota				2 akt	245	2 akt	245	2 akt	245	2 akt	245	2 akt	980	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 13 56	Pelatihan lamaran Kesehatan Nasional	Terlathnya Petugas Penjab BPJS di Dinas dan Rumah Sakit				4 akt	400	4 akt	400	4 akt	400	4 akt	400	4 akt	1.600	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 13 57	Pelatihan jabatan fungsional Administrasi kesehatan	Terlathnya30 orang petugas administrasi di Dinas Kesehatan Kab/Kota yang tersertifikasi				1 akt	125	1 akt	125	1 akt	125	1 akt	125	1 akt	500	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 13 58	Pelatihan jabatan fungsional Perawat	Terlathnya 60 orang petugas gizi di Puskesmas yang tersertifikasi				2 akt	245	2 akt	245	2 akt	245	2 akt	245	2 akt	980	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 13 59	Pelatihan Standar Pertumbuhan Balita	Terlathnya 30 orang petugas gizi di Puskesmas yang tersertifikasi				1 akt	100	1 akt	100	1 akt	100	1 akt	100	1 akt	400	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 13 60	Pelatihan teknis pelaporan, penyimpanan, dan pendistribusian Narkotika dan Psikotropika	Terlathnya 60 orang petugas pengelola obat Puskesmas.				2 akt	175	2 akt	175	2 akt	175	2 akt	175	2 akt	700	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 13 61	Pelatihan Manajemen Tata laksana inisiasi menyusui dini (IMD) dan ASI Eksklusif	Terlathnya 90 orang petugas TPG, Bidan desa Puskesmas				3 akt	265	3 akt	265	3 akt	265	3 akt	265	3 akt	1.060	Dinkes Provsu					
Mengembangkan n mutu manajemen pelayanan kesehatan dan kebijakan pembangunan kesehatan	Pengembangan sistem perencanaan berbasis fakta yang akurat, efisien dan transparan	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran dan kesehatan yang dihasilkan per tahun menjadi 5 dokumen Tahun 2018	1 0 01 02 01 14 2	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran dan kesehatan yang dihasilkan per tahun	5 dok/thn	127.710	5 dok/thn	84.243	5 dok/thn	144.751	5 dok/thn	101.921	5 dok/thn	114.291	5 dok/thn	100%	572.924						
			1 02 01 02 01 14 1	Sustainability PHP-II (Operasional BPJHC dan rapat-rapat lintas program dan lintas sektoral tingkat provinsi)	Meningkatnya komitmen LP/LS terkait serta stakeholders kesehatan lainnya dalam melakukan pembinaan dan kerjasama peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	33 Kab/Kota	647											647	Dinkes Provsu					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
			1 02 01 02 01 14	Operasional Pengelolaan Program Kebijakan dan manajemen Pembangunan Kesehatan	Terlaksananya operasional program KMPK	12 Bln	69											69	Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 14	Koordinasi Pembangunan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya koordinasi pembangunan kesehatan Provinsi Sumatera Utara	2 KI	532	3 KI	1.200	3 KI	1.200	3 KI	1.200	3 KI	1.200	3 KI	5.332		Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 14	Musyawarah rencana Pembangunan (Musrenbang) Forum SKPD Bidang Kesehatan tahun 2014	Terlaksananya Musrenbang forum SKPD	1 KI	365	1 KI	360	1 KI	360	1 KI	360	1 KI	360	1 KI	1.805		Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 14	Pembinaan Tenaga Perencanaan Kesehatan Kab/Kota	Terlaksananya pembinaan tenaga perencanaan kesehatan	33 Kab/Kota	244										244		Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 14	Sinkronisasi perencanaan dan Penganggaran serta penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	1 KI	364	2 KI	850	2 KI	850	2 KI	850	2 KI	850	2 KI	3.764		Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 14	Penyusunan dan Penyelarasan Renstra Dinkes 2013-2014 pasca Penetapan Perda RPJMD 2013-2018	Tersusunnya Renstra sesuai dengan RPJMD 2013-2018	1 KI	153										153		Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 14	Penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	Tersusunnya Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Dinkes Provinsi Sumatera Utara	1 KI	58										58		Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 14	Rapat kerja kesehatan daerah (Rakerkesda) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015	Terlaksananya rapat kerja kesehatan daerah			1 KI	350	1 KI	350	1 KI	400	1 KI	350	1 KI	1.450		Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 14	Facilitasi dan perencanaan dan penganggaran kesehatan Kabupaten/kota	Terlaksananya pembinaan tenaga perencana kesehatan			33 Kab/Kota	340	33 Kab/Kota	340	33 Kab/Kota	340	33 Kab/Kota	340	33 Kab/Kota	1.360		Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 14	Pertemuan penyusunan strategi pasca MDG'S dan analisis pencapaian MDG'S	Tersusunnya rencana keberlanjutan program pasca MDG'S dan tersusunnya pencapaian MDGS Provinsi Sumatera Utara			33 Kab/Kota	250	33 Kab/Kota	250						500		Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 14	Peningkatan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan pelayanan kesehatan	Terwujudnya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat			1 lembaga da 33 kab/kota	2.500	1 lembaga da 33 kab/kota	2.500	1 lembaga da 33 kab/kota	2.500	1 lembaga da 33 kab/kota	2.500	1 lembaga da 33 kab/kota	10.000		Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 14	Pemantapan Penyusunan Standard Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Dinas Kesehatan Provinsi dan UPT	Tersusunnya SP dan SOP Dinas Kesehatan Provinsi dan UPT			1 Pt	500								500		Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 14	Penyusunan perencanaan dan anggaran SKPD bidang Kesehatan	Tersusunnya Renja, RKA dan DPA Dinas Kesehatan Provinsi dan UPT			1 Keg	300	1 Keg	300	1 Keg	300	1 Keg	300	1 Keg	1.200		Dinkes Provsu					
			1 02 01 02 01 14	Pertemuan Pasca Musrenbang bidang Kesehatan	Tersinkronisasi Rencana kerja bidang Musrenbang Provinsi Sumatera Utara			1 KI	250	1 KI	250	1 KI	250	1 KI	250	1 KI	1.000		Dinkes Provsu					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			1 02 01 02 01 14 16	Pendataan dan pemeliharaan aset Provinsi Sumatera Utara	Terpelihara dan terdokumentasinya barang milik negara			33 Kab/Kota	350 Kab/Kota	350 Kab/Kota	350 Kab/Kota	350 Kab/Kota	350 Kab/Kota	350 Kab/Kota	350 Kab/Kota	350 Kab/Kota	350 Kab/Kota	1.400	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 14 17	Penataan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pedoman, hukum pengadaaan kesehatan	Terbinanya petugas penanggung jawab hukum kesehatan kab/kota			33 Kab/Kota	150 Kab/Kota	150 Kab/Kota	150 Kab/Kota	150 Kab/Kota	150 Kab/Kota	150 Kab/Kota	150 Kab/Kota	150 Kab/Kota	150 Kab/Kota	600	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 14 18	Sosialisasi dan pembinaan peraturan perundangan serta hukum kesehatan	Terkelolanya sosialisasi penerapan perundang-undangan terkait praktik kedokteran			33 Kab/Kota	75 Kab/Kota	75 Kab/Kota	75 Kab/Kota	75 Kab/Kota	75 Kab/Kota	75 Kab/Kota	75 Kab/Kota	75 Kab/Kota	300	Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 14 19	Kemitraan pemberdayaan masyarakat dalam penurunan kematian ibu dan anak	Terkelolanya kemitraan dengan masyarakat dalam penurunan kematian ibu dan anak		10 Lembaga	30			30 Lembaga	90 Lembaga	90 Lembaga	90 Lembaga	90 Lembaga	90 Lembaga	300	Dinkes Provsu				
Meningkatkan jumlah penduduk yang terlindungi dengan sistem pembiayaan pemeliharaan managed care .	Meningkatnya pembiayaan dan kesehatan menjadi kualitas jaminan pemeliharaan kepada masyarakat.	Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan menjadi 95% tahun 2018			Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan		60%	70%			82%		90%		0,95							
			1 02 01 02 01 14 20	Pemeliharaan kesehatan masyarakat Sumatera utara	Terkelolanya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk Sumatera Utara		33 Kab/Kota	123.000 Kab/Kota	33 Kab/Kota	70.000 Kab/Kota	33 Kab/Kota	131.518 Kab/Kota	33 Kab/Kota	90.000 Kab/Kota	33 Kab/Kota	102.176 Kab/Kota	33 Kab/Kota	516.694	Dinkes Provsu			
			1 02 01 02 01 14 21	Rapat koordinasi Percepatan pelaksanaan kesepertaan Semesta	Terkelolanya rapat koordinasi percepatan kesepertaan Semesta		33 Kab/Kota	130 Kab/Kota	33 Kab/Kota	250 Kab/Kota							380	Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 14 22	Advokasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke kab/kota	Terdokumentasinya JKN ke kab/kota			33 Kab/Kota	300 Kab/Kota	300 Kab/Kota	300 Kab/Kota	300 Kab/Kota	300 Kab/Kota	300 Kab/Kota	300 Kab/Kota	300 Kab/Kota	1.200	Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 14 23	Desiminasi informasi jaminan kesehatan nasional di Provinsi Sumatera Utara	Terdokumentasinya JKN ke kab/kota			33 Kab/Kota	100 Kab/Kota	100 Kab/Kota	100 Kab/Kota	100 Kab/Kota	100 Kab/Kota	100 Kab/Kota	100 Kab/Kota	100 Kab/Kota	400	Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 14 24	Pengulangan komitmen kesepertaan semesta	Meningkatnya jumlah kesepertaan JKN Mandiri						33 Kab/Kota	200 Kab/Kota	200 Kab/Kota	200 Kab/Kota	200 Kab/Kota	200 Kab/Kota	600	Dinkes Provsu				
Mengembangkan sistem pengendalian internal dan manajemen aset pengelolaan, serta penanganan tahun menjadi 7 laporan hasil dokumen per pemeriksaan Tahun tahun 2018		Jumlah dokumen monitoring, pengendalian dan evaluasi yang dihasilkan per tahun			Jumlah dokumen monitoring, pengendalian dan evaluasi yang dihasilkan per tahun		7 dok/thn	7 dok/thn	7 dok/thn	7 dok/thn	7 dok/thn	7 dok/thn	7 dok/thn	7 dok/thn	7 dok/thn	7 dok/thn						
			1 02 01 02 01 14 25	Penyusunan dan pembuatan laporan dan evaluasi tahunan	Tersusunnya dokumen evaluasi tahunan dan LAKIP Dinkes Provsu		33 Kab/Kota	87 Kab/Kota	33 Kab/Kota	100 Kab/Kota	33 Kab/Kota	100 Kab/Kota	100 Kab/Kota	100 Kab/Kota	100 Kab/Kota	100 Kab/Kota	487	Dinkes Provsu				
			1 02 01 02 01 14 26	Evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan kesehatan	Terevaluasinya pelaksanaan program / kegiatan kesehatan tahun 2012		33 Kab/Kota	165 Kab/Kota	33 Kab/Kota	175 Kab/Kota	33 Kab/Kota	175 Kab/Kota	33 Kab/Kota	175 Kab/Kota	33 Kab/Kota	175 Kab/Kota	865	Dinkes Provsu				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) (Output)	Data capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							Perencana	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	2	3	4	5	6	7	33 Kab/Kota	209	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	1.009	Dinkes Provsu					
							33 Kab/Kota	64			2 lap	50	2 lap	50	2 lap	50	2 lap	214	Dinkes Provsu					
							33 Kab/Kota	214			33 Kab/Kota	100	33 Kab/Kota	100	33 Kab/Kota	100	33 Kab/Kota	514	Dinkes Provsu					
											33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	150	33 Kab/Kota	600	Dinkes Provsu					
											33 Kab/Kota	175						175	Dinkes Provsu					
											33 Kab/Kota	300	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	900	Dinkes Provsu					
							100%				100%		100%			1								
							33 Kab/Kota	162										162	Dinkes Provsu					
							33 Kab/Kota				33 Kab/Kota	175	33 Kab/Kota	300	33 Kab/Kota	406	33 Kab/Kota	1.281	Dinkes Provsu					
							33 KK				33 KK		33 KK		33 KK									
							33 Kab/Kota	298	33 kab/kot	600								898	Dinkes Provsu					
							33 Kab/Kota	200	33 Kab/Kota	1.750	33 Kab/Kota	1.750	33 Kab/Kota	1.750	33 Kab/Kota	1.750	33 Kab/Kota	7.200	Dinkes Provsu					
							33 Kab/Kota	150		150				150		150		750	Dinkes Provsu					
							6 Kab/kota	100										100	Dinkes Provsu					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
							Tahun 1			Tahun 2			Tahun 3			Tahun 4			Tahun 5					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
							Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
			1 02 01 02 01 14	41	Pertemuan pengelola sistem informasi kesehatan (SIK) dan Bank Data Kesehatan serta pengelolaan informasi Publik	Terlaksananya petugas SIK dan Bank Data kesehatan						200	-	-	-	-	-	200	Dinkes Provsu							
			1 02 01 02 01 14	42	Penilaian mandiri kualitas data rutin (PMKDR)	Terlaksananya pembinaan manajemen data kesehatan				250		250		250		250		1.000	Dinkes Provsu							
			1 02 01 02 01 14	43	Pemuktahiran Data Pelayanan Kesehatan Primer di Kab/Kota Utara	Terlaksananya data pelayanan primer di provinsi Sumatera Utara		33 Kab/Kot	33 Kab/Kot	318	33 Kab/Kota	318						636	Dinkes Provsu							
			1 02 01 02 01 14	44	Pilot Project Penerapan Sistem Informasi Kesehatan daerah (SIKDA) Generik	Tersosialisasinya SIKDA Generik		5 kab/kot	450									450	Dinkes Provsu							
			1 02 01 02 01 14	45	Peningkatan Pengelolaan Informasi Publik daerah	Terlayannya kebutuhan Informasi Publik daerah Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan	100%		100%			100%	100%	100%	1	100%		150	Dinkes Provsu							
			1 02 01 02 01 14	46	Peningkatan Kapasitas Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola JKN	33 Kab/Kota	250			33 Kab/Kota	250			33 Kab/Kot	250	33 Kab/Kota	750	Dinkes Provsu							
			1 02 01 02 01 14	47	Pemantapan Persiapan pelaksanaan BPJS	Tersosialisasinya BPJS ke Kab/Kota dan tersedianya spanduk, poster, balho, dll di Kab/Kota	33 Kab/Kota	227										227	Dinkes Provsu							
			1 02 01 02 01 14	48	Rapat lintas Program/Intas sektor kepesertaan Penerima bantuan luran (PBI)	Terwujudnya komitmen kepesertaan PBI di Sumatera Utara			33 Kab/Kot	450	33 Kab/Kota	450		-	-	-	-	900	Dinkes Provsu							
			1 02 01 02 01 14	49	Pengalangan komitmen Kab/Kota untuk bekerja sama dengan Badan penyelenggara jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	Terciptanya komitmen Kab/Kota dengan BPJS Kesehatan				450		450		450		450		1.800	Dinkes Provsu							
			1 0 01 02 01 15	2	Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah penelitian dan pengembangan kesehatan yang dilaksanakan	0		3 riset	400	6 riset	629	9 riset	560	12 riset	587	100%	2.176								
Meningkatkan pelayanan penelitian untuk intervensi kesehatan	Penelitian berorientasi intervensi kesehatan individu	Jumlah penelitian dan pengembangan kesehatan yang dilaksanakan menjadi kumulatif 15 penelitian program kesehatan Tahun 2018	1 02 01 02 01 15	1	Penelitian teknologi kesehatan dan biomedis	Tersedianya informasi hasil penelitian teknologi kesehatan dan biomedis untuk pengambilan kebijakan dan evaluasi			1	0	1	250	0	0	1	200		450	Dinkes Provsu							

